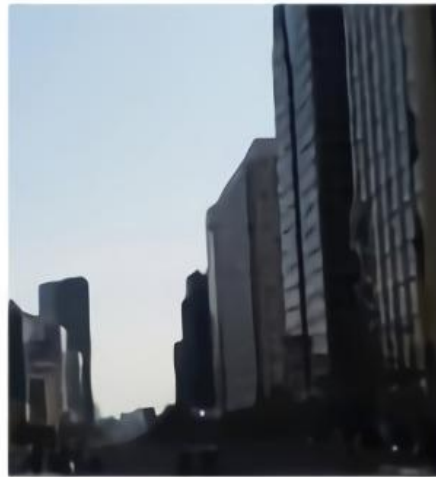
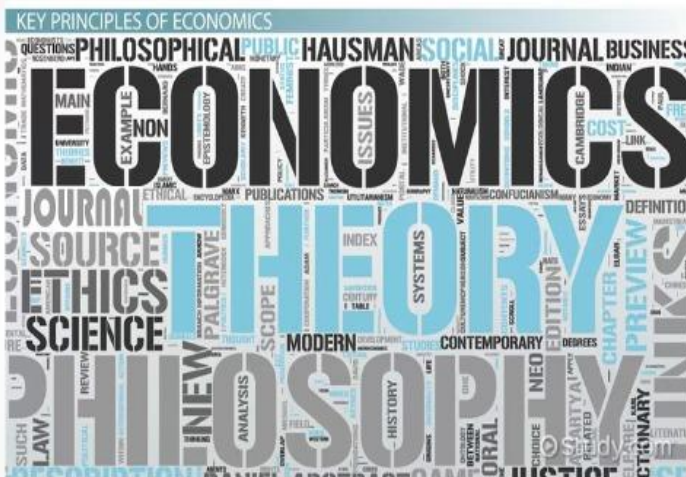


Volume 6. Nomor 1. Tahun 2025, ISSN : 2774-9665 (media online)



**FAKULTAS EKONOMI
UNIMA**



JURNAL EQUILIBRIUM

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DARAN (STUDI KASUS: DESA DARAN KEC. PULUTAN KAB. TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA)

Ronaldo Y. Lomban¹, Arie F. Kawulur², Johnie Rumokoy³

^{1,2}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado

³Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado

e-mail: lombanaldo@gmail.com, ariekawulur@unima.ac.id, johnierumokoy@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Daran berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti perencanaan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, menjadi faktor utama keberhasilan pada pengelolaan dana desa di desa tersebut. Temuan penelitian ini dapat dijadikan contoh positif bagi desa-desa lain pada mengelola dana desa secara efektif dan efisien.

Kata kunci: Dana Desa, Infrastruktur, Pemerintah

Abstract

This research shows that the management of village funds in Daran Village has succeeded in improving the quality of life of the community by developing adequate infrastructure. The application of good governance principles, such as participation planning, transparency and accountability, is the main factor in the success of village fund management in the village. The findings of this study can be used as a positive example for other villages in managing village funds effectively and efficiently.

Keywords : Village Fund, Infrastructure, Government

1. Pendahuluan

Desa merupakan definisi dari suatu kumpulan rakyat yang memiliki tatanan yang sesuai dengan hak asal usul yang memiliki sifat spesial. Dasar pemikiran terkait pemerintahan pada desa yakni keberagaman, keaktifan, otonomi, sistem demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat (Wardana, 2021). Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait pemerintahan pada Desa Dakan “Desa”. Desa mendefinisikan sebuah kumpulan rakyat yang memiliki wewenang, mengatur urusan yang berkaitan dengan Desa pada bidang pemerintahan, kebutuhan warganya yang berbasis pada hak-hak yang divalidasi pada sistematisa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lindawaty, 2023).

Pengertian valid yang terkandung Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979, Desa didefinisikan dengan “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penjabaran definisi dari desa berdasarkan sudut pandang administrasi pemerintah. Beberapa ahli seperti Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), Cenderung memprioritaskan perhatiannya terhadap warga yang tinggal di Desa “sebagai unit sosial,” yakni kumpulan kelompok individu yang tinggal secara berkompleks pada sebuah daerah, yang belum tentu memiliki kesamaan dengan kawasan administrasi di sekitarnya, serta termasuk lahan pertanian yang dipegang bersama.

Desa merupakan kumpulan dari persatuan hukum pada lingkungan tinggal warga “pemerintahan sendiri”. Jika dilihat dari segi historis, pemerintah desa terbentuk akibat dipilih oleh warga yang telah dipercaya mampu mengatur, melindungi, menstruktur, memberi kemajuan, dan melayani dalam berbagai unsur kehidupan masyarakatnya (Hadara & Batia, 2023). Umumnya, unsur kehidupan utama di desa yakni adat istiadat, baik yang lisan maupun tulisan, kegiatan ekonomi pertanian perkebunan maupun perikanan, perdagangan, serta

sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban, serta sistem pemerintahan dan strateginya. Adanya pemerintah di desa adalah sebuah wujud dari keintegritasan organisasi maupun lembaga yang ada di sekitar warga desa. Dengan hadirnya sistem pemerintah, keperluan serta eksistensi warga desa dapat terpenuhi (Hadara & Batia, 2023).

Kemudian pada PP Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa merupakan pengadaan keperluan yang berkaitan dengan ke pemerintahan yang dilakukan pemerintah serta badan musyawarahnya perihal mengurus serta mengatur keperluan warganya yang berbasis pada asal – usul serta adat istiadat sekitar yang telah divalidasi pada ke pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Membahas terkait pemerintahan Daerah yakni Desa, Pemerintahan Desa merupakan pengadaan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan serta kebutuhan warganya pada sistematika pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Yang membahas Desa, Pemerintah desa maupun panggilan lainnya yakni kepala desa beserta perangkat desa yang menjadi aspek penting dalam pengadaan pemerintahan desa.

Jadi, desa merupakan suatu kumpulan rakyat yang berada dalam suatu daerah dan mempunyai kewenangan dalam menjalankan pemerintahan serta keperluan rakyat yang dihormati maupun mendapat pengakuan oleh NKRI (Hasjimzoem, 2015). Desa merupakan bagian terpenting dalam suatu Negara. Pada penelitian yang memiliki tujuan mengetahui tata kelola keuangan desa di desa Daran kecamatan Pulutan kabupaten kepulauan Talaud (Salindeho et al., 2017).

Pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Yang membahas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Pasal 1 Ayat 23 menjabarkan apabila lingkungan desa merupakan lingkungan yang kegiatan utamanya bergerak di bidang pertanian yang juga mencakup kelola sumber daya alam dengan tatanan daerah sebagai lingkungan tempat tinggal, tempat penyediaan layanan sosial dan pemerintahan, serta kegiatan untuk melakukan mata pencaharian. Tetapi dengan adanya kemajuan secara singkat akhirnya membuka peluang bagi pemerintah untuk menciptakan kesempatan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup warganya dan berbasis dari kreativitas warga itu sendiri (Aisyahrani, 2024).

Dana Desa artinya unsur terpenting pada peningkatan Desa. Desa menjadi unsur penting dalam kualitas kesejahteraan warganya, atas hal tersebut, adanya pengembangan desa sebagai unsur penting perlu diadakan, sebab terdapat aspek penting seperti pemerataan serta warga desa dapat menikmati secara langsung. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong tingkat kesejahteraan penduduk desa tersebut (Hanasi et al., 2024).

Ketika pelaksanaan pengelolaan dana pada desa, desa mendapat kewenangan serta rancangan dana asal APBN yang dianggap dana keuangan desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan serta belanja Negara (APBN) yang ditujukan pada desa dikirim dengan rancangan pendapatannya serta belanja wilayah (APBD) kabupaten/kota dan dipergunakan agar pembiayaan dalam pengadaan pemerintah dapat berjalan, aplikasi pembangunan, pelatihan rakyat, serta pengembangan kualitas warga .

Keuangan desa tadi bertujuan buat mengadakan/menaikkan layanan umum masyarakat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian yang ada, mengentaskan ketertinggalan dengan desa lain, memperkuat warga desa untuk menjadi subjek, pembangunan, serta mengadakan wewenang bagi desa dalam pelaksanaan pembangunan secara independen dan memanfaatkan hal-hal potensial yang dimiliki dan menjadi fasilitator asal pemerintah, menjadi dasar untuk melakukan peningkatan pembangunan serta pengembangan kualitas desa.

Pengelolaan keuangan dana desa meliputi, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 yaitu “perencanaan meliputi, sekdes menyusun raperdes tentang APBdes yang akan dibahas dan disepakati antara kades dan BPD”. APBdes dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBdes dinyatakan raperdes tidak sesuai. APBdes disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan dan prioritas

penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, pemdes dan unsur masyarakat (Masitoh, 2021).

Pengelolaan yang terdiri atas jumlah nominal yang keluar serta nominal yang masuk dilaksanakan dengan menggunakan rekening kas desa maupun mengikuti kebijakan pemerintah di atas Desa menggunakan lampiran pendukung yang sah dan lengkap. Pemdes tidak diperbolehkan menarik pungutan diluar ketetapan yang tertera pada perdes, bendahara mampu mengatur manajemen uang pada kas desa serta menetapkan jumlahnya menggunakan perbup/walikota, penyediaan fasilitas sarana serta jasa didesa dikelola menggunakan perbup/walikota serta penggunaan biaya tidak terprediksi didesain mendetail di RAB serta dilakukan pengesahan oleh ketua desa.

Penatausahaan terdiri atas melaksanakan agenda tutup buku di setiap bulan (di akhir) yang wajib dikerjakan dengan bendahara desa, pencatatan segala sesuatu yang masuk serta yang keluar, mempertanggungjawabkan uang dengan mengerjakan laporan. Laporan dilaksanakan satu bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada kepala desa serta memakai buku kas umum, buku kas pembantu serta buku bank.

Proses membuat laporan dalam mempertanggungjawabkan keuangan terdiri atas, kades yang memberitahukan hasil laporan untuk bupati dengan memberikannya kepada camat terlebih dahulu. Laporan tersusun atas laporan realisasi pelaksanaan APBdes semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi aplikasi APBdes dilaporkan secara rutin yakni di penghujung tahun rancangan dana tersusun atas pendapatan, belanja, serta pendanaan sesuai apa yang dipatenkan pada perdes dan panduan penulisan laporan.

Menurut Tinggogoy dan Ngongano menyatakan bahwa Pemerintah desa memegang partisipasi paling penting dan berdampak besar, terlebih dalam usaha membangun iklim yang mampu mendorong swadaya warga desa, pelaksanaan dilakukan dengan adanya pesan-pesan pembangunan, memberi arahan pada warga agar berperan di proses pengembangan serta penyampaian kritik saran warga. Peran aktif warga desa dibuktikan oleh adanya arahan maupun pemanfaatan sumber daya maupun keuangan yang telah ada guna meningkatkan pembangunan pada daerah desa yang tercapainya pembangunan nanti, belum tentu dipengaruhi oleh adanya pemasok biaya serta manajemen keuangan, akan tetapi didominasi dengan partisipasi juga tanggapan warga atas pembangunan atau bisa disebut peranan aktif warga dalam hal tersebut dapat dianggap menjadi partisipasi masyarakat. Tercapainya keberhasilan peranan aktif Pencapaian keberhasilan pada peningkatan daerah memerlukan pemimpin yang memiliki kecakapan dan wibawa yang sejalan dengan (Susetawan et al., 2018).

2. Metode

Penelitian yang dilakukan di sebuah desa yakni desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten kepulauan Talaud. Objek pada penelitian yakni badan pemerintah yang ada di desa terutama bagian keuangan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sebuah wadah yang mewakili warga serta mengawasi sistem kerja yang ada di pemerintah desa. Lamanya waktu yang dipergunakan pada penelitian yakni satu (1) bulau yaitu pada bulan April tahun 2023. Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Dengan sumber data yaitu data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang berasal dari laporan, buku, dokumentasi dan lainnya. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu (1) pengumpulan data, (2) penyajian data, (3) reduksi data, (4) kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Desa Daran merupakan salah satu dari lima desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulutan dengan luas wilayah 980 ha. Desa daran awalnya hanya berdiri satu desa induk yaitu desa Daran. Dikarenakan pada tahun 2002 terjadilah pemekaran kecamatan dan desa Daran dibagi dua yaitu Desa Daran dan Desa Daran Utara. Keadaan ekonomi masyarakat desa Daran bergantung pada hasil pertanian. Hampir 75% masyarakat desa Daran merupakan petani kelapa, pala dan cengkik. Harga komoditas pertanian ini sangat fariatif sesuai dengan

harga pasar. Akibat harga pasar sering naik turun pendapatan masyarakat pun menurun dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa Daran.

Desa Daran memiliki jumlah keseluruhan penduduk adalah sebanyak 474 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 246 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 228 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 153 KK yang tersebar ditiga dusun. Dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran 2022-2023 di Desa Daran, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat beberapa langkah strategis yang diambil untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjelasan ini akan menguraikan berbagai tahap perencanaan yang dilakukan, mulai dari penyusunan anggaran hingga implementasi dan evaluasi. Ada 4 perencanaan sebagai kebijakan penggunaan dana desa Penyusunan Anggaran, Rencana Kerja Pengelolaan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa.

Dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran 2022-2023 di Desa Daran, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dilakukan beberapa langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan ini mencakup empat tahapan utama: penyusunan anggaran, rencana kerja pengelolaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penggunaan Dana Desa. Ada 6 langkah dalam perencanaan penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2021 No. 104, yaitu musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah, penetapan dan pengesahan APBDes, pelaksanaan dan pengelolaan dana, monitoring dan evaluasi, serta transparansi dan partisipasi publik. Kami mengikuti Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021.

Tabel 1. APBDes Desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2022-2023

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023
1	Pendapatan Transfer	Rp 1.010.523.000,00	Rp 1.114.484.586,00
2	Dana Desa	Rp 636.990.000,00	Rp 683.682.000,00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 24.728.000,00	Rp 21.339.400,00
4	Alokasi Dana Desa	Rp 348.805.000,00	Rp 379.463.186,00
5	Bantuan Keuangan Provinsi	-	Rp 30.000.000,00
6	Bunga Bank	-	Rp 1.000.000,00
Total		Rp 1.010.523.000,00	Rp 1.115.484.586,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa total pendapatan transfer Desa Daran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.010.523.000,00, dengan sumber pendapatan terbesar berasal dari Dana Desa sebesar Rp 636.990.000,00. Pada tahun 2023, total pendapatan transfer naik menjadi Rp 1.114.484.586,00, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari Dana Desa sebesar Rp 683.682.000,00. Dana ini digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur di desa, seperti pembangunan jalan desa, rumah budaya, dan parit.

Tabel 2. APBDes Desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022-2023 (Belanja)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 405.323.674,00	Rp 395.978.015,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	Rp 408.990.000,00
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 181.032.000,00	Rp 65.000.000,00
4	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 328.555.500,00	Rp 144.000.000,00
Total		Rp 1.119.311.174,00	Rp 1.013.968.015,00

Pada tahun 2022, belanja desa mencapai Rp 1.119.311.174,00 dengan pengeluaran terbesar di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 405.323.674,00. Sementara itu, pada tahun 2023, belanja desa turun menjadi Rp 1.013.968.015,00, dengan pengeluaran terbesar pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 408.990.000,00.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Proses perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021. Enam tahapan utama yang melibatkan musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah, hingga transparansi dan partisipasi publik, diikuti secara sistematis oleh pemerintah desa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari berbagai informan yang menekankan keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
- b. Terdapat peningkatan total pendapatan transfer dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, total pendapatan mencapai Rp 1.010.523.000,00, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 1.114.484.586,00. Sumber pendapatan terbesar berasal dari Dana Desa, yang pada 2022 sebesar Rp 636.990.000,00 dan naik menjadi Rp 683.682.000,00 pada tahun 2023. Dana ini digunakan untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur desa.
- c. Pengeluaran desa mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2022, belanja terbesar berada di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sementara pada 2023, pengeluaran terbesar dialokasikan untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan total Rp 408.990.000,00. Hal ini menunjukkan pergeseran prioritas dari kegiatan pemerintahan menuju pembangunan fisik desa.
- d. Proses perencanaan dan pelaksanaan dinilai efektif oleh para informan. Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan melaksanakan kebijakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Transparansi dan partisipasi publik menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana.

Saran

- a. Masyarakat harus terus meningkatkan partisipasi aktif dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung, memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Dengan hal ini bahwa secara signifikan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan kehendak bersama.
- b. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Dengan memantau secara transparan, masyarakat dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama.

Daftar Pustaka

- Aisyahrani, A. (2024). Peran Kewirausahaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 18–26. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.336>
- Hadara, A., & Batia, L. (2023). Sejarah Desa Buton Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali (1995-2020). 8(2).
- Hanasi, R. A., Bumulo, S., & Mobilingo, R. (2024). Persepsi Masyarakat Terkait Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Monggolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. 1 (2).
- Hasjimzoem, Y. (2015). DINAMIKA HUKUM PEMERINTAHAN DESA. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>

- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Masitoh, S. (2021). Analisis pengelolaan anggaran dana desa (Studi di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Bogor).
- Mintje, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2022). ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH KAUR KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA).
- Salindeho, M. M., Kalangi, L., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17420>
- Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2019). PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. *Journal Publicuho*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7461>
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2021). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung). *Jurnal RASI*, 1(2), 61–69. <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i2.38>
- Wibawanti, S. S. (2015). PENGALOKASIAN DANA DESA.

PENGARUH SEKTOR PERTANIAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SULAWESI UTARA

Anissa Bilqis Cahyani¹, Rahel W. Kimbal², Merry C.N Rumagit³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado
e-mail: cahyanianisabilqis@gmail.com, rahelwkimbal@unima.ac.id, merryrumagit@unima.ac.id

Abstrak

Menurut Sebagai akibat dari pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara mengalami fluktuasi dari tahun 2019 hingga 2023, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -0,99% pada tahun 2020. Selain itu, dalam hal pertanian pangan dan hortikultura, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan sektor ini saling memengaruhi, seperti yang ditunjukkan oleh kontribusinya terhadap PDRB, penciptaan lapangan pekerjaan, dan struktur rantai pasokan ekonomi. Secara keseluruhan, sektor pertanian pangan dan hortikultura memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan bisnis. Tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1) Mengkaji Pengaruh Sektor Pertanian dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara; Mengkaji Pengaruh Sektor Hortikultura dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara; dan Mengkaji Pengaruh Sektor Hortikultura dan Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara secara bersamaan. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut dari tahun 2019 hingga 2023 digunakan untuk penelitian kuantitatif ini. Dia mengumpulkan data melalui kepustakaan dan informasi. Sektor pertanian pangan (X1), sektor pertanian hortikultura (X2), dan pertumbuhan ekonomi (X3). Untuk data panel, analisis regresi digunakan. Penelitian ini menggunakan model pengaruh tetap. Hasilnya menunjukkan bahwa pertanian dan hortikultura memengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara secara parsial dan signifikan, serta secara bersamaan secara signifikan.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Pertanian Pangan, Sektor Pertanian Hortikultura

Abstract

Following a -0.99% economic contraction in 2020 due to the COVID-19 pandemic, North Sulawesi Province's economic growth has varied from 2019 to 2023, according to data from the Central Agency of Statistics (BPS). Furthermore, as evidenced by its contribution to GDP, employment creation, and the composition of the economic supply chain, horticulture and food crop agriculture have a mutually reinforcing relationship with economic growth. All things considered, the horticultural and food crop agriculture industries contribute significantly to economic expansion. 1) To examine the impact of the food crop agriculture sector on North Sulawesi's economic growth is one of the study's goals. 2) To examine how North Sulawesi's economic growth is impacted by the horticultural agriculture sector. 3) To examine how North Sulawesi's economic growth is impacted by the concurrent horticultural and food crop agriculture sectors. The North Sulawesi Central Agency of Statistics (BPS) provided secondary data for this quantitative study between 2019 and 2023. Documentation and literature are the methods used to obtain data. Economic growth (X3), the horticulture agriculture sector (X2), and the food crop agricultural sector (X1). Panel data regression analysis is the analysis technique employed. The Fixed Effect Model is the model used in this investigation. The findings demonstrated that the horticultural and food agricultural industries both concurrently had a major impact on North Sulawesi Province's economic growth and that they both had a favorable and significant impact.

Keywords: Economic Growth, Food Crop Agriculture Sector, Horticulture Agriculture

1. Pendahuluan

Alat yang penting untuk menilai keadaan suatu negara atau wilayah adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut Todaro dkk. (2020), pertumbuhan kapasitas produksi ekonomi yang disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan nasional dikenal sebagai pertumbuhan bisnis. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, teknologi, dan kebijakan pemerintah adalah beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ini (Mankiw, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara telah menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung positif. Berdasarkan data dari BPS Sulut (2023), Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara mencapai 6,01% pada tahun 2018,

kemudian mengalami penurunan menjadi 5,65% pada 2019. Pandemi COVID-19 membuat 2020 menjadi tahun yang sulit yang menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -0,99%. Namun, pada tahun 2021, perekonomian pulih dengan pertumbuhan di angka 4,16 dan terus meningkat menjadi 5,42% di tahun 2022 hingga pada tahun 2023 menjadi 5,48%.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara mengalami pertumbuhan yang bervariasi dari tahun 2019 hingga 2023. PDRB Sulawesi Utara tumbuh sebesar 3,22% pada periode terbaru, menunjukkan pemulihan ekonomi yang cukup baik. Ada fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhan PDRB, dengan nilai terendah -1,42% pada tahun 2020 dan nilai tertinggi 3,22% pada tahun 2023. Pada satu periode, terjadi kontraksi ekonomi, ditandai dengan pertumbuhan negatif sebesar -1,42% yang disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 yang mempengaruhi perekonomian global. Setelah mengalami kontraksi, terlihat pemulihan ekonomi yang lebih baik (BPS Sulut, 2023).

Tidak dapat diabaikan betapa pentingnya Pertanian bagi ekonomi Indonesia, terutama di Provinsi Sulawesi Utara. Kementan RI (2020) menyatakan bahwa Sektor Pertanian memainkan pengaruh penting dalam menjaga ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan menghasilkan devisa melalui ekspor. Selain itu, Sektor Pertanian terkait erat dengan sektor lain dalam ekonomi Sulawesi Utara, seperti Industri Pengolahan dan Pariwisata, sehingga memiliki efek multiplier yang signifikan terhadap perekonomian lokal (DPKP Sulut, 2022).

Ekonomi Sulawesi Utara sangat bergantung pada Sektor Pertanian. Menurut BPS Sulut (2023) sektor ini berkontribusi 20,45% terhadap PDRB Provinsi di tahun 2022, menjadikannya salah satu pilar ekonomi Provinsi. Sektor Pertanian tidak hanya bertanggung jawab atas penyediaan makanan, tetapi juga merupakan sumber penghasilan bagi sebagian besar orang yang tinggal di perdesaan dan memainkan pengaruh penting dalam kontribusi ekspor daerah.

Sulawesi Utara memiliki sumber daya alam yang luar biasa yang tersedia untuk digunakan untuk mengembangkan Sektor Pertanian Pangan dan Hortikultura. Dengan luas Baku Sawah (LBS) sekitar 47.000 hektar, luas panen padi Sulawesi Utara mencapai 58.000 hektar, iklim yang mendukung dan kesuburan tanah yang tinggi, Provinsi ini memiliki keunggulan yang luar biasa dalam produksi berbagai komoditas Pertanian menurut data dari BPS Sulut (2022). Dengan beragamnya topografi dari dataran rendah hingga pegunungan, diversifikasi produk Pertanian dapat dicapai (BPTP Sulut, 2021).

Data dari DPKP Sulut (2023) menunjukkan bahwa sub Sektor Pertanian Pangan dan Hortikultura di Sulawesi Utara memiliki beberapa komoditas unggulan, terutama tanaman pangan seperti jagung, ubi kayu, dan padi. Sementara itu, sub sektor Hortikultura diungguli oleh produksi sayuran seperti bawang merah, cabai dan tomat. Menurut BPS Sulut (2023), tanaman perkebunan seperti vanili, pala dan cengkeh juga menjadi andalan ekspor Provinsi ini.

Untuk sub sektor pangan dan Hortikultura, data BPS menunjukkan tren produksi yang fluktuatif dari tahun 2019 hingga 2023. Persentase tanaman pangan menunjukkan penurunan dari 2019 hingga 2023. Penurunan paling signifikan terjadi antara 2019 dan 2020, turun dari 14,79% menjadi 13,65% (turun 1,14%). Kemudian penurunan berlanjut hingga 2021, tetapi kembali turun pada tahun 2023. Total penurunan dari 2019 hingga 2023 adalah 2,72%. Berbeda dengan tanaman hortikultura, dari tahun 2019 hingga 2023, tren peningkatan yang konsisten. Antara data tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi peningkatan yang paling signifikan, naik dari 12,24% menjadi 13,01% (naik 0,77%). Setelah itu, peningkatan terus berlanjut dengan laju yang lebih lambat. Peningkatan total dari 2019 hingga 2023 adalah 1,35% (BPS Sulut, 2023).

Data BPS Sulut (2023) menunjukkan peningkatan produksi padi dari 685.812 ton pada tahun 2018 menjadi 724.963 ton pada tahun 2022. Sementara itu, produksi jagung mengalami fluktuasi, dengan puncak produksi mencapai 1.821.550 ton pada tahun 2020, tetapi sedikit menurun menjadi 1.785.324 ton pada tahun 2022. Kemudian pada sub sektor Hortikultura pada produksi buah-buahan seperti pisang menunjukkan tren positif, mengalami peningkatan dari 64.189 ton pada tahun 2018 menjadi 78.543 ton pada tahun 2022 (BPS Sulut, 2023).

Penelitian tentang Dampak Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara karena beberapa alasan menjadi sangat

penting. Pertama, Bappeda (2021) melaporkan bahwa penyerapan tenaga kerja dan PDRB Provinsi Sulawesi Utara sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian. Kedua, Kementan RI (2021) menyatakan bahwa ada potensi pengembangan yang besar di sektor ini, terutama dalam hal ketahanan pangan dan diversifikasi ekspor. Ketiga BMKG (2022) menyatakan bahwa Sektor Pertanian menghadapi sejumlah masalah, termasuk alih fungsi lahan, perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas yang memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi yang tepat dan yang keempat, pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh sektor ini yang dapat membantu dalam pembuatan kebijakan untuk mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Utara (World Bank, 2021).

Dalam penelitian ini, dapat dilihat fenomena menarik tentang bagaimana pergeseran kontribusi kedua sub sektor pertanian ini mempengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Berdasarkan dinamika tersebut, maka hal ini dapat dijadikan sebagai sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Sektor Pertanian Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara”.

2. Tinjauan Teoritis

Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi suatu negara dinilai melalui metrik penting, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi, yang ditandai dengan kenaikan output nasional yang stabil selama periode waktu yang lama, merupakan peningkatan kapasitas suatu negara dalam memasok barang-barang ekonomi kepada rakyatnya (Sukirno, 2019). Peningkatan output nasional, yang biasanya diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), menunjukkan bahwa suatu negara mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan masyarakatnya dengan lebih baik. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam jangka panjang menunjukkan stabilitas dan kesehatan ekonomi, yang penting untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk investasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi suatu negara.

Sektor Pertanian

Ekonomi dan kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sektor pertanian. Menurut Susilowati et al. (2020), sektor pertanian adalah bagian dari ekonomi yang mencakup semua aktivitas yang mencakup tanaman, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil pertanian. Sektor pertanian adalah komponen penting dari perekonomian karena mencakup banyak kegiatan yang saling berhubungan. Dianggap sebagai salah satu bagian penting dari sistem ekonomi suatu negara, sektor pertanian memainkan peran penting dalam mendukung perekonomian secara keseluruhan, baik dalam hal meningkatkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja. Sektor ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian mencakup semua usaha yang berkaitan dengan produksi pangan, serat dan bahan baku dari sumber daya alam terbarukan. Sektor pertanian merupakan bagian penting dari perekonomian, yang mencakup berbagai jenis produksi yang bergantung pada sumber daya alam terbarukan (Prabowo et al, 2021).

Sektor Pertanian Pangan

Sektor pertanian pangan adalah bagian dari sektor pertanian yang khusus berfokus pada produksi, pengolahan, dan distribusi produk makanan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Sektor ini mencakup berbagai kegiatan mulai dari budidaya tanaman, peternakan, hingga pengolahan dan pemasaran produk makanan.

Sektor Pertanian Hortikultura

Pertanian hortikultura adalah bagian dari pertanian yang mengkhususkan diri pada budidaya rempah-rempah, sayuran, buah-buahan, dan tanaman hias. Pertanian hortikultura

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap gizi masyarakat, produksi makanan segar, dan peluang ekonomi petani.

3. Metode

Data dan Sumber Data

Penelitian semacam ini bersifat kuantitatif karena pola hubungannya, dan data yang diberikan dalam bentuk angka disebut sebagai data sekunder. Data sekunder didefinisikan oleh Siyoto dan Sodik (2019) dalam bukunya “Dasar-dasar Metodologi Penelitian” sebagai data yang dikumpulkan atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Produk Domestik Regional Bruto, Produksi Tanaman Pangan, dan Produksi Tanaman Hortikultura dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara adalah data sekunder yang digunakan dalam hal ini dari tahun 2019 hingga 2023.

Metodologi Penelitian

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

- Metode Penelitian Perpustakaan: membaca banyak buku dan jurnal yang membahas subjek untuk mengumpulkan data.
- Studi Dokumentasi: Dalam buku Sugiyono (2021), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D adalah metode pengumpulan data yang melibatkan analisis dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik. Seperti yang menyatakan oleh Hardani et al (2023), dokumen resmi yang dapat digunakan dalam studi dokumentasi termasuk dokumen statistik pemerintah, dokumen administratif dan publikasi resmi. Produk Domestik Regional Bruto (2019–2023), Produksi Tanaman Pangan (2019–2023), dan Produksi Tanaman Hortikultura (2019–2023) adalah semua Provinsi yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.
- Hardani dkk. (2023) mengidentifikasi lima jenis variabel berdasarkan hubungan antar variabel, dua di antaranya yang penting ada dua variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen, yang diwakili oleh X, mempengaruhi variabel lain dan menyebabkan perubahan. Sebaliknya, variabel dependen, yang diwakili oleh Y, mempengaruhi variabel lain dan menyebabkan perubahan. diwakili oleh Y, dipengaruhi oleh variabel lain dan menyebabkan perubahan.

Variabel dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- Variabel Independen
Sektor Pertanian Pangan dan Hortikultura adalah variabel independen studi yang berdampak pada variabel dependen. Dengan desain penelitian:
X1 : Sektor Pertanian Pangan
X2 : Sektor Pertanian Hortikultura
- Variabel Dependen
Fokus utama penelitian peneliti adalah variabel dependen yang berbeda yang digunakan dalam model, mudah untuk mengetahui sifat masalah. Pertumbuhan Ekonomi (Y) adalah variabel dependen dalam penelitian ini. Pengambilan keputusan dapat membuat kebijakan dengan lebih cepat berdasarkan data yang lebih rinci dan detail.

Metode Analisis

Menurut Gujarati et al. (2021), analisis regresi data panel menggabungkan data cross-section (lintas sektoral) dan deret waktu (series waktu). Unit cross-section yang sama diukur selama periode yang berbeda memberikan keuntungan dalam hal efisiensi, keberagaman, serta memiliki tingkat kolinearitas antar variabel yang lebih rendah (Gujarati dan Porter, 2021).

Untuk menemukan Pengaruh Sektor Pertanian Pangan dan Hortikultura terhadap Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara, penelitian ini menggunakan model analisis regresi data panel Eviews 12.

Tingkat signifikan dari koefisien regresi variabel bebas masing-masing dihitung dengan cara ini :

- a. Model *Common Effect (Pooled Least Square)*

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

- b. Model *Fixed Effect*

$$Y_{it} = \alpha_i + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon_{it}$$

- c. Model *Random Effect*

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + (\varepsilon_{it} + \mu_i)$$

Dimana:

Y_{it} = Pertumbuhan Ekonomi (%)

X_{1it} = Sektor Pertanian Pangan (%)

X_{2it} = Sektor Pertanian Hortikultura (%)

α = Konstanta

α_i = Efek individu berbeda untuk setiap orang kabupaten/kota

β_1, β_2 = Koefisien regresi

ε_{it} = *error*

term μ_i = Komponen *error cross-section*

4. Hasil dan Pembahasan

Model Regresi Data Panel

Penelitian ini akan menggunakan model data panel untuk mengintegrasikan data *cross-section* (lintas-seksi) dan deret waktu dari berbagai entitas. Sebuah model data panel akan digunakan untuk menganalisis pengaruh sektor pertanian pangan dan hortikultura terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara pada periode 2019-2023. Menurut temuan penelitian Chow dan Hausman, model efek tetap (FEM) adalah model yang dipilih untuk analisis regresi data panel.

Tabel 1. Model Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/22/24 Time: 01:38				
Sample: 2019 2023				
Periods included: 5				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 80				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.10519	8.910850	-1.358477	0.1792
X1	253.4088	116.6557	2.172280	0.0337
X2	3.140979	1.393143	2.254598	0.0277
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	6.928846	R-squared	0.823741	
Mean dependent var	8.135000	Adjusted R-squared	0.775412	
S.D. dependent var	16.60798	S.E. of regression	7.870641	
Akaike info criterion	7.159264	Sum squared resid	3840.713	
Schwarz criterion	7.695220	Log likelihood	-268.3705	
Hannan-Quinn criter.	7.374144	F-statistic	17.04441	
Durbin-Watson stat	2.766722	Prob(F-statistic)	0.000000	

Sumber: Eviews 12, 2024

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Dalam model regresi, hubungan kuat antara dua atau lebih variabel independen diidentifikasi melalui uji multikolinearitas. Korelasi tinggi antar variabel ini dapat mengakibatkan masalah signifikan dalam analisis regresi, seperti instabilitas koefisien dan kesulitan interpretasi hasil.

Namun, jika model regresi lolos dari uji multikolinearitas ini berarti bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel independen. Pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen sangat jelas ketika variabel independen tidak berkorelasi. Uji multikolinearitas yang berhasil menunjukkan bahwa setiap variabel independen melakukan hal yang berbeda untuk menjelaskan variabilitas variabel independen. Ini memungkinkan analisis lebih mendalam tentang komponen yang mempengaruhi hasil.

Tabel 2. Uji Multikolinearitas
X1 X2

X1	1.000000	0.077699
X2	0.077699	1.000000

Sumber: Eviews 12, 2024

Koefisien korelasi X1 dan X2 sebesar 0.077699 kurang dari 0,10, seperti yang tercantum dalam tabel di atas. Karena variabel independen tidak memiliki korelasi yang signifikan, model regresi data panel ini dianggap lolos uji multikolinearitas. Hasilnya menunjukkan bahwa model ini tidak memiliki masalah multikolinearitas yang perlu dikhawatirkan.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam analisis regresi, homoskedastisitas di mana varians residual diasumsikan konstan pada setiap tingkat variabel independen merupakan salah satu asumsi fundamental. Untuk mendeteksi apakah varians residual atau galat dalam model regresi tidak konstan di seluruh nilai variabel independen, digunakan uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terdeteksi ketika varians tersebut mengalami perubahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai $p > 0,05$, yang menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk membantah hipotesis nol, yang menunjukkan bahwa model tidak memiliki heteroskedastisitas. Dengan kata lain, varians residual dianggap sama sepanjang jangkauan nilai variabel independen. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan kebenaran gagasan homoskedastisitas. Ini adalah syarat penting dalam analisis regresi karena memastikan bahwa model dapat diandalkan dan hasilnya valid. Namun, adanya heteroskedastisitas dapat memengaruhi keakuratan dan keandalan model jika nilai $p < 0,05$.

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)

Method: Panel Least Squares

Date: 10/19/24 Time: 11:46

Sample: 2019 2023

Periods included: 5

Cross-sections included: 16

Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.092612	4.467957	-0.468360	0.6412
X1	76.23604	58.49189	1.303361	0.1973
X2	-0.473966	0.698531	-0.678518	0.5000

Sumber: Eviews, 2024

Dari tabel di atas, koefisien korelasi X_1 dan X_2 memiliki nilai probabilitas lebih dari 0,05. sehingga H_0 diterima, yang menunjukkan bahwa model tidak menunjukkan masalah heteroskedastisitas; oleh karena itu, karena memenuhi asumsi homoskedastisitas, model dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk menilai kualitas model regresi, uji koefisien determinasi, atau R^2 , adalah ukuran statistik yang menunjukkan Nilai R^2 , yang berkisar antara 0 dan 1, menunjukkan seberapa baik model regresi linier menjelaskan variabel dependen. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data.

Tabel 4. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.823741
Adjusted R-squared	0.775412

Sumber: Eviews 12, 2024

Dari tabel di atas, terlihat bahwa nilai $R^2 = 0,823741$, atau 82,37% dari variasi variabel dependen (Y). Variabel independen (X_1 dan X_2) mempengaruhi 17,63% dari variasi variabel dependen, sedangkan variabel lain di luar model mempengaruhi sisa 17,63%.

Uji Hipotesis

Uji t (parsial)

Dalam model regresi linier, signifikansi koefisien regresi diukur menggunakan uji t, yang juga dikenal sebagai uji parsial. Dengan mempertimbangkan variabel lain uji ini menentukan apakah variabel independen tertentu memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen dalam model. Nilai t untuk setiap koefisien regresi dihitung dan dibandingkan dengan nilai kritis distribusi t dalam uji t. Koefisien regresi dianggap signifikan secara statistik jika nilai p yang terkait dengan uji t $p < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa variabel independen tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model.

Tabel 5. Uji t (parsial)

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 10/19/24 Time: 11:54
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 16
Total panel (balanced) observations: 80

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-12.10519	8.910850	-1.358477	0.1792
X_1	253.4088	116.6557	2.172280	0.0337
X_2	3.140979	1.393143	2.254598	0.0277

Sumber: Eviews 12, 2024

Tabel di atas menunjukkan hasil uji parsial yang menunjukkan bahwa sektor pertanian pangan (X_1) memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. dengan koefisien 253.4088 dan nilai $p < 0,05$, yaitu 0.0337. Sektor hortikultura (X_2) juga menunjukkan kontribusi positif, dengan koefisien 3.140979 dan nilai $p < 0,05$, yaitu 0.0277. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dan produktivitas telah meningkat di kedua sektor tersebut dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Uji F (simultan)

Uji F, juga dikenal sebagai uji F simultan, menentukan signifikansi keseluruhan dari model regresi linier dengan menentukan apakah semua koefisien regresi dari masing-masing variabel independen berdampak signifikan pada variabel dependen secara bersamaan. Nilai F dihitung dengan membandingkan varians model yang dijelaskan dengan varians yang tidak dijelaskan. Jika nilai p yang terkait dengan uji F $< 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa setidaknya satu variabel independen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model, model regresi dianggap valid dan dapat digunakan.

Tabel 6. Uji F (simultan)

R-squared	0.823741
Adjusted R-squared	0.775412
S.E. of regression	7.870641
Sum squared resid	3840.713
	-
Log likelihood	268.3705
F-statistic	17.04441
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Eviews 12, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa hasil uji simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama, sektor pertanian pangan dan hortikultura berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai F-statistik 17.04441 dan $p < 0,05$ yaitu 0.0000. Ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut tidak hanya berfungsi secara individual, tetapi juga saling mendukung untuk pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Dengan kontribusi yang signifikan ini, pertanian pangan dan hortikultura dapat dianggap sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi Sulawesi Utara.

a. Pengaruh Sektor Pertanian Pangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara

Berdasarkan analisis hasil pengujian, telah diketahui bahwa variabel sektor pertanian pangan (X1) memiliki dampak positif secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Syaloom Syenny Pelengkahu, Paulus Kindangen, dan Een Novritha Walewangko (2021) dengan judul "Analisis Pengaruh Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara" konsisten dengan temuan ini. Penelitian Findriani Lumikis, Celcius Talumungan, dan Sherly Gladys Jocom (2021) yang berjudul "Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara" dan Renaldo V. Massie, Tinneke E.M Sumual, dan Alzefin Y.R.M Sinolungan (2022) juga menunjukkan perubahan.

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian pangan menjadi penggerak penting dalam ekonomi daerah. Kontribusi yang besar ini mungkin disebabkan karena sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan bahan pangan pokok yang vital dan memiliki rantai nilai yang panjang dari hulu ke hilir serta berperan dalam ketahanan pangan daerah.

b. Pengaruh Sektor Pertanian Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara

Berdasarkan analisis hasil pengujian, uji t menunjukkan bahwa variabel sektor hortikultura pertanian (X2) berdampak positif secara parsial pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini sesuai dengan temuan dari penelitian Findriani Lumikis, Celcius Talumungan, dan Sherly Gladys Jocom (2021) yang berjudul "Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara".

Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian hortikultura berkontribusi positif dilihat pada nilai ekonomi produk hortikultura relatif tinggi dan ada peluang ekspor yang besar serta peluang untuk mengembangkan agroindustri.

c. Pengaruh Sektor Pertanian Pangan dan Hortikultura Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara

Berdasarkan analisis hasil pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa variabel dari sektor pertanian tanaman pangan (X1) dan hortikultura (X2) memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara bersamaan. Menurut hasil penelitian Findriani Lumikis, Celcius Talumingan, dan Sherly Gladys Jocom pada tahun 2021 yang berjudul "Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara", variabel sektor pertanian tanaman pangan (X1)

Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian sangat valid secara statistik. Kedua sektor ini berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Sektor pertanian pangan secara parsial berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan dan keberhasilan di sektor pertanian pangan dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi, seperti kenaikan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan usaha lokal. Secara keseluruhan, sektor ini memainkan peran krusial dalam mendorong kemajuan ekonomi di provinsi tersebut.
- b. Sektor pertanian hortikultura secara parsial memiliki efek yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dan pengembangan tanaman hortikultura (seperti tanaman hias dan buah-buahan) telah meningkat dapat memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan ekonomi, seperti kenaikan pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan industri terkait. Dengan demikian, sektor hortikultura memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
- c. Sektor pertanian pangan dan hortikultura memiliki efek yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa produksi dan produktivitas telah meningkat di kedua sektor tersebut dapat berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah. Ini menandakan bahwa kedua sektor tersebut tidak hanya berfungsi secara individual, tetapi juga saling mendukung dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara. Dengan kontribusi yang signifikan ini, sektor pertanian pangan dan hortikultura dapat dianggap sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi daerah.

Saran

- a. Bagi Pemerintah Daerah:
 - Meningkatkan investasi di sektor pertanian pangan mengingat kontribusinya yang sangat signifikan
 - Mengembangkan infrastruktur pendukung sektor pertanian dan hortikultura
 - Memberikan bantuan teknis dan pelatihan kepada petani untuk meningkatkan produktivitas
 - Memperkuat sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian
- b. Bagi Pelaku Usaha:
 - Meningkatkan teknologi dan inovasi dalam pengolahan hasil pertanian
 - Mengembangkan kemitraan dengan petani lokal
 - Memperhatikan standar kualitas produk untuk meningkatkan daya saing
 - Mengoptimalkan potensi ekspor produk pertanian dan hortikultura
- c. Bagi Petani:
 - Mengikuti pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas produksi

- Menerapkan teknologi pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas
 - Bergabung dalam kelompok tani untuk memperkuat posisi tawar
 - Memperhatikan diversifikasi produk pertanian
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya:
- Menambah variabel tambahan yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi
 - Memperpanjang periode penelitian untuk hasil yang lebih komprehensif
 - Menggunakan metode analisis alternatif untuk membandingkan hasil
 - Melakukan studi komparatif dengan wilayah lain di Indonesia
- e. Rekomendasi Kebijakan:
- Menyusun roadmap pengembangan sektor pertanian dan hortikultura
 - Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan sektor
 - Membuat regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor pertanian
 - Mengembangkan sistem informasi pertanian yang terintegrasi
- f. Pengembangan Infrastruktur:
- Membangun dan memperbaiki sarana irigasi
 - Mengembangkan fasilitas penyimpanan hasil pertanian
 - Memperbaiki akses transportasi ke sentra pertanian
 - Membangun pusat pengolahan hasil pertanian

Daftar Pustaka

- Mankiw, N. G. (2020). *Principles of Economics* (9th ed.). Cengage Learning.
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2022). Analisis Iklim Provinsi Sulawesi Utara 2022. BMKG.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara 2021-2026. Bappeda Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara (2024). Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2024. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2020). Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2020. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2021). Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2021. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2022). Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2022. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Menurut Lapangan Usaha 2019-2023. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Produksi Buah-buahan Provinsi Sulawesi Utara, 2019-2022. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Produksi Jagung Provinsi Sulawesi Utara, 2019-2022. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Produksi Padi Provinsi Sulawesi Utara, 2019-2022. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka 2023. BPS Provinsi Sulawesi Utara.
- Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sulawesi Utara. (2021). Peta Sumber Daya Lahan Pertanian Sulawesi Utara. BPTP Sulawesi Utara.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara. (2022). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara.
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara. (2023). Statistik Pertanian Tanaman Pangan Sulawesi Utara 2022. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara.
- Gujarati, D.N., & Porter, D.C. (2021). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.

- Hardani, H., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Fardani, R. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2020). Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024. Kementan RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2021). Outlook Komoditas Pertanian Subsektor Tanaman Pangan. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.
- Prabowo, S., & Handayani, D. (2021). Dinamika Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Pertanian dan Agroindustri*, 8(1), 45-58.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2019). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (3th ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Susilowati, L., & Darwis, D. (2020). Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(2), 123-135.
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*. World Bank.

PENGARUH PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2013 – 2022

Andrio Yesaya Mampow¹, Natalia A. Malau², Rahel W. Kimbal³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado
e-mail: andromampow@gmail.com, nataliamalau@unima.ac.id, rahelkimbal@unima.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana tingkat kemiskinan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara tahun 2013 dan 2022. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara. Metode pengukuran kuantitatif digunakan. Metode regresi data panel digunakan untuk mengevaluasi data dari 15 kabupaten/kota, termasuk PDRB, IPM, dan tingkat kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh PDB. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan suatu daerah cenderung menurun ketika produk regional bruto (PDRB) meningkat. Tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hubungan terbalik yang substansial, yang berarti bahwa peningkatan IPM dikaitkan dengan penurunan kemiskinan. Menurut temuan analisis, tingkat kemiskinan Sulawesi Utara menurun selama periode yang dianalisis sebagai akibat dari peningkatan PDB dan IPM.

Kata Kunci: PDRB, IPM, Tingkat Kemiskinan, Sulawesi Utara, Regresi Data Panel

1. Pendahuluan

Satu diantara tanda penting dalam suksesnya pembangunan nasional adalah seberapa cepat pengurangan jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan. "Faktor utama yang menyebabkan kemiskinan adalah minimnya penghasilan dan aset, serta akses yang cukup terhadap layanan kesehatan dan pendidikan." (World Bank, 2004). Garis kemiskinan ekstrem baru sebesar \$2,15 per orang per hari (World Bank, 2022).

Lambatnya penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara selama sepuluh tahun dengan penurunan sebesar 1,22 %, menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Pandemi COVID-19 membawa pengaruh signifikan pada berbagai sektor ekonomi di Sulawesi Utara, yang memperburuk penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Satu diantara penyebab kemiskinan di Sulawesi Utara adalah Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) yang belum mencapai tingkat optimal. Perkembangan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang meningkatkan kemampuan produksi dalam sebuah sistem ekonomi, yang terlihat dari meningkatnya pendapatan nasional tanpa memperhitungkan pertambahan jumlah penduduk dan perubahan dalam struktur ekonomi. (Natalia, dkk. 2022). Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi ini menunjukkan nilai keseluruhan Produk dan layanan yang dihasilkan di sebuah wilayah selama kurun waktu tertentu, yang dimanfaatkan guna mengevaluasi kesehatan dan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) menjadi indikator kunci dalam mengukur kesejahteraan ekonomi suatu wilayah. Provinsi Sulawesi Utara, sebagai bagian dari kerangka pembangunan nasional Indonesia, telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan selama periode 2013 hingga 2021. Namun demikian, kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara masih memiliki Pendapatan Regional Bruto (PDRB) yang belum merata, dan sebagian belum mampu memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan PDB secara maksimal. Selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2022, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai PDRB terendah yaitu sebesar Rp

1,09 triliun pada tahun 2013, sedangkan Kota Manado mempunyai PDRB tertinggi yaitu sebesar Rp 43,92 triliun pada tahun 2022.

Ukuran tenaga kerja mampu berperan sebagai salah satu penyebab yang memiliki peran terhadap munculnya keterbelakangan ekonomi. Kualitas ini menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pentingnya kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang baik dalam upaya mengurangi kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya tentang kurangnya pendapatan, tetapi juga mengakses sumber daya dan kesempatan untuk hidup layak (Amartya Sen, 1999).

Dengan mengutamakan kemajuan di bidang kesejahteraan manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup yang baik, "hipotesis Indeks Pembangunan Manusia menawarkan strategi holistik dan berkelanjutan untuk memerangi kemiskinan" (UNDP, 2019). Menurut Indeks Pembangunan Manusia, kemiskinan mencakup lebih dari sekadar kekurangan uang; kemiskinan juga melibatkan kemungkinan untuk kehidupan yang layak dan akses ke sumber daya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Utara meningkat drastis dari 69,49 pada tahun 2013 menjadi 73,81 pada tahun 2022. Namun, upaya berkelanjutan masih diperlukan untuk menjamin pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Manado memiliki nilai IPM tertinggi pada tahun 2022 (79,66), sedangkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki nilai terendah pada tahun 2013 (62,64).

Hubungan antara PDRB, IPM, dan tingkat kemiskinan saling berkaitan erat dalam mencerminkan kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Jika kebijakan inklusif yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak tidak dilaksanakan bersamaan dengan pertumbuhan PDB, pengurangan kemiskinan mungkin tidak selalu berdampak langsung. Ketika pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan kelompok tertentu, kemiskinan di daerah tetap tinggi, sehingga diperlukan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Pemahaman mendalam tentang keterkaitan ini sangat penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang efektif untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan metodologi penelitian yang berlandaskan pada positivisme, menurut Sugiyono (2015: 14). Untuk memvalidasi hipotesis yang telah ditetapkan, pendekatan ini memerlukan analisis data kuantitatif dan pengumpulan informasi menggunakan instrumen atau kuesioner.

A. Metode Pengumpulan Data

Data dan Sumber Data

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Dokumentasi, yaitu proses pengumpulan data dari pemanfaatan data dari berbagai lembaga. Data yang digunakan dalam penelitian ini disediakan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara yang dirilis dalam format numerik.
- 2) Kajian pustaka dilaksanakan melalui kajian referensi yang terkait dengan topik penelitian dan menganalisis artikel-artikel jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti, untuk meningkatkan wawasan peneliti.

B. Teknik Analisis Data

Dalam kajian ini, peneliti mengorganisir dan menganalisis informasi menggunakan pendekatan yang terstruktur. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk mencapai sasaran penelitian, menggunakan pendekatan analisis kuantitatif yang menerapkan metode regresi.

C. Regresi Data Panel

Model yang meneliti sekelompok entitas yang sebanding (orang, bisnis, negara bagian, negara, dll.) dari waktu ke waktu disebut regresi panel. Dimensi lintas bagian dan deret waktu membentuk data panel.

Model regresi untuk data panel yang diterapkan adalah:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

dimana:

Y_{it} = variabel terikat (*dependent*)

X_{it} = variabel bebas (*independent*)

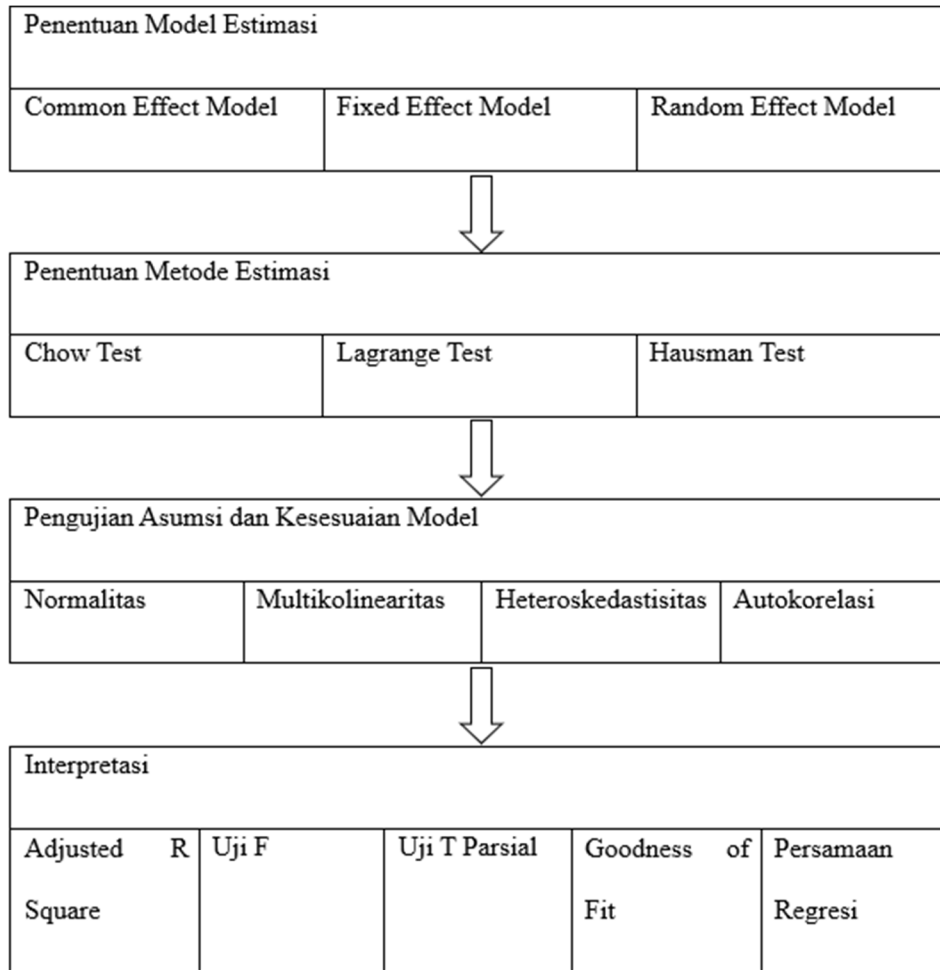
i = entitas ke- i

t = periode ke- t

e = *error term*

Nilai konstanta ($\hat{\alpha}$) dan koefisien regresi ($\hat{\beta}_i$) diharapkan melalui model regresi linier berganda yang mencakup beberapa variabel X dan satu variabel Y yang diintegrasikan dalam rumus ini. Penggunaan data panel dalam analisis regresi akan menghasilkan nilai intersep dan kemiringan yang berbeda untuk setiap entitas dan periode waktu (Napitupulu et al., 2021:116).

Berikut skema tahapan dari regresi data panel:



Sumber: (Napitupulu et. al. 2021:117)

D. Definisi Operasional

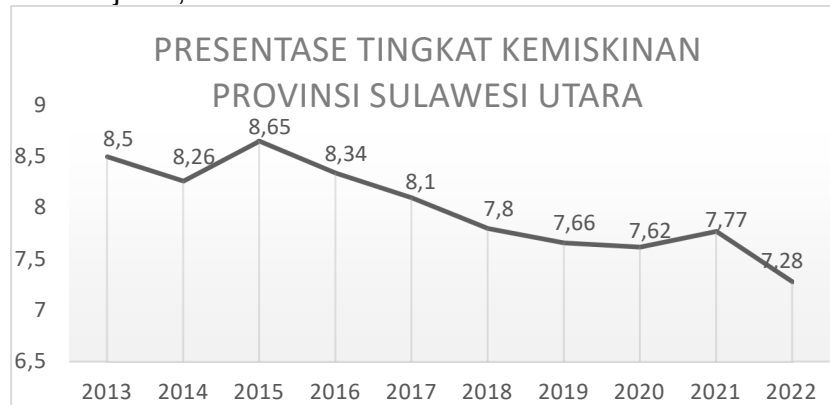
- 1.) Variabel Dependen Kemiskinan - (Y)
Kemiskinan merujuk pada situasi di mana individu tidak dapat memenuhi kebutuhan fundamental yang seharusnya ada, seperti sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013 hingga 2022 dihitung dan ditampilkan sebagai persentase dalam penelitian ini.
- 2.) Variabel Independen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) - (X1)
Nilai tambah total yang dihasilkan oleh semua entitas ekonomi di suatu wilayah, baik berupa barang maupun jasa, disebut sebagai produk domestik regional bruto atau PDB. Berdasarkan harga berlaku, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2013 hingga 2022 dikaji dalam penelitian ini.
- 3.) Variabel Independen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) – (X2)
Tingkat keberhasilan rata-rata dalam tiga aspek utama pembangunan manusia, umur panjang dan sehat, tingkat pengetahuan yang tinggi, dan kualitas hidup yang memadai secara luas dijelaskan oleh Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Kemiskinan di Sulawesi Utara

Kemiskinan adalah isu yang rumit dan multifaset, berkaitan dengan penghasilan yang minim, buta aksara, tingkat kesehatan yang rendah, ketidakselarasan gender, serta kondisi

lingkungan yang tidak baik. Pemerintah berupaya mengatasi kemiskinan melalui pembangunan berkelanjutan, termasuk menentukan batas ukur kemiskinan.



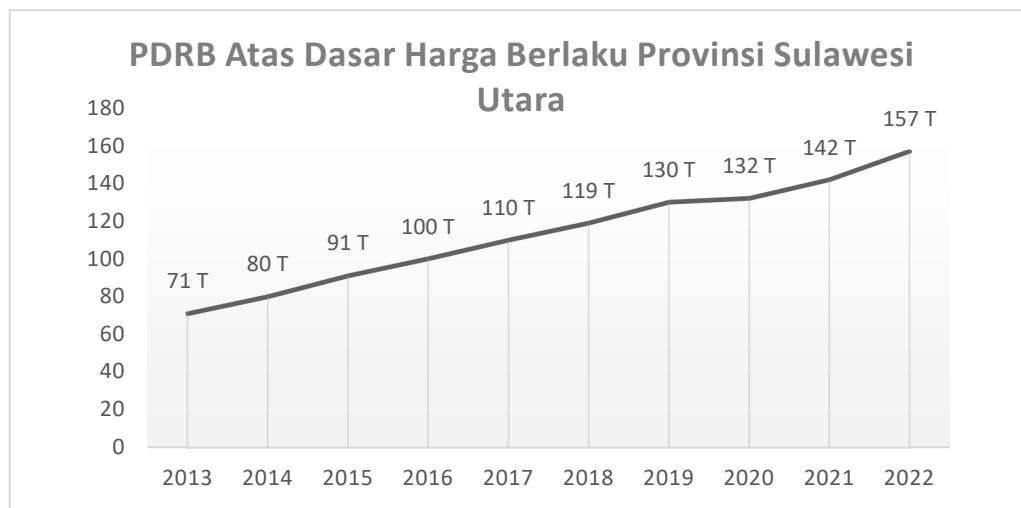
Sumber : BPS Sulawesi Utara, 2023

Gambar 1. Persentase Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara

Akibat dinamika ekonomi dan sosial yang kompleks, angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara menurun dari 8,5% pada tahun 2013 menjadi 185,14 ribu orang atau 7,28% pada tahun 2022. Penurunan ini menunjukkan keberhasilan upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta, dan pihak terkait, termasuk kebijakan pembangunan dan investasi di sektor kunci, serta mitigasi dampak pandemi COVID-19 antara 2020 hingga 2022. Meskipun demikian, penting untuk terus menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan agar penurunan ini tidak bersifat sementara, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan memastikan keberlanjutan upaya pemberdayaan masyarakat.

B. Kondisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Sulawesi Utara

Nilai tambah semua barang dan jasa yang diproduksi oleh berbagai entitas bisnis selama periode waktu tertentu termasuk dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan indikator penting untuk mengevaluasi kondisi ekonomi suatu wilayah.



Sumber : BPS Sulawesi Utara, 2023

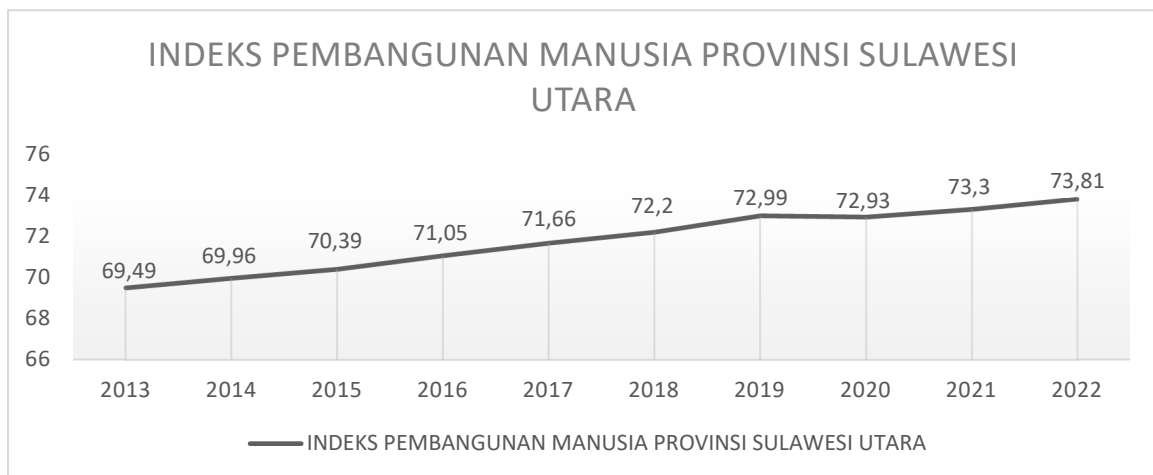
Gambar 2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Utara

Pertumbuhan ekonomi positif pada kurun waktu tersebut ditunjukkan oleh PDRB Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Berlaku yang meningkat dari 71 triliun rupiah pada tahun 2013 menjadi 157 triliun rupiah pada tahun 2022. Sementara kondisi ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19 antara tahun 2020 dan 2022 juga berdampak, strategi pembangunan, investasi sektor industri, dan potensi pertumbuhan ekonomi lokal semuanya

berdampak pada peningkatan ini. Dengan demikian, krusial untuk terus mengawasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi pada perubahan PDRB guna merancang kebijakan yang responsif dan berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.

C. Kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara

Badan Pusat Statistik melaporkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar 75,04 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang pada tahun 2020 masih sebesar 73,67 persen. Kinerja IPM Sulawesi Utara terus mengalami peningkatan dengan tercatat 74,03 persen ditahun 2021 dan 74,52 persen ditahun 2022 Angka IPM Sulawesi Utara ini juga melebihi rata-rata IPM Indonesia, yang hanya mencapai 74,39 persen, menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Utara telah mencapai pencapaian yang baik dalam berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.



Sumber : BPS Sulawesi Utara, 2023

Gambar 3. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Utara

D. Analisis Regresi Data Panel

Pemilihan Model Regresi Data Panel

1) Hasil Uji Chow

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	240.625184	(14,133)	0.0000
Cross-section Chi-square	490.600459	14	0.0000

Berdasarkan hasil uji Chow, nilai probabilitas dengan nilai 0,0000 kurang dari tingkat signifikansi 0,05 (Prob. 0,0000 < 0,05), maka model yang terpilih dalam analisis ini

adalah Fixed Effect Model (FEM)

Keterangan

Nilai prob. = 9.909973548097662e-96

2) Hasil Uji-Hausman

Tabel 2. Hasil Uji Hausman.

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	1.160537	2	0.5597

Uji Hausman menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,5597 lebih besar daripada tingkat signifikansi 0,05 (Prob. 0,5597 > 0,05). z

3) Hasil Uji-Lagrange Multiplier

Tabel 3. Hasil Uji-Lagrane Multiplier.

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects
Null hypotheses: No effects
Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided (all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	604.8106 (0.0000)	4.517559 (0.0335)	609.3282 (0.0000)

Model Efek Acak (REM) dipilih untuk penelitian ini karena, menurut hasil uji Lagrange-Multiplier, nilai probabilitas yang diperoleh, 0,0000, berada di bawah tingkat signifikansi 0,05 (Prob. 0,0000 < 0,05).

Keterangan

Nilai prob. : 5.708993528087162e-25

Tabel 4 Hasil Uji Pemilihan Model.

PENGUJIAN	HASIL	KEPUTUSAN
UJI CHOW	Prob. >0,05	CEM
	Prob. <0,05	FEM
UJI HAUSMAN	Prob. >0,05	REM
	Prob. <0,05	FEM
UJI LAGRANGE MULTIPLIER	Prob. >0,05	CEM
	Prob. <0,05	REM

Berdasarkan hasil UJI CHOW, UJI HAUSMAN dan UJI Lagrane Multiplier maka metode yang terbaik dalam penelitian ini adalah REM.

E. Uji Asumsi Klasik

REM adalah model yang dipilih. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji asumsi tradisional. Multikolinearitas dan heteroskedastisitas termasuk dalam uji asumsi tradisional yang digunakan (Napitupulu et al., 2021:120).

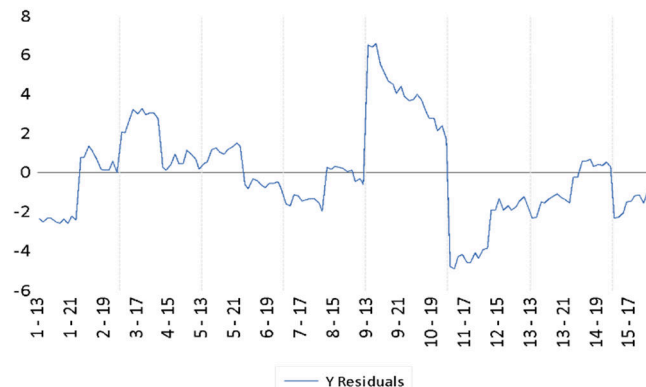
1) Uji Multikolinearitas

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2
X1	1.000000	0.735618
X2	0.735618	1.000000

X1 dan X2 memiliki nilai korelasi sebesar $0,735618 < 0,85$. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian multikolinearitas telah dilakukan secara efektif atau tidak terdapat masalah multikolinearitas. Napitupulu dan rekan-rekannya (2021: 141).

2) Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut grafik residual (berwarna biru), tampak bahwa nilainya tidak melampaui batas (500 dan -500), yang menunjukkan bahwa varians residual adalah konsisten. Dengan demikian, tidak muncul tanda-tanda heteroskedastisitas atau berhasil dalam menjalani uji heteroskedastisitas. (Napitupulu et al., 2021: 143).

F. Persamaan Regresi Data Panel

Persamaan Regresi Data Panel :

$$Y = 41.80 + 0.10 \cdot X1 - 0.48 \cdot X2 + [CX=R]$$

Penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Konstanta 41,80 berarti bahwa, jika variabel PDRB (X1) dan IPM (X2) diabaikan, Tingkat Kemiskinan (Y) diprediksi akan naik sebesar 41,80%.
- 2) Variabel PDRB (X1) memiliki koefisien beta sebesar 0,10, artinya jika semua variabel lainnya tetap sama dan X1 tumbuh sebesar 1%, tingkat kemiskinan (Y) diprediksi akan naik sekitar 10%.
- 3) Variabel Indeks Pembangunan Manusia (X2) memiliki koefisien beta sebesar -0,48. Ini berarti bahwa tingkat kemiskinan (Y) diperkirakan akan turun sebesar 48% jika semua faktor lainnya tetap sama dan variabel X2 naik sebesar 1%.

G. Uji Kelayakan (*Goodness Of Fit*) Regresi Data Panel**1) Pengujian Hipotesis.****a. Uji-t****Tabel 6 Hasil Uji-t**

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 03/26/24 Time: 12:50
 Sample: 2013 2022
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 15
 Total panel (balanced) observations: 150
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41.80162	2.426699	17.22572	0.0000
X1	0.097331	0.019270	5.051037	0.0000
X2	-0.482655	0.034712	-13.90465	0.0000

Setelah dilakukan analisis uji-t variabel PDRB (X1) diperoleh nilai t hitung sebesar 5,051037 > t tabel 1,9762333 dan nilai signifikansi 0,0000 < 0,05 maka hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak.

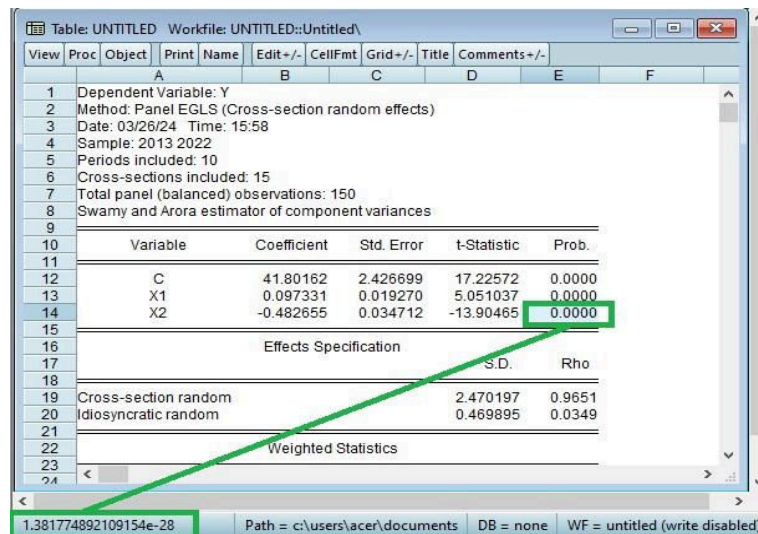
Tabel 7. Keterangan Nilai Probabilitas X1

1	Dependent Variable: Y
2	Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
3	Date: 03/26/24 Time: 15:58
4	Sample: 2013 2022
5	Periods included: 10
6	Cross-sections included: 15
7	Total panel (balanced) observations: 150
8	Swamy and Arora estimator of component variances
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	

Ket : nilai probabilitas sig. x1 = 1.283998654558193e-06

Hasil uji t untuk variabel IPM (X2) menunjukkan nilai signifikan dan nilai t hitung sebesar 13,90465, lebih tinggi dari nilai t tabel sebesar 1,9762333. Hipotesis alternatif (H_a) akan diterima dan hipotesis nol (H_0) akan ditolak jika nilai 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Gambar 11 Keterangan Nilai Probabilitas X2

Tabel 8. Keterangan Nilai Probabilitas X1



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41.80162	2.426699	17.22572	0.0000
X1	0.097331	0.019270	5.051037	0.0000
X2	-0.482655	0.034712	-13.90465	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	2.470197	0.9651
Idiosyncratic random	0.469895	0.0349

Weighted Statistics

1.381774892109154e-28

Ket : nilai probabilitas sig. x2 = 1.381774892109154e-28

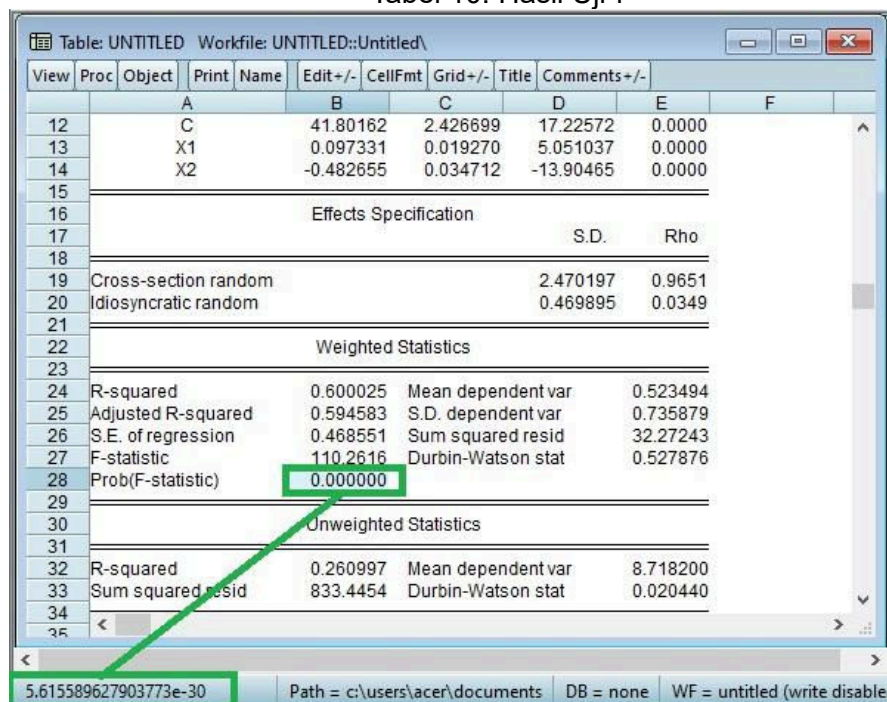
b. Uji-f

Tabel 9. Hasil Uji-f

R-squared	0.600025
Adjusted R-squared	0.594583
S.E. of regression	0.468551
F-statistic	110.2616
Prob(F-statistic)	0.000000

Nilai F hitung sebesar 110.2616 > f table yaitu 3.0576207 dan nilai sig. 0,000000 < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya variable PDRB(X1) dan IPM(X2) berpengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan(Y) di Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 10. Hasil Uji-f



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41.80162	2.426699	17.22572	0.0000
X1	0.097331	0.019270	5.051037	0.0000
X2	-0.482655	0.034712	-13.90465	0.0000

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	2.470197	0.9651
Idiosyncratic random	0.469895	0.0349

Weighted Statistics

R-squared	0.600025	Mean dependent var	0.523494
Adjusted R-squared	0.594583	S.D. dependent var	0.735879
S.E. of regression	0.468551	Sum squared resid	32.27243
F-statistic	110.2616	Durbin-Watson stat	0.527876
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.260997	Mean dependent var	8.718200
Sum squared resid	833.4454	Durbin-Watson stat	0.020440

5.615589627903773e-30

Ket : nilai probabilitas sig. y = 5.615589627903773e-30

2) Uji Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R-squared*)

R-squared	0.600025
Adjusted R-squared	0.594583
S.E. of regression	0.468551
F-statistic	110.2616
Prob(F-statistic)	0.000000

Nilai adjusted R square adalah 0,594583 atau 59%. Koefisien ini menunjukkan bahwa variabel x_1 dan x_2 dapat menjelaskan 59,45% dari variabel y , sementara 40,55% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

H. Pembahasan

1) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dipengaruhi secara signifikan oleh variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk variabel PDRB, hasil uji t menghasilkan nilai t sebesar 5,051037, lebih besar dari nilai t yang ditunjukkan pada tabel sebesar 1,9762333. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, yaitu sebesar 0,0000. Tingkat kemiskinan akan meningkat sebesar 10% untuk setiap pertumbuhan PDRB sebesar 1%, sesuai dengan penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Temuan ini sesuai dengan penelitian Elvira Rosa Laoh, dkk. pada tahun 2023, yang juga menemukan bahwa di Kabupaten Bolaang Mongondow, PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemiskinan. Karena pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB memiliki dampak yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat, penelitian ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan PDRB ketika berupaya mengurangi kemiskinan.

2) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan uji t , nilai t variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 13,90465 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,9762333. Selanjutnya, nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,0000 yang juga lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (H_a) yang menyatakan bahwa setiap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 1% akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 48% diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvira Rosa Laoh dkk. Pada tahun 2023 juga ditemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dan negatif terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini menegaskan betapa pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Angka kemiskinan dapat diturunkan dengan dukungan sumber daya manusia yang baik.

3) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia secara Bersama-sama terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel tingkat kemiskinan (Y) sebesar 59,45% kemungkinan besar disebabkan oleh variabel PDRB (X_1) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (X_2). Sisanya sebesar 40,55% variasi tingkat kemiskinan kemungkinan besar disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam model ini, berdasarkan nilai R kuadrat termodifikasi sebesar 0,59. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Elvira Rosa Laoh dkk. tahun 2023 yang menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

Kajian ini menegaskan pentingnya kedua variabel tersebut dalam memahami dinamika kemiskinan di suatu daerah.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kemiskinan di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara berkorelasi signifikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PDRB. Setiap kenaikan 1% dalam PDRB berkontribusi pada peningkatan sebesar 10% dalam tingkat kemiskinan, sementara setiap kenaikan 1% dalam IPM cenderung mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 48%. Dengan koefisien determinasi (R^2 -kuadrat yang disesuaikan) sebesar 0,59, PDRB dan IPM menyumbang 59,45% variasi tingkat kemiskinan, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi relasional sebesar 40,55%. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang terfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan akses serta distribusi sumber daya secara merata, serta upaya peningkatan IPM sebagai strategi penting dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat Sulawesi Utara.

Saran

Dari hasil penelitian ini, perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan pembangunan manusia (IPM) secara seimbang dan komplementer, melalui peningkatan investasi di sektor-sektor yang mendukung PDRB seperti industri, pertanian, dan pariwisata, serta upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam menanggulangi kemiskinan, diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan pelaku pembangunan di tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara untuk merumuskan dan melaksanakan program-program yang berorientasi pada peningkatan PDRB dan IPM secara simultan. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Disarankan pula untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan mengikutsertakan variabel independen lain yang mungkin berdampak pada derajat kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Aguis, Widarjono. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Eikonisia.
- Ananta, Aris. (1990). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Arndt, H. W. (1987). *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*, terjemahan Konta Damanik, LP3EI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2013. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2014. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2016. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Badan Pusat Statistik. 2022. Berita Resmi Statistik Indonesia. Sulawesi Utara.
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- Bigstein, Annei dalam Gammeil, Norman, dkk dalam Budi Jati, ibid: hal 229-230; Kantor Koordinasi Bidang Perekonomian dan Yayasan Agro Ekonomika, Kajian Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Jakarta, 2002, hal. 1-1.
- Damanik, D., Manik, Y. M., Malau, N. A., Falashifah, F., Nugroho, S. B. M., Widian, I. N. W., ... & Juimiyati, S. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Daryono, Soeibagiyo, M. E. (2017). "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kawasan Sub Suku Kawasan Surakarta, Boyolali,

- Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten Provinsi Jawa Tengah” (*Disertasi Doktorat*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Haq, M. U. I. (1995). *Reflections on Human Development*. Oxford University Press.
- Laoh, E. R., Kalangi, J. B., & Siwui, H. F. D. (2023). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Ekonomisensi*, 23(1), 85-96.
- Leieidy, P. D., & Ormrod, J. E. (2014). *Practical Research: Planning and Design*.
- Leionita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, Pembangunan dan Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQuiANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1-8.
- Martini, D., & Woyanti, N. (2023). Analisis Pengaruh PDRB, IPM, dan Pembangunan terhadap Kemiskinan di 35 Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah (2016-2020). *BISeiCeIR (Business Economic Entrepreneurship)*, 5(2), 23-32.
- Napituipului, Ruinggui Beismandala et al. (2021). *Penelitian Bisnis Teknik dan Analisa Data dengan SPSS – STATA – eviws*. Medan: MADeINATEIRA. Raharjo, Muhamad Mui'iz.
- Okuin, A. M. (1975). *Inequality and Efficiency: The Big Trade-off*. Brookings Institution Press.
- Sapuitra, W. A., & Muidakir, Y. B. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Pembangunan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah (*Disertasi Doktorat*, Universitas Diponegoro).
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Alfred A. Knopf, INC.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Tambunan, T. T. H. (2003). *Perekonomian Indonesia: Beberapa Masalah Penting*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., dan Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia, Edisi Ke-8, Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, M. P., dan Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia*.
- World Bank. (2000). *Global Poverty Report*.
- World Bank Institute. (2005). Introduction to Poverty Analysis: Poverty Manual. World Bank Institute.
- World Bank. (2022). *Fact Sheet: An Adjustment to Global Poverty Line*.
- Zulfikar, S. P., M. Si., Prof. Dr. I. Nyoman Budiantara, M. Si. (2014). *Pendekatan Komputasi Statistika*, diterbitkan oleh CV Budi Utama, Yogyakarta.

Sumber Daring

- BPS Sulawesi Utara, diakses tanggal 16 Maret 2023, pukul 18.00, <https://sulut.bps.go.id>.
- Human Development Index, diakses di <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index>.
- BPS Sulawesi Utara - Indeks Pembangunan Manusia, diakses di <https://sulut.bps.go.id/subjek/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DI KOTA MANADO

Louis C. Sembel¹, Natalia A. Malau², Pradipta M. Parasan³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado

e-mail: louissembel62@gmail.com, nataliamalau@unima.ac.id, pradiptaparasan@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Manado. Selama periode 2008-2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Manado mengalami fluktuasi, dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan sosial. Meski pertumbuhan ekonomi dan IPM menunjukkan peningkatan, TPAK tetap berada di bawah rata-rata Sulawesi Utara. Penelitian ini mengambil Kota Manado sebagai lokasi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data *time series* tahun 2008-2022 dengan menggunakan alat analisis *Ordinary Least Square* (OLS) Eviews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kota manado, Inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Manado, Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Manado

Kata Kunci : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia.

Abstract

This study aims to determine the influence of Economic Growth, Inflation, and the Human Development Index on the Labor Force Participation Rate in Manado City. During the period from 2008 to 2022, the Labor Force Participation Rate in Manado City experienced fluctuations, influenced by economic and social dynamics. Despite increases in economic growth and the Human Development Index, the Labor Force Participation Rate remained below the average for North Sulawesi. This study focuses on Manado City as the research location. The method used in this study is multiple linear regression with time series data from 2008 to 2022, employing the Ordinary Least Square (OLS) analysis tool in Eviews 10. The results of this study indicate that economic growth has a positive and significant impact on the labor force participation rate in Manado City, inflation has a negative and significant impact on the labor force participation rate in Manado City, and the Human Development Index does not have a significant impact on the labor force participation rate in Manado City.

Keywords: Labor Force Participation Rate, Economic Growth, Inflation, Human Development Index.

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi suatu Negara tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya dimana, manusia merupakan tenaga kerja, input pembangunan, dan juga merupakan konsumsi hasil pembangunan itu sendiri (Bonnerri, 2018). Tenaga kerja terampil dengan produktivitas tinggi adalah salah satu kunci penggerak sektor industri potensial untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam perekonomian sebuah negara, tenaga kerja memegang peranan yang sangat penting, tenaga kerja memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat (Nika et al., 2014)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keterlibatan sumber daya manusia dengan pembangunan suatu negara (Anugrawati et al., 2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah, Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan bahwa semakin tinggi

pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian

Pentingnya tingkat partisipasi angkatan kerja terletak pada indikasi keterlibatan ekonomi masyarakat dalam suatu negara atau wilayah. Tingkat partisipasi yang tinggi bisa menunjukkan kesehatan ekonomi yang baik, dengan banyak orang yang aktif berkontribusi pada produksi dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, tingkat partisipasi yang rendah bisa menjadi sinyal peringatan tentang masalah seperti pengangguran yang tinggi, kesenjangan ekonomi, atau bahkan masalah struktural dalam pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja memiliki berbagai faktor yang dapat mempengaruhi seperti Pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional tanpa melihat kenaikan pertumbuhan penduduk dan struktur ekonomi (Natalia dkk, 2022). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam upaya meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), jika pertumbuhan Ekonomi terus mengalami peningkatan maka akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) akan meningkat (Rusalia, 2018).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu Inflasi. Inflasi merupakan indikator perekonomian yang penting, laju pertumbuhannya selalu diupayakan rendah dan stabil agar supaya tidak menimbulkan masalah makro ekonomi yang nantinya akan memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian (Susanto, 2021). Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, sehingga mereka mungkin tidak memiliki cukup uang untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan, termasuk biaya hidup yang meningkat akibat inflasi. Inflasi tinggi dalam suatu perekonomian bisa mengakibatkan perubahan-perubahan output, kesempatan kerja, dan dapat mengakibatkan pengangguran (Warapasari et al., 2020)

Selain Inflasi, faktor lain yang dapat mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Indeks Pembangunan Manusia berfungsi untuk mengukur capaian dari pembangunan manusia yang berdasarkan komponen dasar kualitas hidup yang dapat mempengaruhi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh seseorang (Makhroji, 2019). Indeks Pembangunan Manusia dapat mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi Indeks Pembangunan Manusia, semakin baik tingkat kesehatan, dan pendidikan seseorang, sehingga semakin besar peluang seseorang untuk mencari dan mempertahankan pekerjaan (Aditya et al., 2023).

Di Kota Manado, Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2008-2022. TPAK di Kota Manado menunjukkan fluktuasi.

Tabel 1. Persentase TPAK, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan IPM tahun 2008-2022 di Kota Manado

Tahun	TPAK (%)	Pertumbuhan ekonomi (%)	Inflasi (%)	IPM (%)
2008	64.42	8.77	9.71	77.3
2009	65.76	9.77	2.31	77.8
2010	63.59	7.03	6.28	74.47
2011	66.40	7.80	0.67	75.47
2012	63.02	7.11	6.04	76.15
2013	60.01	7.16	8.12	76.56
2014	56.21	6.69	9.67	77.27
2015	59.21	6.39	5.56	77.32
2016	65.11	7.18	0.35	77.59
2017	59.03	6.74	2.44	78.05
2018	59.60	6.65	3.83	78.41

2019	62.63	6.05	3.52	79.12
2020	58.63	-3.16	-0.18	78.93
2021	59.08	5.15	2.65	79.20
2022	59.51	5.64	4.00	79.66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Manado 2008-2022

Selama periode 2008–2022, TPAK di Kota Manado menunjukkan fluktuasi, dengan angka terbaru sebesar 59,51%, lebih rendah dari rata-rata Provinsi Sulawesi Utara sebesar 63,01%. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami dinamika yang sejalan dengan tren inflasi yang tidak stabil, mencerminkan tantangan dalam menciptakan peluang kerja yang konsisten. Sementara itu, IPM menunjukkan peningkatan secara umum, mengindikasikan perbaikan kualitas hidup, namun belum cukup untuk mendorong peningkatan partisipasi tenaga kerja. Fluktuasi keempat variabel ini saling terkait, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut untuk memahami pengaruhnya terhadap TPAK di Kota Manado.

2. Metode

Metode dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang menekankan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2010) Metode penelitian kuantitatif adalah metode yang pada umumnya menggunakan banyak data

Jenis data yang digunakan adalah data-data sekunder yang diperoleh melalui publikasi data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Manado tahun 2010 sampai dengan 2022 (*Data Time Series*). Menurut Sugiyono (2016:225) Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dan yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Pada penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengolah data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik (BPS) (Larasati, 2020).

a. Variabel Dependen dan Independen

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah variabel dependen penelitian (Y), dan dinyatakan sebagai persentase di Kota Manado yang merupakan penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia adalah variabel independen (X1, X2, dan X3). untuk menentukan apakah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja secara signifikan dipengaruhi oleh faktor-faktor ini.

b. Metode Analisis:

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan alat statistik yaitu program *Eviews* 10 yang berupa metode Regresi Linear Berganda.

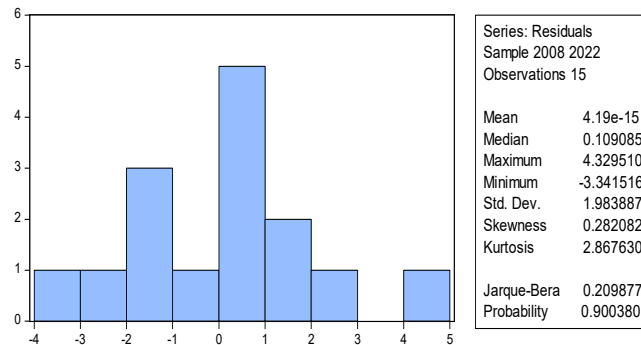
c. Metode Regresi Linier Berganda

Metode regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang mencoba menjelaskan hubungan antara dua Peubah atau lebih khususnya antara peubah-peubah yang mengandung sebab akibat disebut analisis regresi (Sulistiyono, 2018).

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas



Sumber: Eviews 10 Tahun 2024

Gambar 1. Grafik Hasil Uji Normalitas

Jika melihat grafik di atas, bisa dilihat nilai probabilitas *Jarque-bera* sebesar 0.900380 lebih besar dari 0.05 maka bisa di tarik kesimpulan bahwa data berdistribusi secara normal dengan kata lain lolos Uji Normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 08/24/24 Time: 14:31

Sample: 2008 2022

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Uncentered Variance	Centered VIF
C	1313.104	3932.070	NA
IPM	0.210128	3785.726	1.239327
INFLASI	0.043466	3.666433	1.224610
PE	0.057170	8.173537	1.311004

Sumber: Eviews 10 Tahun 2024

Bisa dilihat dari tabel di atas, nilai *VIF* variabel di atas <10 maka bisa disimpulkan bahwa asumsi uji multikolinearitas sudah terpenuhi atau lolos uji multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	2.281134	Prob. F(9,5)	0.1885
Obs*R-squared	12.06230	Prob. Chi-Square(9)	0.2098
Scaled explained SS	6.057508	Prob. Chi-Square(9)	0.7341

Sumber: Eviews 10 Tahun 2024

Berdasarkan gambar di atas nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.2098 ($>0,05$) maka bisa disimpulkan bahwa uji heterokedastisitas sudah terpenuhi atau data sudah lolos uji.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.552232	Prob. F(2,9)	0.5940
Obs*R-squared	1.639568	Prob. Chi-Square(2)	0.4405

Sumber: Eviews 10 Tahun 2024

Berdasarkan nilai Probability Prob. Chi-Square sebesar sebesar 0.4405 lebih dari 0.05 maka bisa dinyatakan untuk uji autokorelasi sudah lolos uji atau autokorelasi sudah terpenuhi

Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: TPAK

Method: Least Squares

Date: 08/24/24 Time: 14:08

Sample: 2008 2022

Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	127.9442	36.23678	3.530782	0.0047
PE	0.598836	0.239104	2.504506	0.0293
INFLASI	-0.571136	0.208485	-2.739462	0.0192
IPM	-0.873994	0.458397	-1.906630	0.0830
R-squared	0.591475	Mean dependent var	61.48067	
Adjusted R-squared	0.480059	S.D. dependent var	3.103897	
S.E. of regression	2.238126	Akaike info criterion	4.672333	
Sum squared resid	55.10130	Schwarz criterion	4.861147	
Log likelihood	-31.04250	Hannan-Quinn criter.	4.670322	
F-statistic	5.308702	Durbin-Watson stat	1.277200	
Prob(F-statistic)	0.016589			

Sumber : Eviews 10 Tahun 2024

Dimana:

$$\text{TPAK} = 127.944173093 + 0.598836275803 \cdot \text{PE} - 0.571136156878 \cdot \text{INFLASI} - 0.873994121369 \cdot \text{IPM}$$

Analisis Persamaan Regresi:

- Nilai konstanta yang di per oleh sebesar 127.9442 maka bisa diartikan jika variabel independen naik secara merata maka variabel dependen akan ikut naik sebesar 127.9442
- Nilai koefisien variabel Pertumbuhan ekonomi bernilai (+) positif sebesar 0.598836 maka bisa diartikan jika variabel Pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 1% maka Variabel TPAK akan meningkat sebesar 0.598836. Begitu juga sebaliknya

- c. Nilai koefisien Variabel Inflasi bernilai (-) negatif sebesar -0.571136 maka bisa diartikan bahwa setiap peningkatan 1% maka Variabel TPAK akan menurun sebesar -0.571136. Begitu juga sebaliknya
- d. Nilai koefisien Variabel Indeks Pembangunan Manusia bernilai (-) negatif sebesar -0.873994 maka bisa diartikan jika variabel Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 1% maka Variabel TPAK akan menurun sebesar -0.873994. Begitu juga sebaliknya.

Uji Statistik

a. Uji t (Uji Parsial)

Tabel 6. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	127.9442	36.23678	3.530782	0.0047
PE	0.598836	0.239104	2.504506	0.0293
INFLASI	-0.571136	0.208485	-2.739462	0.0192
IPM	-0.873994	0.458397	-1.906630	0.0830

Sumber : Eviews 10 Tahun 2024

Hasil uji t sebagai berikut:

- 1) Pengujian Pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan kerja
Variabel Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai *t-statistic* sebesar 2.504506 dengan nilai probabilitas 0.0293 ($<0,05$) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
- 2) Pengujian Inflasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Variabel Inflasi memiliki nilai *t-statistic* sebesar -2.739642 dengan nilai probabilitas 0.0192 ($<0,05$) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.
- 3) Pengujian Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki nilai *t-statistic* sebesar -1.906630 dengan nilai probabilitas 0.0830 ($>0,05$) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

b. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 7. Hasil Uji F

F-statistic	5.308702
Prob(F-statistic)	0.016589

Sumber: Eviews 10 Tahun 2024

Hasil Uji F di atas menjelaskan nilai *F-statistic* sebesar 5.308702 dengan nilai probabilitas sebesar 0.016589 ($<0,05$) maka bisa di tarik kesimpulan Variabel Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)Tabel 8. Hasil Uji R^2

R-squared	0.591475
Adjusted R-squared	0.480059

Sumber: Eviews 10 Tahun 2024

Hasil Uji Koefisien Determinasi memperlihatkan nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0.480059 maka di simpulkan bahwa sumbangan pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap variabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 48%. Sedangkan sisanya 52% di pengaruhi oleh variabel lain yang di luar penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data di atas penelitian tentang Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja memiliki pembahasan sebagai berikut:

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan hasil analisis, pertumbuhan ekonomi di Kota Manado berpengaruh positif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Artinya, setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, partisipasi tenaga kerja juga ikut naik. Hal ini terjadi karena peningkatan pertumbuhan ekonomi menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sehingga lebih banyak orang yang terlibat dalam pasar tenaga kerja. Peningkatan ekonomi menciptakan peluang kerja yang lebih besar, yang pada akhirnya mendorong lebih banyak orang untuk masuk ke dunia kerja di Kota Manado.

b. Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Manado

Berdasarkan hasil analisis, inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Manado. Artinya, setiap kali inflasi meningkat, partisipasi angkatan kerja di kota ini cenderung menurun. Inflasi yang tinggi mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga konsumsi dan investasi ikut berkurang. Akibatnya, permintaan terhadap tenaga kerja menurun, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan partisipasi tenaga kerja.

c. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kota Manado

Berdasarkan hasil analisis, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Manado tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Meskipun peningkatan IPM sering kali diharapkan mampu meningkatkan partisipasi tenaga kerja, karena masyarakat dengan pendidikan dan kesehatan yang baik lebih siap untuk bekerja, namun di Kota Manado hasilnya berbeda. Justru, tingginya IPM di Kota Manado cenderung menurunkan partisipasi angkatan kerja. Hal ini menunjukkan adanya fenomena sosial di mana masyarakat dengan kesejahteraan yang lebih tinggi kurang terdorong untuk bekerja, atau memilih tidak bekerja karena merasa sudah mencapai tingkat kesejahteraan yang cukup.

d. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara bersamaan pada tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Manado

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks pembangunan manusia secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Manado. Artinya, ketiga variabel ini memiliki peran penting dalam mempengaruhi partisipasi tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, sementara inflasi dan indeks pembangunan manusia juga memberikan dampak pada keputusan masyarakat untuk

berpartisipasi dalam angkatan kerja. Secara keseluruhan, variabel-variabel tersebut berkontribusi dalam meningkatkan jumlah penduduk yang terlibat aktif dalam dunia kerja di Kota Manado.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Manado.
- Inflasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Manado.
- Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Manado.
- Pertumbuhan ekonomi, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh secara bersamaan terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Manado.

Daftar Pustaka

- Abidin, Z., Adewiyeh, R., & Tan, T. I. (2024). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Sumatera Utara Tahun 2022. *Buletin Ekonomika Pembangunan*, 5(1).
- Aditiya, D. P., & Wildana, M. D. A. (2023). Analisis pengaruh sektor informal, produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia dan upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di jawa timur tahun 2018-2021. *Journal Of Development Economic And Social Studies*, 2(3).
- Agus, Widarjono. (2013). *Ekonometrika Pengantar Dan Aplikasinya*. Ekonosia. Jakarta.
- Aini, Z., Wijimulawiani, B. S., & Satarudin. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2020. *Journal of Economics and Business*, 8(2), 304–317.
- Anggoro, M. H. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan angkatan kerja terhadap tingkat pengangguran di kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(3).
- Anugrawati, A., & Iwang, B. (2023). Pengaruh Belanja Pemerintah dan investasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di indonesia. *ICOR: Journal of Regional Economics*, 4(02), 101-108.
- Ardian, R., Yulmardi, Y., & Bhakti, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ekonomi Aktual*, 1(1), 23-34.
- Arsyad, L. 2010, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5. Yogyakarta: BPPE
- Arrozi, F., & Sutrisna, K. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lama Mencari Kerja Bagi Tenaga Kerja Terdidik Di Kota Denpasar. *EJurnal EP Unud*, 7(12), 2732
- Ashari, R. T., & Athoillah, M. (2023). Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, upah minimum, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di kawasan tapal kuda. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(2), 313-326.
- Asmara, K. (2024). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sampang. *Journal of Economics Development Issues*, 7(1), 16–22.
- Aulia, N. Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2010-2020 (*Bachelor's thesis*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Jakarta).
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bastari, D. P. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, rata-rata lama sekolah, dan upah minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran di provinsi banten tahun 2010-2017 (*Bachelor's thesis*, Fakultas ekonomi dan bisnis uin jakarta).
- Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (BAPPEDA DIY). 2020. *Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta*

- Bonerri, K. B. (2018). Pengaruh Pendidikan Dan Upah Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Budiawan, A. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja terhadap industri kecil pengolahan ikan di Kabupaten Demak. *Economics Development Analysis Journal*, 2(1).
- Claver, P. (2024). Analisis pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di wilayah perkotaan provinsi Sulawesi Selatan analysis the influence of inflation, economic growth, and human developmnet index on the labor force participation rate in urban areas of south sulawesi (*Doctoral dissertation*, Universitas Hasanuddin).
- Dapar, I. A., Rawung, S. S., & Rumagit, M. C. (2021). Pengaruh investasi dan Pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat pengangguran di Provinsi Sulawesi. *Jurnal Equilibrium*, 2(1).
- Faro Amiliya, Pengaruh Upah Minimum Dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015, *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMH Banten*. 2019. Hlm 39
- Firdhania, R., & Muslihatinningsih, F. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 117-121.
- Gatiningsih, G., & Sutrisno, E. (2017). Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Hafiz, E. A., Meidy Haviz, & Ria Haryatiningsih. (2021). Pengaruh PDRB, UMK, IPM terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Jawa Barat 2010-2020. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 55–65.
- Hartati, N. (2020). Pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia periode 2010–2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 5(01), 92-119.
- Hasanah, F. (2016). Analisis pengaruh aglomerasi industri, angkatan kerja dan human capital investment terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2012-2014. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 5(4), 283-291.
- Haspa, N. H. (2023). Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Upah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Journal of Economics and Business*, 9(1), 1-13.
- Herman, H. (2023). Pengaruh UMR, jumlah penduduk, PDRB dan inflasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Pekanbaru. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 11(1), 54-63.
- Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 53-62.
- H. Zaeni Asyhadie, Rahmati Kusuma, Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori dan Praktik Di Indonesia Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 3.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi covid-19. *Jurnal Perspektif*, 18(2), 201-208.
- Izzah, N. (2015). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia (ipm) dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di propinsi Riau tahun 1994-2013. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 1(2), 156-172.
- Krugman, P., & Wells, R. (2008). *Microeconomics*. New York: Worth Publishers
- Larasati, M., Kiki Asmara, S. E., & Ignatia Martha Hendrati, S. E. (2020). B. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap indeks pembangunan manusia jawa timur 2008-2019. *Economics and Sustainable Development*, 5(2), 7-7.
- Indra, P. M., Yusni, M., & Hilmah, Z. Analisis pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di kota Pekanbaru menurut jenis kelamin. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 7(2), 1-15.
- Makna, G. A. (2016). Pengaruh Rata-Rata Lama Berpendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 142-153
- Mala, V. S. N., Suyadi, B., & Sedyati, R. N. (2017). Analisis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari

- Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 11(1), 130-139.
- Maulana, R., Sambodo, H., & Binardjo, G. (2022). Volume . 24 Issue 3 (2022) Pages 529-536 *FORUM EKONOMI : Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Akuntansi* ISSN : 1411-1713 (Print) 2528-150X (Online) Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi Angkatan kerja di pulau Jawa Factors affecting the labo. 3(3), 529–536.
- Mahroji, D., & Nurkhasanah, I. (2019). Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 9(1).
- Mardiatmoko, G. (2020). Pentingnya uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda (studi kasus penyusunan persamaan allometrik kenari muda [*canarium indicum* L.]). *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(3), 333-342.
- Miski, R. (2019). Analisis Pengaruh Karakteristik Ketenaga kerjaan pada Perempuan Berstatus Janda terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Banda Aceh (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).
- Natalia, M, A, Damanik, D., Manik, Y. M., Falashifah, F., Nugroho, S. B. M., Widian, I. N. W., ... & Jumiyati, S. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Nika, A., Arif, A., & Leviza, J. (2014). Peranan Hukum Diplomatik Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Sumatra Journal of International Law*, 2(1), 14994.
- Nugraha, N. A., & Djulius, H. H. (2021). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat Periode 2014-2019 (Doctoral dissertation, Universitas Pasundan bandung).
- Pradnyadewi, D., & Purbadarmaja, I. B. (2017). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 6(2), 255–285.
- Prof. Dr. Elfindri, Nasri Bachtiar. Phd,2004.Ekonomi Ketenagaerjaan. Fakultas Ekonomi Universitas Andalas: Universitas Andalas
- Putra, A. B. (2020). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Kabupaten Pelalawan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Putong, Iskandar. 2013. *Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Qaimah, C. D. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Aceh (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam).
- Ramadhan, B. A., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Populasi Penduduk, Upah Minimum, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Banten Tahun 2017-2021. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 82-89.
- Rahmawati, Y. O. (2019). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 1995-2017 (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Rizki Herdian Zenda, "Peranan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Surabaya," 2, No. 01 (Maret 2017). 372.
- Resmiati, N. H. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Kerja Perempuan Menikah Indonesia. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Roring, G. D. J., Rumagit, M. C. N., & Malau, N. A. (2023). Analisis Spillover Effect Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara (Manado, Bitung, Minahasa, Minahasa Utara). *Journal of Economics and Business UBS*, 12(6), 3533-3542.
- Roring, G. D. J., Rumagit, M. C., Manoppo, V., Rawung, S. S., Malau, N. A., & Parasan, P. M. (2023). *Ekonomi Moneter Jilid 1*. EDUPEDIA Publisher, 1-92.
- Rostow, W. W. (1960). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Rusalia, D. (2018), Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Kabupaten Lampung Tengah Periode Tahun 2015-2017) Lampung : Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Sadono, Sukirno. 2006. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta: Prenada Media Group
- Sadono Sukirno. 2016. Makro Ekonomi Teori Pengantar. Jakarta : PT. Rajawali Pers
- Shania Farza, S. F.(2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penduduk, Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).
- Sukirno, S. 2015. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta : Rajawali Pers
- Simanjuntak, Payaman J. (2000). Produktivitas tenaga Kerja. Jakarta: Grafindo.
- Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell.
- Sinaga, D. P., Lubis, C. K. S., Hidayat, N., Sari, C. M., & Syahfitri, T. I. (2024). Analisis Pengaruh Rasio Ketergantungan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(2), 1485-1496.
- Sianturi, A. F., Tampubolon, A., Hidayat, N., Nasution, M. D., & Sianturi, R. (2024). Pengaruh Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Kota Medan (2014-2023). *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 739-750.
- Siregar, L. L. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Utara Periode 1994-2013 (Doctoral dissertation, IAIN Padangsidimpuan).
- Sonny Sumarsono. 2004. Metode Riset Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Susanti, I. S. I. (2022). Penerapan metode analisis regresi linear berganda untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada kasus indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal gamma-PI*, 4(2), 10-17.
- Susanto, Rudy, and Indah Pangesti. 2021. "Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia." *JABE (Journal of Applied Business and Economic)* 7
- Subri. (2013). Ekonomi Sumber Daya Manusia. (P. R. G. Persada, Ed.). Jakarta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : ALFABETA.
- Sukirno.2007. Makroekonomi Modern. Jakarta. Rajagrafindo Persada
- Sukirno, S. 2015. Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta : Rajawali Pers
- Sukirno, Sandono. 2010. Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sulistiyono, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2013-2015) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)
- Sulistiyono, S., & Sulistiyowati, W. (2018). Peramalan produksi dengan metode regresi linier berganda. *PROZIMA (Productivity, Optimization and Manufacturing System Engineering)*, 1(2), 82-89.
- Surbakti, E. N. C., & Hasan, Y. S. (2023). Pengaruh Pendidikan dan upah terhadap Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Utara. *Oikos Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, 16(1), 27-32.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271-278.
- Suot, H. L., Sawelo, S. C., & Hamenda, B. (2020). Pengaruh Suku Bunga BI Rate, Inflasi Dan Kurs Terhadap IHSG. *Manajemen dan Kewirausahaan*, 1(2), 31-39.
- Sutawijaya, A. (2012). Pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap inflasi di Indonesia. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 85-101.

- Syafira, S., Selvia, D., Ratna, R., & Saharudddin, S. (2024). Pengaruh Jumlah Penduduk, Upah Minimum, dan PDRB terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Sumatera Utara. *Jurnal Aplikasi Ilmu Ekonomi*, 2(1), 30-46.
- Syafitri, A., & Ariusni, A. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 351-364.
- Syamsuddin, N., Saputra, D. H., Mulyono, S., & Fuadi, Z. (2021). Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Dan Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh. *Jurnal Sociohumaniora Kodepena (JSK)*, 2(1), 29-49.
- Titin, T. (2022). Pengaruh pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan upah terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar (Tesis sarjana). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Todaro, Smith, 2005. "Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga". Edisi Kedelapan Jakarta: Erlangga.
- Wahyono, A. S. (2023). Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Inflasi Terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Total di Indonesia (1998-2018) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Wasono, F. K., Erfit, E., & Achmad, E. (2020). Analisis pengaruh upah minimum provinsi, kemiskinan dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 9(2), 63-76.
- Warapsari, E. B., Hidayat, W., & Boedirochminarni, A. (2020). Analisis Pengaruh Inflasi, Pdrb, Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 194-207.
- Wasingah, S. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.
- Widi, Lestari. 2011. "Pengaruh Upah, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja Pada Industri Kecap di Kecamatan Pati Kabupaten Pati". Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Negeri Semarang.
- Winarti, Y. G. (2020). Analisis Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk, Konsumsi Makanan, Dan Tingkat Partispasi Angkatan Kerja Perempuan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Magelang. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, 3(2), 1-16.
- Wirawan, K. E., Bagia, I. W., & Susila, G. P. A. J. (2019). Pengaruh tingkat pendidikan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 5(1), 60-67.
- Yam, J. H., & Taufik, R. (2021). Hipotesis Penelitian Kuantitatif. *Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi*, 3(2), 96-102.
- Yanda, F. A., Saleh, S. E., & Dai, S. I. S. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Sulawesi. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2), 101-111.

PENGARUH BELANJA MODAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Graciella B. Sompotan¹, George A. P Rori², Natalia A. Malau³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado

e-mail: graciellabrigitasompotan@gmail.com, nataliamalau@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Utara. Penelitian ini mengambil Provinsi Sulawesi Utara sebagai lokasi penelitian. Pada tahun 2003-2022, angka Kemiskinan mengalami fluktuasi dipengaruhi oleh faktor seperti strategi pembelanjaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang kurang tepat terhadap permasalahan dan program-program pembangunan ekonomi yang belum menyebar di setiap masyarakat termasuk golongan penduduk miskin. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, alat pengumpulan data yaitu berupa dokumentasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan *time series* tahun 2003-2022 dengan menggunakan alat analisis *Ordinary Least Square* (OLS) Eviews 8. Berdasarkan hasil penelitian ini maka ditarik kesimpulan bahwa Belanja Modal ternyata berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal.

Abstract

This research aims to determine the effect of capital expenditure and economic growth on poverty in North Sulawesi. This research took North Sulawesi Province as the research location. In 2003-2022, poverty rates experienced fluctuations influenced by factors such as capital expenditure strategies carried out by local governments that were not appropriate to problems and economic development programs that had not yet spread to every community, including the poor. This type of research is a quantitative approach. Data collection techniques with documentation, data collection tools are in the form of documentation obtained from the Central Statistics Agency (BPS). The method used in this research is multiple linear regression with the 2003-2022 time series using the Eviews Ordinary Least Square (OLS) analysis tool. 8. Based on the results of this research, it can be concluded that Capital Expenditures have a negative and significant effect on Poverty in North Sulawesi Province. Economic Growth does not have a significant effect on Poverty in North Sulawesi Province.

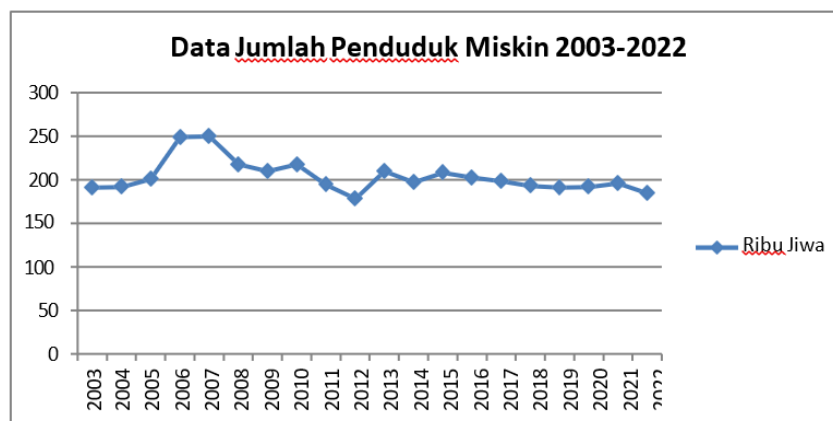
Keywords: Poverty, Capital Expenditure, Economic Growth.

1. Pendahuluan

Kemiskinan yang terjadi pada suatu Negara memang perlu dilihat sebagai suatu masalah yang serius, karena saat ini kemiskinan membuat banyak masyarakat Indonesia terutama Di Provinsi Sulawesi Utara mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara umum, kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak hal. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seseorang terutama dalam hal pendapatan dan konsumsi (Natalia dkk, 2022). Kemiskinan terjadi karena rendahnya modal manusia, seperti pelatihan, pendidikan, atau kemampuan membangun serta rendahnya modal fisik (Dowling & Valenzuela, 2010).

Menurut Bank Dunia, penyebab dasar kemiskinan yaitu kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar dan sarana prasarana, kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor, adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung, adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi, rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat, budaya hidup yang dikaitkan dengan

kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya, tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*), pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara (2020) salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kemiskinan tersebut yakni adanya wabah covid-19 yang sangat membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat yaitu strategi pembelanjaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang kurang tepat terhadap permasalahan dan program-program pembangunan ekonomi yang belum menyebar di setiap masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin. Kemiskinan dapat membuat masyarakat kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan antara lain kurangnya kesempatan kerja, kurangnya pendidikan yang berkualitas, dan keterbatasan akses layanan kesehatan sehingga dapat mempengaruhi menurunnya angka pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah.



Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Utara

Permasalahan kemiskinan bukan hanya permasalahan nasional tetapi juga merambat ke berbagai wilayah di Indonesia termasuk provinsi Sulawesi Utara.. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin menurun pada tahun 2022 yaitu oleh keadaan wabah covid-19 yang sudah mulai membaik yang mengakibatkan banyak masyarakat kembali melakukan kegiatan seperti mencari pekerjaan, membuka usaha baru dan lainnya . Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan kemiskinan tersebut yakni adanya wabah covid-19 yang sangat membatasi seluruh kegiatan masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat yaitu strategi pembelanjaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang kurang tepat terhadap permasalahan dan program-program pembangunan ekonomi yang belum menyebar di setiap masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Furqani dan Titimmah, 2015). Belanja modal dapat mempengaruhi kemiskinan pada suatu daerah karena apabila belanja modal dialokasikan dengan baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan maka dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Manfaat ini dapat dilihat dari kemudahan dalam mengakses fasilitas pelayanan publik, infrastruktur, sarana prasarana yang dapat mendukung terjadinya kesejahteraan dalam masyarakat. Hal yang penting untuk dilihat adalah sejauh mana pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah mampu memberikan pengaruh dan dampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat yang signifikan dari tahun ke tahun. Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, hal tersebut menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing-masing daerah. Meskipun mendapat dana perimbangan oleh pemerintah pusat untuk masing-masing daerah namun pengaruh belanja modal oleh

pemerintah daerah sangat berpengaruh signifikan karena apabila strategi pembelanjaan modal yang tidak tepat maka tidak akan tercapai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat sehingga berpotensi meningkatnya angka kemiskinan dalam suatu daerah.

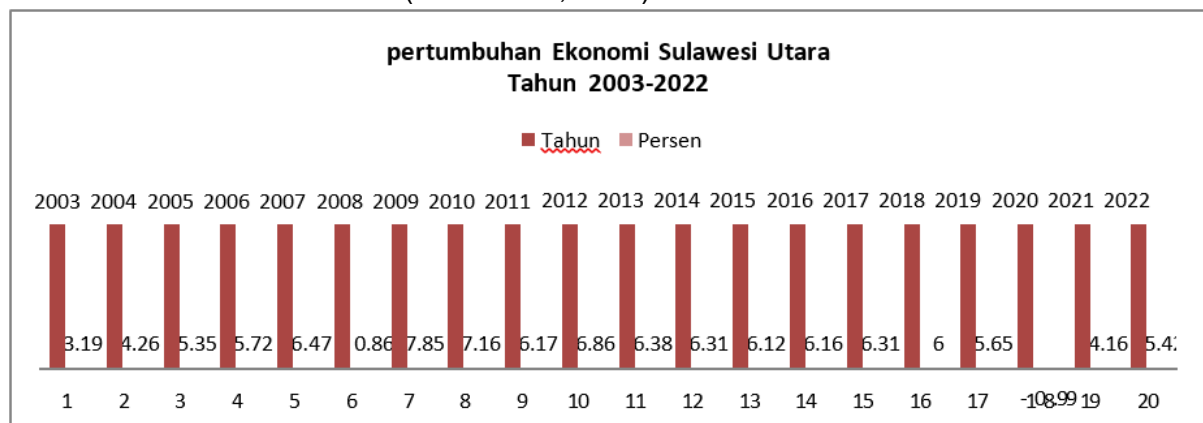
Tabel 1. Realisasi Belanja Modal Provinsi Sulawesi Utara menurut Jenis pengeluaran Tahun 2003- 2022

Tahun	Biaya Pengeluaran Belanja Modal (Rupiah)	Tahun	Biaya Pengeluaran Belanja Modal (Rupiah)
2003	75.908.687	2013	387.136.385
2004	80.678.508	2014	506.723.318
2005	82.653.419	2015	757.277.045
2006	112.059.712	2016	744.467.896
2007	138.200.203	2017	757.829.988
2008	157.341.663	2018	721.402.643
2009	241.283.650	2019	898.365.937
2010	164.360.063	2020	1.064.612.238
2011	233.630.333	2021	828.421.505
2012	350.596.718	2022	798.876.243

Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara

Berdasarkan data di atas bahwa pengeluaran tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu mencapai 1.064.612.238 rupiah, namun pada tahun selanjutnya yaitu 2021 dan 2022 terus mengalami penurunan sehingga mencapai 798.876.243 ribu rupiah. Pembelanjaan modal pada tahun 2020 merupakan pembelanjaan tertinggi yang disebabkan oleh pandemi covid-19 sehingga pemerintah daerah harus meningkatkan kebutuhan masyarakat khususnya dalam segi kebutuhan kesehatan.

Kemajuan kegiatan ekonomi yang mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk dalam suatu masyarakat yang menghasilkan barang dan jasa karena bertambahnya jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi dapat disebut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih merupakan tujuan utama dan indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi daerah, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan berpengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat dengan berkurangnya kemiskinan (Pradipta, 2016). Adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara menjadi indikator adanya keberhasilan pembangunan ekonomi dalam waktu tertentu (Natalia dkk, 2022).



Sumber: Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara

Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Tahun 2003-2022

Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), pertumbuhan ekonomi Indonesia terendah terjadi pada tahun 2020 yang diduga disebabkan oleh wabah virus COVID-19 yang

menyerang hampir seluruh negara di dunia. Begitu pun di Sulawesi Utara, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai -0,99 persen, namun pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara membaik pada tahun 2021 menjadi 4,16 persen dan terus meningkat pada tahun 2022 menjadi 5,42 persen. Peningkatan angka pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mulai kondusif dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dibatasi akibat wabah COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang serta pelayanan (Merry dkk, 2021). Menurunnya pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pendapatan masyarakat, dan jika penurunan pendapatan terus terjadi, maka kemampuan masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya kesejahteraan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan dalam kegiatan perekonomian yang menyediakan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah, dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional tanpa melihat kenaikan pertumbuhan penduduk dan struktur ekonomi (Natalia dkk, 2022).

Namun, adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara menjadi indikator adanya keberhasilan pembangunan ekonomi dalam waktu tertentu. Ada tiga faktor atau komponen dalam pertumbuhan ekonomi setiap bangsa, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi (Gaby dkk, 2023).

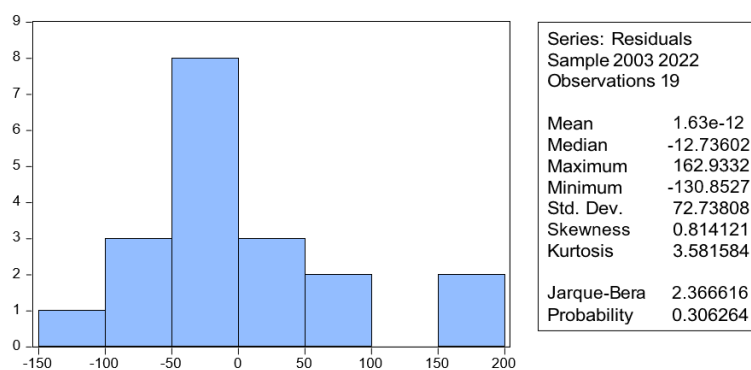
Dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, terdapat program-program yang dibuat pemerintah, namun dianggap masih belum tepat sasaran dan bahkan belum berhasil dalam menuntaskan kemiskinan. Hal ini disebabkan program tersebut belum menyentuh masalah mendasar yang terjadi pada masyarakat sehingga hasilnya belum efektif. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus menerus menjadi masalah yang berkepanjangan akibat dari pembangunan ekonomi yang belum menyebar di setiap masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan tanda keberhasilan pembangunan ekonomi suatu bangsa (Stanny dkk, 2022).

2. Metode

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan analisis pada data numerik (angka) yang diolah dengan metode statistik. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui publikasi data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara dari tahun 2003 hingga 2022, yang berupa data *Time Series*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari BPS Sulawesi Utara. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan (Y), yang diukur berdasarkan angka kemiskinan di Sulawesi Utara pada tahun 2003-2022 yang dinyatakan dalam ribu jiwa. Sementara itu, variabel independen terdiri dari dua faktor, yaitu belanja modal (X1), yang diukur berdasarkan realisasi belanja modal Sulawesi Utara tahun 2003-2022 dalam rupiah, dan pertumbuhan ekonomi (X2), yang diukur berdasarkan persentase pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada periode yang sama. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan alat statistik Eviews 8 untuk mengolah dan menganalisis data.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Uji Normalitas



Sumber: Eviews 8 Tahun 2024

Gambar 3. Grafik Hasil Uji Normalitas

Pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa uji normalitas menunjukkan nilai Jarque-Bera sebesar 2.366616, dengan probabilitas 0.306264, melebihi dari taraf signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual yang menjadi standar pada model regresi berganda pada uji normalitas sudah terpenuhi.

b. Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 07/20/24 Time: 01:28

Sample: 2003 2022

Included observations: 19

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	26123.02	83.38747	NA
X1	0.000408	43.83854	1.019368
X2	0.005196	53.67820	1.019368

Sumber: Eviews 8 Tahun 2024

Dari tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa nilai korelasi antara setiap kurang dari 10 maka bisa disimpulkan bahwa asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi atau lolos uji.

c. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.889702	Prob. F(5,13)	0.5156
Obs*R-squared	4.844062	Prob. Chi-Square(5)	0.4352
Scaled explained SS	4.434031	Prob. Chi-Square(5)	0.4888

Sumber: Eviews 8 Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Chi-squared Sebesar $0.4352 \geq 0,05$. Maka asumsi heteroskedastisitas terpenuhi. Yang artinya diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas atau sudah lolos uji.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.153697	Prob. F(2,14)	0.1529
Obs*R-squared	4.470352	Prob. Chi-Square(2)	0.1070

Sumber: Eviews 8 Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. Chi-squared Sebesar $0.1070 \geq 0,05$. Maka asumsi Autokorelasi terpenuhi. Yang artinya uji hipotesis, H_0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi.

1) Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 07/20/24 Time: 01:34

Sample: 2003 2022

Included observations: 19

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.339627	161.6262	33.03689	0.0000
X1	-0.046063	0.020190	-2.281450	0.0366
X2	0.134144	0.072080	1.861038	0.0812
R-squared	0.323273	Mean dependent var	5314.421	
Adjusted R-squared	0.238682	S.D. dependent var	88.42091	
S.E. of regression	77.15039	Akaike info criterion	11.67333	
Sum squared resid	95234.91	Schwarz criterion	11.82245	
Log likelihood	-107.8966	Hannan-Quinn criter.	11.69857	
F-statistic	3.821600	Durbin-Watson stat	1.472011	
Prob(F-statistic)	0.043986			

Sumber: Eviews 8 Tahun 2024

Dari hasil tabel 5 di atas diperoleh persamaan sebagai berikut:

Dimana:

$$Y = 5.339627 + -0.046063 X_1 + 0.134144 X_2$$

Dari persamaan diatas, maka dibuat interpretasi yaitu sebagai berikut:

- Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 5.339627. Maka bisa diberi kesimpulan bahwa, jika Variabel Independen naik secara merata, maka Variabel Dependen juga ikut naik sebesar 5.339627.
- Nilai koefisien Variabel X_1 bernilai (-) sebesar -0.046063. Maka bisa diberi kesimpulan bahwa, jika Variabel X_1 meningkat, maka Variabel Y ikut meningkat sebesar -0.046063. Begitu juga sebaliknya.

- c) Nilai koefisien Variabel X2 bernilai (+) sebesar 0.134144. maka bisa diberi kesimpulan bahwa, jika Variabel X2 meningkat, maka Variabel Y tidak ikut meningkat sebesar 0.134144. Begitu juga sebaliknya.

Uji Statistik

a. Uji t (Uji Parsial)

Tabel 6 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5339.627	161.6262	33.03689	0.0000
X1	-0.046063	0.020190	-2.281450	0.0366
X2	0.134144	0.072080	1.861038	0.0812

Sumber: Eviews 8 Tahun 2024

Hasil uji t pada tabel 6 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengujian Belanja Modal (X1) terhadap Kemiskinan

Diketahui t-Statistik sebesar -0.046063 dengan nilai Prop,(signifikan) Sebesar 0.0366 (<0.005) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel X1 berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Y.

Pengujian Pengangguran (X2) terhadap Kemiskinan

Diketahui t-Statistik sebesar 0.134144 dengan nilai prop,(signifikan) sebesar 0.0812 (<0.005) maka bisa di tarik kesimpulan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel Y.

b. Uji F (Uji Simultan)

Tabel 7 Hasil Uji F

F-statistic	3.821600
Prob(F-statistic)	0.043986

Sumber: Eviews 8 Tahun 2024

Pada tabel 4.6 diatas di dapat F-statistik 3.821600 dengan nilai Prob. (F-statistik) sebesar 0.043986(<0,05) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (X) berpengaruh signifikan secara simultan (bersamaan) terhadap Variabel Dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji R²

R-squared	0.323273
Adjusted R-squared	0.238682

Sumber: Eviews 8 Tahun 2024

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa besar koefisien determinasi pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan sebesar 0.238682%. Hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan sebesar 23% sedangkan 77% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara mempunyai pembahasan sebagai berikut:

a. Pengaruh Belanja Modal (X1) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi uji T, dilihat bahwa probabilitas t-statistik untuk Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003-2022 adalah 0.0366. Karena nilai ini kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini terjadi karena program-program yang dibuat oleh pemerintah mulai mendasar pada kebutuhan masyarakat yakni pengadaan dan penambahan fasilitas dalam daerah dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Ezra Kaligis dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Di Minahasa Utara Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening Variabel. Hasil dari penelitian ini adalah Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Artinya peningkatan alokasi Belanja Modal memberi dampak positif terhadap penduduk miskin karena ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan dampak positif dari peningkatan Belanja Modal pemerintah dan akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan.

b. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X2) Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi uji T, dilihat bahwa probabilitas t-statistik untuk Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003 –2022 adalah 0.0812. Karena nilai ini lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh secara positif dan parsial terhadap Kemiskinan. Tidak terdapatnya pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi dengan tingkat Kemiskinan pada penelitian ini didukung dengan data tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara pada tahun 2003-2022 yang digunakan dalam penelitian ini dimana korelasi antara keduanya tidak konsisten. Terdapat tahun dimana Pertumbuhan Ekonomi naik, tingkat Kemiskinan menurun, Sementara terdapat juga keadaan dimana ketika Pertumbuhan Ekonomi turun tetapi tingkat Kemiskinan juga mengalami Penurunan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diindikasikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dengan sendirinya dapat mengentaskan Kemiskinan.

Oleh karena itu penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Elisabeth Nainggolan dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2019. Hasil penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemiskinan. Kondisi ini terlihat dari keadaan yang terjadi di Sumatra Utara dimana terjadi penurunan tingkat Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2010-2019 dan tingkat Kemiskinan Di Sumatera Utara mengalami penurunan selama penelitian berlangsung.

c. Variabel Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai F-Statistik sebesar 3.821600 dan probabilitas sebesar 0.043986 terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap Kemiskinan dengan koefisien determinasi sebesar 3,8%. Artinya kedua variabel memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Alokasi Belanja Modal yang baik dan sesuai dapat melengkapi kebutuhan infrastruktur dalam kehidupan bermasyarakat, dan Pertumbuhan Ekonomi yang baik dapat mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan kedua variabel tersebut dapat berkontribusi dalam mengurangi jumlah kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.

Oleh karena itu hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya dari Elina Alfin Meida, Susilo dalam penelitian yang berjudul Pengaruh PAD, Belanja Modal dan

Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di provinsi Jawa tengah tahun 2018-2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan. Artinya ketiga variabel berpengaruh dalam usaha untuk mengurangi kemiskinan.

4. Kesimpulan

- a. Variabel Belanja Modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.
- b. Variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh tidak Signifikan terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.
- c. Variabel Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S., & Rona, R. (2014). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal. *Iqtishadia*, 7(1), 179-202.
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi. *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 4(2).
- Astuti, W. A., Hidayat, M., & Darwin, R. (2017). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 7(2), 140-147.
- Arief Anshory Yusuf dan Sumner, A. 2015. Growth, Poverty, And Inequality Under Jokowi. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51 (3), hal. 323 – 348.
- Bappenas. (2011). Analisis Perspektif, Permasalahan dan Dampak Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Budhi, S., & Kembar, M. (2013). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di bali: analisis FEM data panel. *Jurnal Ekonomi kuantitatif terapan*, 6(1), 44289.
- Darise, (2008), *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, Jakarta: indeks
- Dowling, J. M. (John M., & Valenzuela, R. J. (2010). Economic development in Asia. 427
- Erlina, Sakti.Rambe, Rasdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Salemba Empat: Jakarta.
- Gaby, D. J. R., Kumenaung, A. G., & Lopian, A. L. C. P. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4 Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(4), 70-87.
- Hapsari, P. P., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Pengaruh pertumbuhan usaha kecil menengah (UKM) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (studi di pemerintah kota batu). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(2), 88-96.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah.Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, M. I., Imsar, I., & Dongoran, R. N. (2022). Pengaruh sukuk korporasi dan total aset perbankan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 370-375.
- Iskandar, A., & Subekan, A. (2014). Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat di Era Desentralisasi Fiskal (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan TA 2008-2012) (Local Financial Performance and The Social Welfare on Districts and Municipals of South Sulawesi on 2008-2012: Panel Regression with Random Effect Model (REM)). *Jurnal Info Artha Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)* Vol. I/XII/2014-ISSN, 0852-6737.
- Jember, I. M. dan Swara, Yogi Wayan. 2011. Kemiskinan Di Bali. *Piramida*, 7 (2), hal. 1 – 22.

- Kakasih, Rendy Armando dan George M.V. Kawung, Steeva Y.L Tumangkeng (2018). Pengaruh Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.18 No. 02
- Kuncoro, M. (2004). *Teori Ekonomi Pembangunan, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Kusnandar, & Siswanto, D. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Belanja Modal.
- Komariah. D. Yogianto, M., & Hukom, A. (2019). Pengaruh Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523-532.
- Khikmah, Z., Sarfiah, S. N., & Prasetyanto, P. K. (2020). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM di Pulau Sulawesi Tahun 2011-2018. *Dinamic*, 2(4), 1127-1142.
- Lestari, M. (2021). Analisis Dampak Belanja Daerah terhadap Kemiskinan di Jambi. *Media Edukasi Data Ilmiah dan Analisis (MEDIAN)*, 4(02), 9-15.
- Maipita, i., & fitrawaty. (2014). *Mengukur kemiskinan & distribusi pendapatan*. 262.
- Mirah, M. R., Kindangen, P., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di provinsi sulawesi utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(1), 85-100.
- Mamuka, K. K., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sulawesi utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).
- Mustaqimah, K., Hartoyo, S., & Fahmi, I. (2017). Peran belanja modal pemerintah dan investasi pembangunan manusia dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 6(2), 1-15.
- Merry C, R., Dapar, I. A., Rawung, S. S., (2021). Pengaruh Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Equilibrium*, 2(1).
- Natalia A, M., Roring, G. D. J., Rumagit, M. C. N., (2023). Analisis Spillover Effect Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara (Manado, Bitung, Minahasa, Minahasa Utara). *Journal of Economics and Business UBS*, 12(6), 3533-3542.
- Natalia A, M., Damanik, D., Manik, Y. M., Falashifah, F., Nugroho, S. B. M., Widiana, I. N. W., ... & Jumiyati, S. (2022). *Ekonomi Pembangunan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Natalia A, M., Bolung, D., (2022). Analisis Dampak Kemiskinan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kawiley Kecamatan Kauditan. *Jurnal Equilibrium*, 3(2), 64-71.
- Nurwahida, N., Sugianto, S., & Jannah, N. (2022). Pengaruh Ekspor, Reksadana Syariah dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional Periode 2012- 2020. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1584-1597.
- Nuarisa, sheila Ardhian. (2013). Pengaruh PAD, DAU DAN DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.
- Oratmangun, H. D., Kalangi, J. B., & Naukoko, A. T. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(6).
- Pradipta, P. (2016). Analisis Belanja Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2).
- Palupi, F. A. D. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi perubahan alokasi belanja modal. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 40-51.
- Pangiuk - ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research, 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap penurunan kemiskinan di provinsi jambi 2009-2013
- Permatasari, I., & Mildawati, T. (2016). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur.

- Stanny S.S., Lumatauw, N. T. G., & Manopo, V. (2022). Pengaruh Perdagangan Internasional dan Financial Development terhadap pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1990-2019. *Jurnal Equilibrium*, 3(2), 55-63.
- Syahputra, R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 183-191.
- Salim, A., Fadilla, F., & Purnamasari, A. (2021). Pengaruh Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 7(1), 17-28.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (8th ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunusi, D. (2014). Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(2).
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2021) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Tambunan, Tulus. 2001. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan, Empiris*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Tumbuan, C. C. G., Rorong, I. P. F., & Tumangkeng, S. Y. (2023). Pengaruh Belanja Modal, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(2), 121-132.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic development*. Boston: Pearson Addison Wesley
- Todaro, Michael. et al. 2011. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Yustika, Ahmad Erani. 2007. *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Todaro, Michael P. 2011. *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas Jilid 1. Erlangga: Jakarta
- Tjiabrata, A., Engka, D. S., & Rompas, W. I. (2021). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(7).
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan. Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
- Wandira, G.A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*. 2 (1).
- Widiasih dan Gayatri. 2017. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil pada belanja modal kabupaten/Kota di provinsi Bali". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.18.3. Maret(2017): 2143-2171, ISSN: 2302- 8556
- Windia, Wayan. 2015. Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan (Di Bali). *Piramida*, 11 (1), hal.1 - 7.
- Wijono, W. W. (2005). Mengungkap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir. *Jurnal Manajemen dan Fiskal*, 5(2), 17.
- Yanto, Joni Kristian Firdi, and Susi Astuti. "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)* 2, no. 3 (2020): 346-357.
- Yakup, A. P. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (*Doctoral dissertation*, Universitas Airlangga).

Zakaria, R. (2018). Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN MINAHASA

Trivena Lumenta¹, Merry C.N. Rumagit², Viviane Manoppo³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado

e-mail: 18305033@unima.ac.id, merryrumagit@unima.ac.id, vivianemanoppo@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Minahasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dimana data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode statistik untuk memahami hubungan antar variabel. Data yang digunakan bersifat kuantitatif, yang berarti dapat dihitung secara numerik dan disajikan dalam bentuk angka sebagai dasar penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya tingkat upah dapat memberikan dampak ganda: mendorong pencari kerja untuk masuk ke pasar kerja, tetapi juga dapat menahan niat pelaku usaha dalam menambah tenaga kerja karena pertimbangan biaya. Selain itu, indikator pembangunan manusia belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Wilayah dengan indeks pembangunan rendah cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, yang diduga berkaitan dengan kurangnya kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja.

Kata kunci: Upah, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence the poverty rate in Minahasa Regency. The approach used is a quantitative approach, where the data collected is analyzed using statistical methods to understand the relationship between variables. The data used is quantitative, which means it can be calculated numerically and presented in the form of numbers as a basis for drawing conclusions. The results of the study indicate that low wage rates can have a dual impact: encouraging job seekers to enter the labor market, but can also hold back business actors' intentions to increase their workforce due to cost considerations. In addition, human development indicators have not shown a significant effect on poverty. Areas with a low development index tend to have high poverty rates, which are thought to be related to the lack of abilities and skills needed in the world of work.

Keywords: Wages, Human Development Index

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada tahun 2018, populasi Indonesia mencapai sekitar 265 juta jiwa. Besarnya populasi ini menjadi latar munculnya berbagai persoalan, salah satunya adalah kemiskinan. Di antara sekian banyak permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang maupun negara maju, pengangguran menjadi salah satu isu utama yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana pembangunan ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Hal ini karena keterbatasan dalam menyerap tenaga kerja, yang kemudian memicu menurunnya kontribusi sektor ketenagakerjaan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ketika jumlah angkatan kerja terus bertambah namun tidak diimbangi dengan tersedianya lapangan pekerjaan, maka risiko kemiskinan pun meningkat. Tingginya waktu yang diperlukan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan bisa menjadi indikasi dari tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah.

Berdasarkan data pengamatan dari tahun 2013 hingga 2015, tingkat pengangguran mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Sedangkan pada periode 2017 sampai 2021, terjadi dinamika berupa fluktuasi atau naik-turunnya angka pengangguran. Ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia memperbesar kemungkinan masyarakat masuk dalam kategori miskin. Kondisi ini

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara berkembang belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dalam hal penyediaan pekerjaan, yang akhirnya menyebabkan peningkatan kemiskinan dari waktu ke waktu (Sukirno, 2016).

Selain itu, faktor-faktor seperti ketidakstabilan upah dan efisiensi pengupahan juga turut memengaruhi tingkat kemiskinan (Khotimah, 2018). Dalam dunia ketenagakerjaan, fenomena kekakuan upah terjadi ketika upah tidak dapat secara fleksibel menyesuaikan diri dengan kondisi pasar tenaga kerja. Realitasnya, upah riil terkadang tetap tinggi di atas titik keseimbangan pasar, padahal kondisi tersebut tidak selalu bisa dipertahankan secara efektif (Mankiw, 2003).

Kenaikan upah pun tidak selalu memberikan keuntungan bagi pekerja, terutama jika perusahaan tidak mampu mengikuti ketentuan tersebut. Menurut prinsip pasar kerja, ketika penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari permintaan, maka tekanan terhadap upah akan meningkat. Sebaliknya, jika pasokan pekerja terbatas, permintaan cenderung menurun, yang berdampak pada naik turunnya upah di pasar (Cahyani, 2016).

Hasil studi juga menunjukkan bahwa kemiskinan bisa dipengaruhi oleh aspek pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk, semakin besar peluang untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam suatu daerah (Khotimah, 2018). Namun di sisi lain, terdapat temuan bahwa di Provinsi Lampung, penduduk dengan pendidikan tinggi justru menunjukkan kecenderungan meningkatnya kemiskinan seiring dengan kenaikan upah minimum yang diberlakukan pemerintah, yang mencerminkan adanya kekakuan dalam sistem pengupahan (Sapitri, 2018).

Penelitian lain di Kabupaten Paser menemukan bahwa pendapatan memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, artinya peningkatan penghasilan akan menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun dalam konteks ini, pendidikan tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut (Wardiansyah et al., 2016; Pramudjasi et al., 2019).

Faktor penting lainnya yang turut memengaruhi kemiskinan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peningkatan komponen dalam PDRB berkaitan erat dengan laju pertumbuhan ekonomi. Bila pertumbuhan ekonomi melambat, maka serapan tenaga kerja juga akan menurun. Sebaliknya, saat ekonomi berkembang dengan baik, maka lapangan kerja cenderung bertambah. Dalam penelitiannya, Dharmayanti (2011) menyimpulkan bahwa pertumbuhan PDRB di suatu wilayah akan mendorong perkembangan ekonomi, meskipun tidak selalu disertai dengan perubahan struktur ekonomi secara signifikan. Hal ini kemudian akan membuka peluang kerja baru. Putri et al. (2019) menambahkan bahwa PDRB berdasarkan harga konstan memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, terutama di wilayah DKI Jakarta.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh BPS menjadi salah satu ukuran dalam menilai sejauh mana pembangunan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. IPM menggambarkan kemampuan individu dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang untuk hidup lebih layak. Dalam kaitannya dengan teori modal manusia, pendidikan dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberikan keuntungan besar, termasuk peningkatan produktivitas, peluang kerja, dan penghasilan (Latifah, 2017).

Todaro dalam Dwi Mahroji (2019) mengungkapkan bahwa pembangunan manusia menjadi kunci dalam menciptakan kemajuan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kualitas pembangunan manusia yang tinggi akan membantu menekan angka kemiskinan di suatu daerah, terutama jika diukur melalui indikator seperti IPM.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dilakukan dengan mengangkat judul: "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Minahasa". Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah : a) Apakah Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Minahasa? b) Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Minahasa?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data empiris berdasarkan uraian masalah di atas: a) Untuk mengkaji dampak Upah Minimum Provinsi terhadap tingkat kemiskinan di Minahasa b) Untuk mengkaji bagaimana tingkat kemiskinan di Minahasa dipengaruhi oleh Indeks Pembangunan Manusia. Manfaat bagi kepentingan ilmiah dan praktis diharapkan dari temuan penelitian ini. Temuan penelitian ini, secara teori, harus digunakan dan dikutip untuk memajukan ilmu pengetahuan, khususnya tentang tingkat kemiskinan.

2. Tinjauan Pustaka

Tingkat Pengangguran

Istilah pengangguran digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang tidak sedang menjalankan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, baik karena belum mendapatkan pekerjaan, sedang mencari kerja, ataupun karena memiliki pekerjaan namun belum bisa melaksanakannya. Menurut Pujoalwanto (2014), pengangguran mencakup individu yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan, mereka yang aktif mencari pekerjaan, serta mereka yang hanya bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu. Bahkan, mereka yang berusaha mencari peluang kerja yang lebih baik pun masih termasuk dalam kategori ini. Artinya, pengangguran tidak selalu berarti tidak melakukan apa pun, tetapi juga menyangkut situasi di mana seseorang belum memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan harapannya.

Faktor utama yang melatarbelakangi munculnya pengangguran adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia. Ketika jumlah individu yang siap dan ingin bekerja lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang dapat menampung mereka, maka pengangguran pun tidak terhindarkan. Hal ini menjadi persoalan serius, karena setiap tahun, jumlah angkatan kerja—yakni mereka yang berusia produktif antara 15 hingga 64 tahun—terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang mampu menciptakan pekerjaan baru.

Latumaerissa (2015) menjelaskan bahwa pengangguran tidak hanya terbatas pada mereka yang aktif mencari pekerjaan, tetapi juga termasuk orang-orang yang sedang mencoba membangun usaha sendiri, maupun mereka yang tidak mencari kerja karena merasa tidak memiliki peluang atau menyerah akibat kesulitan dalam memperoleh pekerjaan. Selain itu, individu yang secara administratif sudah dinyatakan memiliki pekerjaan, namun pekerjaannya belum dimulai, juga digolongkan ke dalam kelompok penganggur. Ini menunjukkan bahwa definisi pengangguran sangat luas dan mencakup berbagai situasi ketenagakerjaan yang tidak stabil atau belum berjalan efektif.

Kategori khusus dalam pengangguran dikenal sebagai pengangguran terbuka, yaitu mereka yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, sedang aktif mencari kerja, atau sedang mempersiapkan diri untuk memulai suatu usaha namun belum menghasilkan pendapatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada tenaga kerja potensial yang belum terserap dalam aktivitas ekonomi. Sementara itu, angka kemiskinan terbuka menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) merupakan rasio antara jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan jumlah penduduk yang telah bekerja. Indikator ini sering digunakan untuk menggambarkan seberapa besar tantangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar melalui kegiatan kerja.

Seseorang dikatakan masuk dalam kategori pengangguran jika ia telah memasuki usia kerja, namun belum mendapatkan pekerjaan yang dapat memenuhi syarat produktivitas dan penghasilan. Situasi ini sangat umum terjadi di negara-negara berkembang, di mana pertumbuhan angkatan kerja lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja itu sendiri. Dalam banyak kasus, ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia kerja menjadi penyebab utama sulitnya pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Banyak individu yang memiliki latar belakang pendidikan, namun keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Ketidaksesuaian inilah yang menyebabkan peluang kerja yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pencari kerja.

Dengan demikian, persoalan pengangguran bukan hanya sekadar permasalahan tidak adanya pekerjaan, tetapi juga menyangkut berbagai aspek seperti ketersediaan kesempatan kerja, kualitas tenaga kerja, serta efektivitas program pelatihan dan pendidikan yang ada. Upaya untuk menekan angka pengangguran harus mencakup kebijakan yang tidak hanya fokus pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga pada peningkatan keterampilan, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi, dan pemberdayaan sektor informal sebagai alternatif sumber pendapatan masyarakat.

Upah Minimum

Pendapatan yang diterima oleh seseorang dari hasil kerjanya dalam suatu perusahaan atau lembaga dikenal dengan istilah gaji bersih. Gaji ini merupakan jumlah akhir yang diterima karyawan setelah dilakukan pemotongan atas kewajiban seperti pajak, iuran jaminan sosial, serta potongan-potongan lain yang berkaitan dengan aturan atau kesepakatan kerja. Gaji bersih tidak hanya mencerminkan imbalan atas hasil kerja, tetapi juga menunjukkan nilai riil yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Biasanya, jumlah ini diberikan secara periodik umumnya setiap bulan baik dalam bentuk uang tunai maupun dalam bentuk barang atau fasilitas yang memiliki nilai ekonomis, sesuai dengan ketentuan dan standar biaya hidup yang berlaku di daerah tempat karyawan tersebut bekerja. Selain itu, istilah lain yang sangat erat kaitannya dengan gaji adalah upah, yaitu sejumlah kompensasi yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada tenaga kerja sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Upah bisa diberikan berdasarkan satuan waktu (seperti harian atau bulanan), volume pekerjaan (seperti per unit), atau bentuk kontrak kerja tertentu yang disepakati bersama. Upah ini tidak selalu dalam bentuk uang saja, tetapi juga dapat berupa fasilitas tambahan, tunjangan untuk keluarga, atau bentuk kompensasi lainnya yang dianggap setara dengan nilai kerja yang diberikan oleh karyawan.

Secara hukum, definisi mengenai upah telah diatur dalam regulasi nasional. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tegas menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan/atau keluarganya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam hal pengupahan.

Fungsi dari upah atau gaji bukan hanya sekadar sebagai imbalan kerja, tetapi juga menjadi sumber penghidupan utama bagi tenaga kerja dan keluarganya. Oleh karena itu, penetapan upah harus mempertimbangkan beberapa aspek penting seperti biaya hidup layak, produktivitas, kelangsungan usaha, serta standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, perusahaan diwajibkan untuk memberikan gaji yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga adil dan mampu menjamin kesejahteraan pekerja. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks meningkatnya biaya hidup dan ketimpangan ekonomi yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat pekerja.

Di sisi lain, keberadaan upah yang layak juga berkontribusi terhadap stabilitas tenaga kerja dalam perusahaan. Karyawan yang merasa diperlakukan secara adil melalui sistem pengupahan yang transparan dan memadai cenderung memiliki motivasi kerja yang tinggi, loyal terhadap perusahaan, serta memiliki produktivitas yang lebih baik. Sebaliknya, gaji yang tidak sesuai dengan harapan atau standar kehidupan akan memicu ketidakpuasan, konflik industrial, bahkan meningkatkan potensi perpindahan kerja yang tinggi (*turnover*).

Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep gaji bersih dan upah sangat penting dalam mengelola hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan. Baik dari sudut pandang pekerja maupun pemberi kerja, kejelasan mengenai sistem pengupahan adalah fondasi utama dalam menciptakan keadilan dan efisiensi dalam dunia kerja.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu alat ukur penting yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana keberhasilan suatu wilayah atau negara

dalam menyediakan akses terhadap kebutuhan dasararganya. Menurut Badan Pusat Statistik (2018), IPM mencerminkan kualitas hidup masyarakat dari beberapa aspek utama seperti kesehatan, pendidikan, dan penghasilan. Melalui indeks ini, dapat dilihat bagaimana pembangunan yang dilakukan telah memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam menghitung IPM, sejumlah indikator pokok digunakan sebagai dasar. Misalnya, harapan hidup menjadi gambaran kondisi kesehatan masyarakat, sedangkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf mencerminkan kualitas serta keterjangkauan pendidikan. Selain itu, tingkat pendapatan riil per kapita juga menjadi bagian penting dalam mengukur kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dasar mereka (Putra, 2018). Ketiga aspek tersebut menyatu menjadi satu nilai indeks yang menggambarkan capaian pembangunan manusia secara menyeluruh di suatu wilayah. Pentingnya IPM tidak hanya sebagai statistik semata, tetapi juga sebagai alat evaluasi dan perencanaan pembangunan manusia secara lebih terarah dan adil.

Seperti dijelaskan oleh Latifah et al. (2017), tujuan IPM adalah untuk menciptakan ukuran yang dapat menunjukkan sejauh mana manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam hidupnya. Indikator-indikator yang digunakan dalam IPM dipilih secara cermat agar bisa mencerminkan kondisi riil masyarakat. Gabungan indikator-indikator tersebut disusun menjadi satu indeks terpadu sehingga mudah digunakan oleh pembuat kebijakan maupun lembaga evaluasi pembangunan.

Lebih lanjut, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menegaskan bahwa IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara di bidang kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak. Empat indikator utama yang digunakan untuk menyusun IPM adalah angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama pendidikan, serta daya beli masyarakat. Melalui indikator-indikator tersebut, pemerintah daerah maupun nasional dapat mengetahui apakah intervensi pembangunan telah membawa perubahan positif bagi masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, Marhaeni et al. (2008) menyatakan bahwa IPM dapat dijadikan sebagai cermin untuk menilai seberapa tinggi kesejahteraan yang telah dicapai oleh suatu masyarakat. Nilai IPM yang meningkat menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat juga meningkat. Bahkan, peningkatan IPM, terutama pada aspek pendidikan, diyakini mampu mendorong terciptanya generasi yang lebih cerdas dan kompetitif, yang pada akhirnya akan membantu menurunkan angka kemiskinan melalui peningkatan kemampuan kerja dan produktivitas masyarakat.

Dalam sudut pandang lain, Chairunnas (2018) menegaskan bahwa IPM terdiri dari tiga unsur utama yang mewakili dimensi penting dalam pembangunan manusia. Unsur pertama adalah usia harapan hidup yang menggambarkan kualitas layanan kesehatan. Unsur kedua adalah pengetahuan, yang diukur dari kombinasi antara rata-rata lama sekolah dan tingkat

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam sebuah penelitian berperan sebagai representasi abstrak yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang menjadi fokus kajian. Dengan menyusun kerangka ini, peneliti dapat memvisualisasikan bagaimana suatu masalah dianalisis berdasarkan keterkaitan antara faktor-faktor yang diyakini memiliki pengaruh terhadap suatu fenomena tertentu. Dalam konteks ini, peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh dari sejumlah variabel yang diduga berperan dalam menentukan tingkat kemiskinan, sebagaimana telah dirumuskan dalam hipotesis penelitian sebelumnya.

Langkah ini penting karena kerangka berpikir bukan hanya menyusun arah penelitian secara sistematis, tetapi juga memberikan gambaran teoretis mengenai bagaimana berbagai unsur dalam penelitian saling berinteraksi. Peneliti berupaya menelusuri alur sebab-akibat melalui pendekatan logis berdasarkan teori yang relevan, guna memahami lebih dalam bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan yang sedang dikaji.

Menurut pendapat para ahli, penyusunan kerangka konseptual memiliki peran strategis dalam menjembatani antara teori dan praktik empiris di lapangan (Latief, 2016). Artinya, melalui kerangka berpikir, peneliti tidak hanya menjelaskan konsep-konsep yang digunakan,

tetapi juga menegaskan posisi masing-masing variabel dalam peta hubungan yang logis. Hal ini akan sangat membantu pembaca, penguji, atau peneliti lain dalam memahami konteks masalah yang diteliti, termasuk arah analisis dan metode yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

Dengan demikian, keberadaan kerangka berpikir bukan sekadar pelengkap dalam penyusunan laporan ilmiah, melainkan sebagai pondasi intelektual yang menopang keseluruhan proses penelitian. Kerangka tersebut menjadi alat bantu yang sangat penting untuk menguraikan dan menelusuri berbagai isu yang ingin diselidiki secara mendalam. Maka, dalam merancang penelitian yang komprehensif dan terarah, kejelasan kerangka berpikir menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan.

Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal yang bersifat sementara dan dirumuskan sebagai langkah awal dalam menjawab permasalahan penelitian. Setelah peneliti mengidentifikasi pokok persoalan dan merumuskan dugaan teoretis, hipotesis ini disusun untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis. Menurut Sugiyono (2017), hipotesis tidak lain adalah pernyataan yang masih perlu dibuktikan, sehingga penelitian bertujuan untuk menemukan data yang dapat memperkuat atau menolak dugaan tersebut. 1. Variabel dependen (tingkat pengangguran) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen (upah). 2. Variabel dependen (tingkat pengangguran) dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen (IPM). 3. Variabel dependen (tingkat pengangguran) memiliki hubungan yang substansial dengan variabel independen (upah) dan IPM.

3. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu suatu metode yang berfokus pada pengumpulan dan pengolahan data berbasis angka sebagai alat untuk memahami dan menjelaskan hubungan antar variabel. Seperti dijelaskan oleh Sugiyono (2017), penelitian kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengubah informasi yang diperoleh di lapangan menjadi bentuk numerik yang selanjutnya dapat dianalisis dengan teknik statistik guna mendapatkan kesimpulan yang objektif. Data utama dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, sedangkan data pendukung dikumpulkan dari sumber lain yang relevan. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi sebagai sarana dalam menggali informasi yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa. penelitian ini di laksanakan antara bulan Agustus 2022 hingga November 2022.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana faktor-faktor tertentu memberikan pengaruh terhadap kondisi pengangguran di wilayah Kabupaten Minahasa. Dalam studi ini, dua aspek utama dijadikan sebagai variabel bebas, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingkat upah yang berlaku. Keduanya dianalisis untuk melihat bagaimana keterkaitannya terhadap tingkat pengangguran, yang berperan sebagai variabel terikat dalam penelitian. Pendekatan yang digunakan memungkinkan peneliti untuk mengkaji hubungan kuantitatif antar variabel guna mengetahui pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap fenomena pengangguran di daerah tersebut.

Pengaruh Upah terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel upah memberikan pengaruh negatif yang sangat kecil terhadap tingkat pengangguran. Berdasarkan hasil regresi, koefisien variabel upah tercatat sebesar $-1,749E-06$, dengan nilai statistik t sebesar 1,039 dan nilai signifikansi (p -value) sebesar 0,339. Artinya, setiap kenaikan upah sebesar satu satuan hanya berpotensi menurunkan tingkat pengangguran sekitar 0,0001749 persen. Namun, pengaruh ini tidak terbukti signifikan pada tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan upah tidak memberikan efek yang nyata terhadap penurunan pengangguran dalam konteks penelitian ini.

Temuan ini sesuai dengan hasil beberapa studi sebelumnya. Mukaromah et al. (2022) menyatakan bahwa upah minimum tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang secara implisit mengindikasikan bahwa peningkatan upah tidak otomatis berujung pada pengurangan angka pengangguran. Penelitian yang dipublikasikan oleh Jurnal UIN Alauddin Makassar (2023) juga menemukan bahwa upah minimum tidak memberikan dampak signifikan terhadap tingkat pengangguran di kalangan usia muda di Indonesia, yang mendukung temuan bahwa kenaikan upah belum tentu berdampak besar dalam mengatasi pengangguran. Selain itu, Jurnal Lembaga Kita (2023) melaporkan bahwa meskipun upah minimum berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran, hubungan tersebut tidak signifikan, sehingga kemungkinan ada variabel lain yang mempengaruhi hubungan tersebut namun tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Pengaruh IPM terhadap Tingkat Pengangguran

Analisis regresi yang dilakukan juga mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Koefisien regresi untuk IPM tercatat sebesar -0,131, dengan nilai t-hitung -0,233 dan nilai p sebesar 0,823. Ini menunjukkan bahwa peningkatan IPM sebesar satu satuan diperkirakan dapat menurunkan tingkat pengangguran sebesar 0,131 persen, namun perubahan tersebut tidak cukup kuat untuk dianggap signifikan pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian lain. Mukaromah et al. (2022) mengemukakan bahwa IPM tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang juga berarti bahwa kenaikan IPM tidak selalu berkorelasi dengan penurunan langsung tingkat pengangguran. Studi dari Jurnal UIN Alauddin Makassar (2023) mendukung temuan ini dengan hasil yang serupa, yaitu pengaruh IPM terhadap pengangguran bersifat negatif tetapi tidak signifikan. Penelitian yang dipublikasikan oleh Jurnal Universitas Bung Hatta (2023) juga menegaskan bahwa IPM tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di kalangan pemuda Indonesia, semakin memperkuat pemahaman bahwa hubungan antara IPM dan pengangguran tidak selalu kuat atau langsung.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap berbagai variabel yang diduga memengaruhi angka kemiskinan di Kabupaten Minahasa, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta pendapatan memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa upah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran. Upah yang rendah tidak selalu menjadi pemicu meningkatnya jumlah tenaga kerja yang masuk ke pasar kerja. Di sisi lain, biaya tenaga kerja yang lebih rendah justru bisa membuat perusahaan enggan menambah jumlah karyawan karena mereka lebih memilih efisiensi biaya. Hal ini menunjukkan bahwa peran upah dalam mempengaruhi pengangguran bersifat kompleks dan tidak dapat dipandang secara sederhana.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup aspek-aspek penting seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, juga ditemukan tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengangguran dalam penelitian ini. Wilayah yang memiliki IPM rendah biasanya berhadapan dengan angka pengangguran yang tinggi karena penduduknya cenderung memiliki keterampilan dan kualifikasi yang kurang memadai untuk mengisi berbagai lapangan pekerjaan (Latumaerissa, 2015). Dengan kata lain, rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama dalam mengurangi angka pengangguran.

Hubungan Upah dan IPM terhadap Pengangguran Secara keseluruhan, baik upah maupun IPM menunjukkan hubungan yang cukup erat dengan tingkat pengangguran. Khususnya, kenaikan upah minimum tanpa disertai Kesimpulan peningkatan produktivitas

perusahaan berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran karena perusahaan akan menahan jumlah pekerja untuk mengendalikan biaya produksi. Sebaliknya, IPM yang tinggi, yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, umumnya dapat menekan angka pengangguran melalui peningkatan kemampuan dan kesiapan tenaga kerja (BPS, 2019).

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian maupun kebijakan ke depan antara lain:

Pendalaman Analisis Pengaruh Upah dan IPM terhadap Pengangguran Diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam untuk menggali secara detail mekanisme bagaimana upah dan IPM memengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Minahasa. Analisis yang lebih komprehensif akan membantu memahami faktor-faktor yang mungkin belum tergal dalam penelitian ini.

Pengembangan Kebijakan Pengurangan Pengangguran. Berdasarkan hasil kajian, perlu adanya kebijakan yang fokus pada peningkatan keterampilan dan kualifikasi tenaga kerja melalui program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, kebijakan terkait upah harus dirancang agar dapat menciptakan insentif yang seimbang antara pekerja dan perusahaan, sehingga tidak menimbulkan efek negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penggunaan Data Terbaru dan Akurat. Agar penelitian dan kebijakan yang dirancang dapat relevan dan efektif, sangat disarankan untuk menggunakan data yang paling mutakhir dan valid. Data terbaru akan membantu menangkap dinamika kondisi ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung serta menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Aisyah, & Prawoto, N. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung (Periode 2009-2015). *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 1(1), 1-7.
- Pertiwi, A., & Novianti, W. (2018). *Pengaruh biaya produksi dan modal kerja terhadap laba bersih pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016*.
- Anggraini, Y. (2018). *Kebijakan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia*. Jakarta: INDOCAMP.
- Bagus, Y. S. O., Anak Agung, & Widanta, P. (n.d.). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten/kota, dan pengeluaran pemerintah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali.
- Bastian, I. (2016). *Strategi manajemen sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). BPS: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). *Tana Toraja dalam angka tahun 2023*.
- Cahyani, G. F. (2016). Pengaruh kualitas produk, kualitas pelayanan, dan harga terhadap kepuasan konsumen. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 5(3), 1-15.
- Chairunnas. (2018). Pengaruh penduduk usia produktif, zakat, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Damanhuri, D. S., & Muhammad, F. (2014). *Masalah dan kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia*. Bogor: IPM.
- Diniyah, H., & Perдини Fisabilillah, L. W. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia. *Independent: Journal of Economics*, 2(2), 155-168.
- Firdhania, R., & Muslihatinningsih, F. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 117-121.
- Fitri, & Junaidi. (2016). *Pengaruh pendidikan, upah, dan kesempatan kerja terhadap tingkat pengangguran*.

- Ghozali, I. (2014). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS (6th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halirafi, C., Anwar, K., & Abdy Yusuf, M. (2020). Pengaruh angka harapan hidup (AHH) dan konsumsi per kapita terhadap pengangguran. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Haryanti, A. S. (2018). Penggunaan media gambar dan media radio pada pembelajaran menulis deskripsi siswa kelas X SMA Tunas Harapan Balarajatanggerang. *Jurnal Kredo*, 1(2), 14-25.
- Hilmi, M. N. H. D., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20–27.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2).
- Khatimah, H. (2018). Posisi dan peran media dalam kehidupan masyarakat. *Tasamuh*, 16(1), 119–138.
- Kuncoro, H. (2022). Upah sistem bagi hasil dan penyerapan tenaga kerja. *Economic Journal of Emerging Markets*, 7(1).
- Lamatenggo, O. F., Walewangko, E. N., & Layuck, I. A. (2019). Pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap pengangguran di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(2), 162–172.
- Latifah Husain, S.Pd. (2017). *Profesi keguruan menjadi guru profesional*. Pustaka Baru Press.
- Latifah, L., et al. (2017). *Efektivitas self management module dalam mengatasi morning sickness*.
- Latumaerissa, J. R. (2015). *Perekonomian Indonesia dan dinamika ekonomi global*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Medika.
- Mangirang, G. S., Masinambow, V. A. J., & Masloman, I. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(10), 13-24.
- Mankiw, G. N. (2003). *Teori makro ekonomi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Marhaeni, et al. (2008). *Indeks pembangunan manusia tahun 2006-2007*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sunarni. (2017). Pengaruh belanja daerah terhadap pembangunan manusia Kabupaten/Kota Se-Indonesia. *Jurnal*.
- Marliana, L. (2022). Analisis pengaruh indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum terhadap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 87-91.
- Martono, R. V. (2019). *Analisis produktivitas dan efisiensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latifah, N., Rotinsulu, D. C. H., & T., R. L. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat pengangguran terbuka dan dampaknya pada jumlah penduduk miskin di Kota Manado. *Jurusan Ekonomi Pembangunan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado, 17.
- Niswan, E., Rawa, R. D., & D. (2021). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan tingkat pengangguran terhadap penduduk miskin di Kabupaten Bengkayang. *Fakultas Ekonomi, Universitas Panca Bhakti*, 7(2).
- Nurdiana, H. M., Arisah, N., Riesso, A. S., & Hasanah, D. F. (2020). *An analysis of the effect of economic growth, inflation, and open unemployment on poverty in South Sulawesi Province*. *Quest Journal: Journal of Research in Business and Management*, 8(9), 14–17.
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). Pengaruh inflasi, IPM, UMP, dan PDRB terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1113-1132.
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia: tinjauan historis, teoritis, dan empiris*. Graha Ilmu.

- Putri, et al. (2019). *Laporan hasil pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat di SDN 12 Sesetan, Denpasar Selatan tahun 2019*. Laporan Pelayanan Asuhan: Poltekkes Kemenkes Denpasar.
- Rabbani, A. S., & Hasmarini, M. I. (2024). Analisis pengaruh tingkat partisipasi angkatan kerja, indeks pembangunan manusia, upah minimum, dan jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat tahun 2017–2021. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(5), 4537-4543.
- Sukirno, S. (2016). *Makro ekonomi teori pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Safitri, A. (2018). Pengaruh pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap opini going concern. *Vol. 1, Hal. 2, ISSN: 0189-8939*.
- Sholeh, M. (2007). Permintaan dan penawaran tenaga kerja serta upah: Teori serta beberapa potret di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 4(1).
- Wardiansyah, et al. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran: Studi kasus provinsi-provinsi se-Sumatera. *Jurnal Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan*, 5(1), 2303-1220.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169-176.

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE 2007-2021

Sastriana Sagala¹, Merry C.N. Rumagit², Natalia A Malau³

^{1,2,3}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado
e-mail: sastrianasagala@gmail.com, Merryrumagit@unima.ac.id, Nataliamalau@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Menggunakan data sekunder pada rentang waktu antara tahun 2007 sampai 2021. Sumber informasi yang diambil dari badan pusat statistik dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode analisis yang di pakai adalah regresi berganda agar dapat mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil penelitian ini menunjukkan pendapatan asli daerah (X1) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum (X2) berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan

Abstract

This research aims to analyze the influence of local revenue and general allocation funds on economic growth in North Sulawesi Province. It uses secondary data from the period from between 2007 and 2021. The sources information are obtained from the central statistics agency and academic works related this research. The analysis method used is multiple regression to determine the magnitude of the effect of independent variables on the dependent variable. The results of this study indicate that local revenue (X1) has a significant negative impact on economic growth, while general allocation funds (X2) have a significant positive impact on economic growth. Both local Revenue and general allocation funds simultaneously affect economic growth.

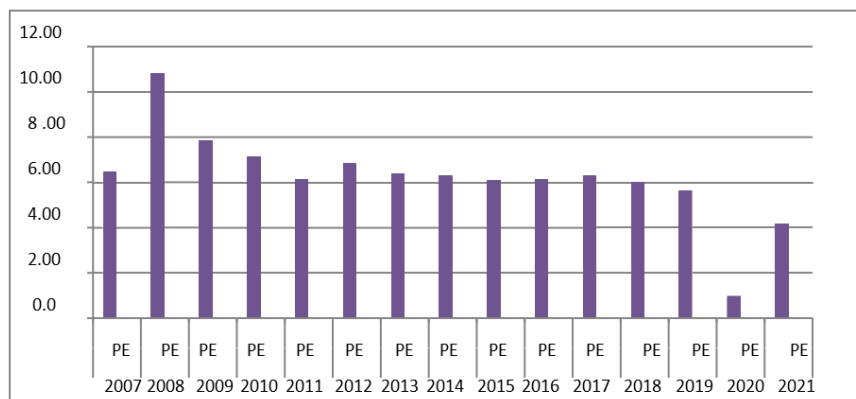
Keywords: Original Regional Revenue, General Allocation Fund, Economic Growth.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan kemampuan ekonomi suatu negara atau wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu faktor penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017). Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi suatu negara menuju struktur perekonomian yang lebih baik, yang tidak dilihat dari perspektif ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional suatu perekonomian yang tercermin dalam pendapatan nasional tanpa melihat kenaikan pertumbuhan penduduk dan struktur ekonomi. Akan tetapi, adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara menjadi indikator adanya keberhasilan pembangunan ekonomi dalam waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi merupakan landasan dari pembangunan berkelanjutan, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan manusia melalui pertumbuhan ekonomi termasuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan perawatan kesehatan, dan membangun fasilitas untuk mendorong investasi dalam dan luar negeri (Saad & Kamel, 2009). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh sebab itu, setiap daerah selalu menetapkan target

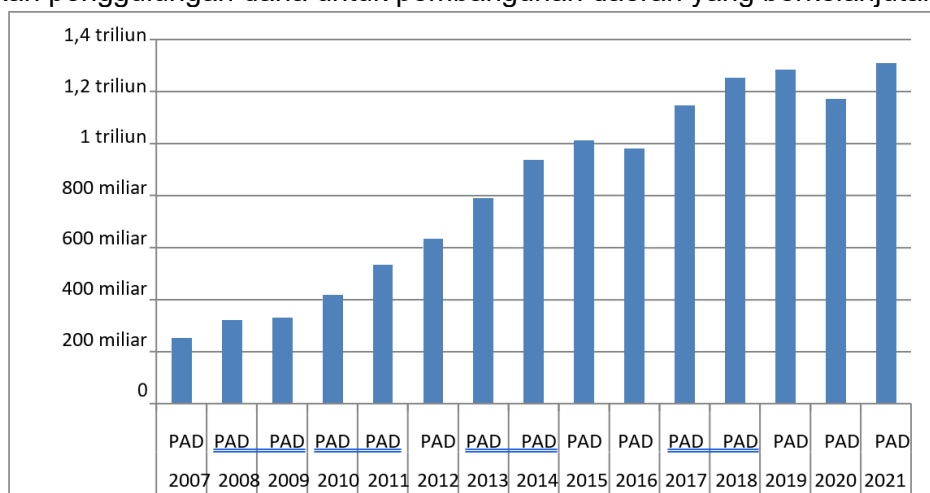
tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di dalam perencanaan dan tujuan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi.



Gambar 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007 – 2021
(Sumber: BPS, diolah)

Dari gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 10,86%, dan pada tahun 2020 menurun menjadi hanya sebesar 0,99% akibat masalah pandemi Covid-19 yang juga melanda Provinsi Sulawesi Utara pada waktu tersebut. Artinya, terjadi fluktuasi penurunan angka pada periode tersebut yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19, yang telah menyebabkan aktivitas perekonomian masyarakat pada umumnya mengalami penurunan secara riil, yang berdampak pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sulawesi Utara.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah seperti pajak, retribusi, dan hasil usaha daerah. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, setiap daerah membutuhkan dana yang tidak hanya bersumber dari APBN saja, tetapi juga bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi yang dapat menciptakan penggulangan dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

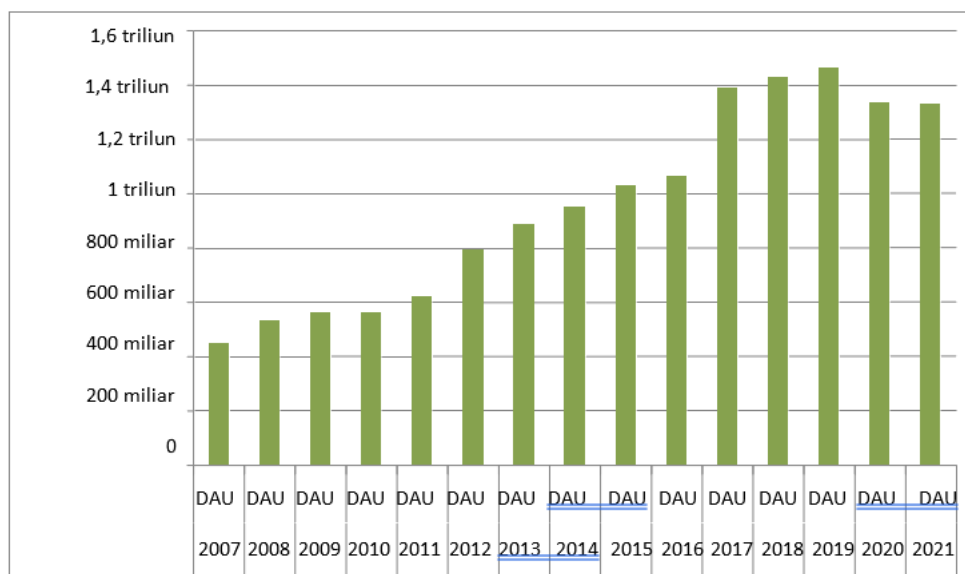


Gambar 2 Jumlah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2021
(Sumber: BPS, diolah)

Dari gambar 2 di atas, secara keseluruhan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2007 hingga 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2007, PAD Provinsi Sulawesi Utara baru mencapai angka di atas miliaran rupiah, yaitu

Rp 253,3 miliar, sementara pada tahun 2021 sudah melampaui satu triliun rupiah, yakni sebesar Rp 1,31 triliun. Namun, pada tahun 2020 sempat turun menjadi hanya Rp 1,17 triliun, dari tahun sebelumnya (2019) yang tercatat sebesar Rp 1,18 triliun. Dengan demikian, fluktuasi perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara hanya terjadi penurunan pada tahun 2020, karena pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali pada PAD.

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.



Gambar 3 Dana Alokasi Umum Provinsi Sulawesi Utara tahun 2007-2021 (Sumber: BPS, diolah)

Dari gambar 3 di atas menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007 sebesar Rp 447,1 miliar, yang merupakan penerimaan paling rendah, sementara pada tahun 2015 mencapai triliunan rupiah, yaitu Rp 1,03 triliun. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 1,46 triliun, yang merupakan angka tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2021, Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan lagi, yang diperkirakan sebagai dampak dari tahun kedua pandemi Covid-19 yang melanda Provinsi Sulawesi Utara.

Masalah penting yang mendasari penelitian ini adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara yang tidak konsisten, atau terjadi pergeseran peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya masalah terkait pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Inilah yang menjadi dasar permasalahan utama dalam penelitian ini, dan peneliti berusaha untuk melihat permasalahan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dengan mengaitkannya dengan pengaruh faktor Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

2. Tinjauan Pustaka

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestik regional bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Raharjo, 2013). Tingkat pertumbuhan pendapatan nasional yang sebenarnya harus dihitung menurut harga tetap.

Dengan demikian, dalam pengertian pendapatan per kapita berarti pendapatan rata-rata tiap penduduk suatu negara. Apabila pertumbuhan pendapatan nasional pada tahun tertentu lebih kecil daripada pertumbuhan penduduk, maka pertumbuhan ekonomi tersebut akan terjadi apabila tingkat pendapatan nasional yang dihitung menurut harga tetap lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional tanpa melihat kenaikan pertumbuhan penduduk dan struktur ekonomi. Akan tetapi, adanya pertumbuhan ekonomi di suatu negara menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dalam waktu tertentu (Malau, 2022).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima suatu daerah dari sumber potensi kekayaan lokal dan ditetapkan melalui peraturan daerah yang berlaku tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar tersebut (Aries, 2012). Salah satu usaha untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam hal keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat adalah dengan melihat struktur pendapatan daerah yang ada. Semakin besar luas komposisi pendapatan asli daerah, semakin besar kapasitas pemerintah daerah untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar.

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti provinsi, kabupaten, maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing, dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ialah komponen pendapatan daerah yang pengelolaannya diambil alih oleh badan usaha milik daerah (BUMD).

d. Pendapatan Lain-Lain yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah dimaksudkan dalam mendeskripsikan pemasukan daerah yang bukan tergolong ke dalam kategori pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, 2017). Tujuan dana alokasi umum adalah memberikan dana yang memadai kepada pemerintah daerah untuk mampu menerapkan kewajibannya. Penggunaan dana alokasi umum (DAU) sebagai terjemahan tanpa syarat ditentukan oleh daerah itu sendiri.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan cara pengkajian yang berlandaskan pada pendekatan positif atau data kongkret (Sugiono, 2018). Data penelitian ini berupa angka yang diukur dengan menggunakan alat statistik untuk menguji perhitungan yang berkaitan dengan persoalan guna mencapai atau menemukan suatu kesimpulan.

Definisi Operasional Variabel:

Pendapatan Asli Daerah (X1) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Satuan yang digunakan adalah rupiah triliun.

Dana Alokasi Umum (X2) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Satuan yang digunakan adalah triliun rupiah.

Pertumbuhan Ekonomi (Y) merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Satuan yang digunakan adalah persen (%).

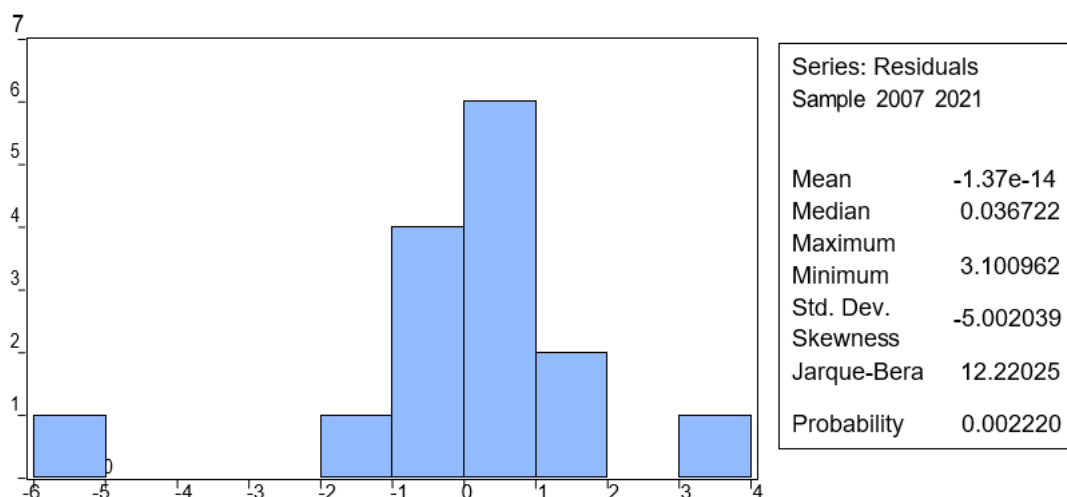
4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Uji Normalitas Data

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengevaluasi apakah data yang disajikan dalam penelitian tergolong normal atau tidak normal (Ghozali, 2018). Tes yang digunakan adalah tes Jarque-Bera. Kriteria pengujian normalitas Jarque-Bera adalah sebagai berikut:

1. Apabila signifikansi $\geq 0,05$, maka data tergolong normal.
2. Apabila signifikansi $\leq 0,05$, maka data tidak tergolong normal.



Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan tes Jarque-Bera menunjukkan nilai probabilitas $0,00220 \leq 0,05$, maka diputuskan bahwa data tergolong tidak normal.

Uji Multikolinearitas

Tujuan pengujian multikolinearitas adalah untuk mengevaluasi hubungan antar variabel independen dalam bentuk regresi, untuk membuktikan ada atau tidak adanya multikolinearitas dengan menggunakan faktor inflasi varians (VIF) toleransi. Nilai toleransi minimum sebanding dengan nilai $VIF = 1/\text{toleransi}$. Nilai toleransi $\leq 0,10$ atau nilai $VIF \geq 10$ merupakan jumlah skor batas yang menyatakan ada atau tidaknya multikolinearitas (Ghozali, 2018).

1. Apabila nilai toleransi $\leq 0,10$ dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≥ 10 , berarti data yang diuji mengandung multikolinearitas.
2. Apabila nilai toleransi $\geq 0,10$ atau nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10 , berarti data yang diuji tidak mengandung multikolinearitas.

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.245026	1.075497	NA
DAU	1.95E-17	2190362.	2037785.
PAD	2.61E-17	2190342.	2037785.

Hasil Uji Multikolinearitas dengan nilai faktor inflasi varians (Variance Inflation Factor) variabel PAD (X1) sebesar $2,037785 \leq 10$ dan nilai Variance Inflation Factor DAU (X2) sebesar $2,037785 \leq 10$, maka diputuskan bahwa tidak ada multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat ketimpangan varians pada bentuk regresi dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila varians dari residual pengamatan dengan pengamatan yang lain konstanta, maka terjadi heteroskedastisitas, dan apabila berbeda, terjadi heteroskedastisitas. Uji Glejser digunakan untuk mengevaluasi heteroskedastisitas, yaitu mencari nilai mutlak kesalahan pengganggu terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

1. Heteroskedastisitas tidak ada jika nilai signifikansinya $\geq 0,05$.
2. Jika tingkat signifikansinya $\leq 0,05$, maka terdapat heteroskedastisitas.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.044376	0.391743	2.665974	0.0206
DAU	5.71E-10	3.49E-09	0.163379	0.8729
PAD	-6.63E-10	4.05E-09	-0.163860	0.8726

Hasil dari uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser menunjukkan nilai probability variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar $0,8729 \geq 0,05$ dan nilai probability variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar $0,8729 \geq 0,05$, maka dapat diputuskan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi adalah untuk mengevaluasi adanya koneksi antar residual pada jangka waktu t dengan residual pada jangka sebelumnya, yang terbentuk akibat adanya koneksi antara runtun waktu (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui apakah terdapat autokorelasi, dilakukan pengujian Breusch-Godfrey.

1. Apabila signifikansi $\geq 0,05$, maka data yang diuji tidak terjadi autokorelasi.
2. Data yang diuji terdapat autokorelasi residual jika signifikansi $\leq 0,05$.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.038630	Prob. F(2,10)	0.9622
Obs*R-squared	0.115000	Prob. Chi-Square(2)	0.9441

Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square (2) sebesar $0,9441 \geq 0,05$, maka diputuskan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Model regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 6.21177966148 + 9.7118183583e-05 * DAU - 1.1244780870e-08 * PAD$$

- Nilai koefisien konstanta sebesar 6211,780 atau 621,178%. Ini dapat diartikan bahwa tanpa adanya variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Alokasi Umum (X2), akan terjadi peningkatan sebesar 621,178%.
- Nilai koefisien beta variabel Dana Alokasi Umum (X2) sebesar -9.711818 atau -971,181%. Ini berarti jika nilai variabel DAU konstan dan variabel (X2) mengalami peningkatan 1%, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 971,118%.
- Nilai koefisien beta variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar -1124,478 atau -112,447%. Ini berarti apabila nilai variabel PAD konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar -112,447%.

Uji Parsial

Pengujian regresi parsial ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel terikat (Ghozali, 2018). Pengujian ini akan membandingkan jumlah t-hitung setiap variabel bebas serta jumlah tabel dengan error 5% ($\alpha = 0,05$). Kriteria dalam uji t:

- Apabila nilai signifikansinya $\geq 0,05$, maka tidak ada pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat.
- Pengaruh signifikan secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat apabila nilai signifikansinya $\leq 0,05$.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.211780	0.495001	12.54903	0.0000
DAU	9.71E-09	4.41E-09	2.199852	0.0481
PAD	-1.12E-08	5.11E-09	-2.199881	0.0481

- Hasil analisis regresi secara parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas Pendapatan Asli Daerah (X1) sebesar $0,0481 \leq 0,05$, maka H_01 tidak disetujui dan H_{a1} disetujui, yang berarti Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Hasil analisis regresi secara parsial menunjukkan bahwa nilai probabilitas Dana Alokasi Umum (X2) sebesar $0,0481 \leq 0,05$, maka H_02 tidak disetujui dan H_{a2} disetujui, yang berarti Dana Alokasi Umum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Simultan

Pengujian F bertujuan untuk menguji seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam regresi memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat atau dependen (Ghozali, 2018). Kriteria dalam pengujian F:

- Apabila signifikansi $F \geq \alpha$ (0,05), maka H_0 disetujui, sehingga tidak signifikan, yang berarti seluruh variabel bebas simultan tidak mempengaruhi variabel terikat.
- H_0 tidak disetujui apabila nilai signifikansi $F \leq \alpha$ (0,05), sehingga signifikan, yang berarti seluruh variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat.

R-squared	0.287459
Adjusted R-squared	0.168703
S.E. of regression	1.848617
Sum squared resid	41.00863
Log likelihood	-28.82707
F-statistic	2.420572
Prob(F-statistic)	0.130875

Hasil pengujian simultan secara bersama-sama menunjukkan bahwa nilai probabilitas F sebesar $0,130875 \geq 0,05$, maka H_0 3 disetujui dan H_a 3 tidak disetujui. Artinya, variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Uji Determinasi (R^2)

Pengujian determinasi menunjukkan bagaimana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel bebas. Jumlah pada koefisien determinasi berada antara nol hingga satu (Ghozali, 2018). Nilai Adjusted R^2 digunakan untuk memperkirakan nilai koefisien determinasi, yaitu $0 \leq R^2 \leq 1$.

1. Jika $R^2 = 0$, berarti model regresi tidak sempurna, karena variabel bebas tidak dapat menjelaskan variasi variabel terikatnya.
2. Regresi dianggap sempurna jika $R^2 = 1$, yang berarti variabel independen dapat menjelaskan seluruh variasi pada variabel terikatnya.
3. Kemungkinan besar model regresi hampir dapat menjelaskan seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen jika R^2 mendekati 1.

R-squared	0.287459
Adjusted R-squared	0.168703
S.E. of regression	1.848617
Sum squared resid	41.00863
Log likelihood	-28.82707
F-statistic	2.420572
Prob(F-statistic)	0.130875

Nilai pengujian Adjusted R-Squared pada penelitian di atas sebesar 0,168703 atau 16,8708%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X_1) dan Dana Alokasi Umum (X_2) mampu menggambarkan variabel pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar 16,8708%, sementara sisanya yaitu 83,1292% dijelaskan oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial (uji t) sebelumnya menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0,0481 \leq 0,05$. Hasil tersebut menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartini Katrina Mamuka, Ita Pingkan, dan Jacline L. Samuel (2019), yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengujian yang telah dilakukan di atas menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,0481 \leq 0,05$. Hasil tersebut menandakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, Dana Alokasi Umum yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Utara memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Virgina Laloan, O. Esry H. Laoh, dan Cariline B. D. Pakasi (2018), yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji F, yaitu uji simultan X1 (PAD) dan X2 (DAU) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y (pertumbuhan ekonomi) dipengaruhi nilai F sebesar $2,420472 \geq F$ tabel. Demikian nilai signifikansinya (nilai probabilitas) sebesar $0,130875 \geq 0,05$, artinya bahwa secara simultan X1 (PAD) dan X2 (DAU) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Dengan demikian, berdasarkan hasil analisis regresi di atas, Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Tasya A. Makawaehe, Eeen N. Walewangko, dan Jacline L. Samuel (2023), yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Suatu daerah dikatakan mampu mengontrol dan menjalankan daerahnya sendiri dapat dilihat dari tingkat pendapatan yang diterima oleh daerah tersebut. Tingginya Pendapatan Asli Daerah maka dapat dikatakan daerah tersebut mampu secara mandiri membangun pertumbuhan daerahnya sendiri.
- Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum yang diterima provinsi mampu berkontribusi secara nyata dalam peningkatan pembangunan sebagai sarana prasarana peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Hal tersebut menandakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama mampu berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu lebih mengoptimalkan lagi potensi-potensi yang ada di provinsi sebagai pemasukan Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi yang tepat sehingga dapat memperbaiki pelayanan wajib pajak agar mau membayar secara sukarela, meningkatkan jumlah tenaga pemeriksa pajak, melakukan sosialisasi dan edukasi secara rutin untuk meningkatkan kesadaran atas pentingnya membayar pajak, dan menguatkan moral integritas pegawai pajak dalam menjalankan tugas secara profesional.
- Sebaiknya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari waktu ke waktu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga ketergantungan pada Dana Alokasi Umum makin berkembang.
- Peneliti berharap kepada peneliti berikutnya untuk menyempurnakan penelitian ini supaya memperbanyak variabel yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi serta menambahkan tahun agar meningkatkan hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Arie, S. D. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. (n.d.). *Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Menurut Jenis Pendapatan*. <https://sulut.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njlylzl=/realisasi-pendapatan-daerah-pemerintah-provinsi-sulawesi-utara-menurut-jenis-pendapatan.html>

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007-2021*.
- Dedi, N. (2017). *Anggaran di Suatu Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (Edisi semilan). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kolinug, F. C. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara. *E-Journal*.
- Murniarti. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2007-2017. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis*.
- Muhammad, R. R. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam di Provinsi Aceh. *E-Journal*.
- Olvy, B. T., Paulus, K., & Rosalina, A. K. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Manado. *E-Journal*.
- Parasan, P. M., Kindangen, P., & Kawung, G. (2018). Analisis Pengaruh Industri Kecil, Menengah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara. *E-Journal*.
- Rambling, Y. S., Kaluwur, A. F., & Rawung, S. S. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Suku Bunga dan Non-Performing Loan terhadap Penyaluran Kredit UMKM di Bank Sulutgo. *E-Journal*.
- Roring, G. D. J., Rumagit, M. C. N., & Malau, N. A. (2023). Analisis Spillover Effect Pertumbuhan Ekonomi Kota dan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara (Manado, Bitung, Minahasa, Minahasa Utara). *E-Journal*.
- Saad, W., & Kalakech, K. (2009). The nature of government expenditure and its impact on sustainable economic growth. *Middle Eastern Finance and Economics*, 4, 1450-2889.
- W, A. S. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta. *E-Journal*.

PEMBERDAYAAN USAHA IKAN ASIN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN DI DESA PASALAE KECAMATAN GENTUMA RAYA KABUPATEN GORONTALO UTARA

Siska Efita Salintih¹, Tinneke. E. M. Sumual², Gaby D. J. Roring³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado

e-mail: siskasalintihoka@gmail.com, tinnekesumual@unima.ac.id,
gabydjoring@unima.ac.id

ABSTRAK

Usaha perdagangan ikan asin di Desa Pasalae telah berkembang selama 20 tahun dan telah menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan, menganalisis pelaksanaan program, serta mengevaluasi hasil dan dampak dari pemberdayaan usaha ikan asin di wilayah tersebut. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif yang mengandalkan teknik pengumpulan data seperti pengamatan, wawancara mendalam, serta dokumentasi. Temuan dari penelitian mengindikasikan bahwa pelaku usaha sangat membutuhkan pelatihan teknis berkelanjutan, dukungan alat produksi, penguatan kelembagaan, serta akses pasar yang lebih luas. Program pemberdayaan yang dilaksanakan rutin 2–4 kali per bulan dan diikuti oleh 20–25 peserta per sesi, mampu meningkatkan keterampilan, efisiensi produksi, kualitas produk, serta memperluas jangkauan pasar. Dampak dari program ini mencakup peningkatan kapasitas produksi, kemampuan manajerial, serta adaptasi terhadap pemasaran digital. Kesimpulannya, pemberdayaan usaha ikan asin di Desa Pasalae memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha dan kesejahteraan pelaku usaha lokal.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Usaha, Pendapatan Nelayan*

ABSTRACT

The salted fish trading business in Pasalae Village has grown for 20 years and has become one of the important sectors in supporting the economy of coastal communities. This study aims to identify empowerment needs, analyze program implementation, and evaluate the results and impacts of empowering salted fish businesses in the area. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, in-depth interviews, and documentation. The results of the study indicate that business actors are in great need of continuous technical training, support for production tools, institutional strengthening, and wider market access. The empowerment program, which is carried out routinely 2-4 times per month and attended by 20-25 participants per session, is able to improve skills, production efficiency, product quality, and expand market reach. The impact of this program includes increasing production capacity, managerial skills, and adaptation to digital marketing. In conclusion, empowering salted fish businesses in Pasalae Village has made a significant contribution to increasing business capacity and the welfare of local business actors.

Keywords : *Empowerment, Business, Fishermen's Income*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi pembangunan yang menempatkan penduduk sebagai pelaku utama untuk mengelola potensi lokal. Salah satu bentuk pemberdayaan yang penting adalah pengembangan kemampuan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berfokus pada sumber daya setempat, seperti usaha ikan asin di Desa Pasalae. Desa ini terletak di wilayah pesisir yang memiliki potensi kelautan cukup besar, termasuk hasil tangkapan ikan yang menjadi bahan baku utama pembuatan ikan asin.

Selama dua dekade terakhir, perdagangan ikan asin di desa ini telah menjadi salah satu sumber pendapatan utama penduduk. Namun, tantangan seperti keterbatasan alat produksi, kurangnya pelatihan, akses pasar yang sempit, serta lemahnya manajemen usaha menjadi hambatan dalam pengembangan usaha ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang komprehensif guna mengetahui sejauh mana pemberdayaan telah dilakukan, apa saja kebutuhannya, serta bagaimana dampaknya terhadap pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti menyusun judul penelitian ini sebagai berikut: ***“Pemberdayaan Usaha Ikan Asin Dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara”***.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan informasi yang telah diuraikan, masalah yang terdapat dalam studi ini dapat dikenali sebagai berikut:

1. Untuk melihat kebutuhan pemberdayaan di Desa Pasalae.
2. Untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan Pemberdayaan usaha ikan asin di Desa Pasalae saat ini.
3. Untuk melihat bagaimana hasil dan dampak dari pemberdayaan.

Pembatas Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada pendapatan para nelayan di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara.

Tujuan Penelitian

Melihat apa saja kebutuhan pemberdayaan, bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan usaha ikan asin di Desa Pasalae, dan bagaimana hasil dan dampak dari pemberdayaan.

Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam aspek pemberdayaan ekonomi serta usaha kecil yang dimiliki oleh para nelayan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi mengenai pendekatan pemberdayaan serta pengelolaan usaha mikro di sektor perikanan, khususnya pengolahan ikan asin.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi:

1. Nelayan: Memberikan panduan mengenai cara meningkatkan kualitas produk ikan asin, akses pasar, dan manajemen usaha, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.
2. Pemerintah Daerah: Menjadi acuan dalam merancang kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat pesisir, khususnya di Desa Pasalae, untuk mendukung pengembangan usaha perikanan.

TINJAUAN PUSTAKA**Hakikat Pemberdayaan**

Pemberdayaan Masyarakat, adalah proses peningkatan kemampuan dan potensi masyarakat agar dapat mengontrol dan mempengaruhi keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. ini melibatkan pemberian sumber daya, pengetahuan, dan keterampilan, serta mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan. Menurut Fatchudin dan Santoso (2022) pemberdayaan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi individu atau kelompok untuk mengelola serta mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Pemberdayaan usaha bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, akses terhadap sumber daya, dan penguatan kelembagaan usaha. pemberdayaan ini sering kali melibatkan berbagai pendekatan, seperti pelatihan, pendampingan teknis, serta peningkatan akses pasar dan sumber daya finansial untuk pelaku usaha kecil serta menengah. Hal ini diharapkan mampu mendorong mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan

ekonomi. Lebih lanjut, pemberdayaan usaha tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kapasitas teknis, tetapi juga peningkatan daya saing produk di pasar.

Dalam konteks pemberdayaan usaha kecil, penting untuk memperhatikan strategi pemasaran yang efektif serta adaptasi terhadap teknologi modern. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk, sehingga pelaku usaha dapat mengakses pasar yang lebih luas dan kompetitif. Dengan demikian, pemberdayaan usaha harus mencakup aspek teknologi dan inovasi untuk menghadapi tantangan persaingan pasar global. Salah satu aspek penting dari pemberdayaan usaha adalah akses terhadap permodalan yang memadai (Hidayat, 2022).

Tujuan Pemberdayaan

Menurut Wibisono (2021: 56), tujuan utama pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan komunitas, terutama bagi kelompok yang lemah yang merasa tidak memiliki kekuatan. Ketidakmampuan ini dapat dipicu oleh faktor dari dalam, seperti pandangan negatif individu terhadap mereka, atau oleh faktor dari luar, seperti penindasan yang dihasilkan oleh sistem sosial yang tidak adil. Untuk memahami konsep pemberdayaan secara lebih komprehensif, penting untuk menganalisis kelompok lemah dan bentuk ketidakberdayaan yang mereka alami dalam konteks sosial-ekonomi.

Menurut Rahmawati (2020: 43), beberapa sasaran dalam memberdayakan penduduk kurang mampu di lingkungan perkotaan, yaitu:

- a) Memperbaiki aspek lingkungan, baik secara fisik, infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
- b) Pemberdayaan ditujukan untuk membangkitkan potensi atau kreativitas warga yang bermanfaat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka.
- c) Selain itu, pemberdayaan juga bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam menciptakan dan meningkatkan sumber penghasilan, sehingga stabilitas ekonomi keluarga lebih terjamin.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang signifikan berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Bank Dunia mensyaratkan beberapa persyaratan yang harus disiapkan untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan, di antaranya:

- a) Peningkatan modal finansial, contohnya dalam manajemen fiskal dan perencanaan ekonomi secara keseluruhan.
- b) Peningkatan modal fisik, seperti penyediaan infrastruktur dan fasilitas.

- c) Peningkatan modal sumber daya manusia, misalnya dengan pengembangan di sektor pendidikan.
- d) Pengembangan modal sosial, termasuk peningkatan keterampilan masyarakat, kolaborasi atau kemitraan, penguatan lembaga, serta aspek-aspek yang berhubungan dengan norma sosial.
- e) Pengelolaan sumber daya alam, mencakup pengelolaan air, limbah industri, dan lain-lain.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2017) tujuan dari pemberdayaan mencakup berbagai inisiatif perbaikan, antara lain:

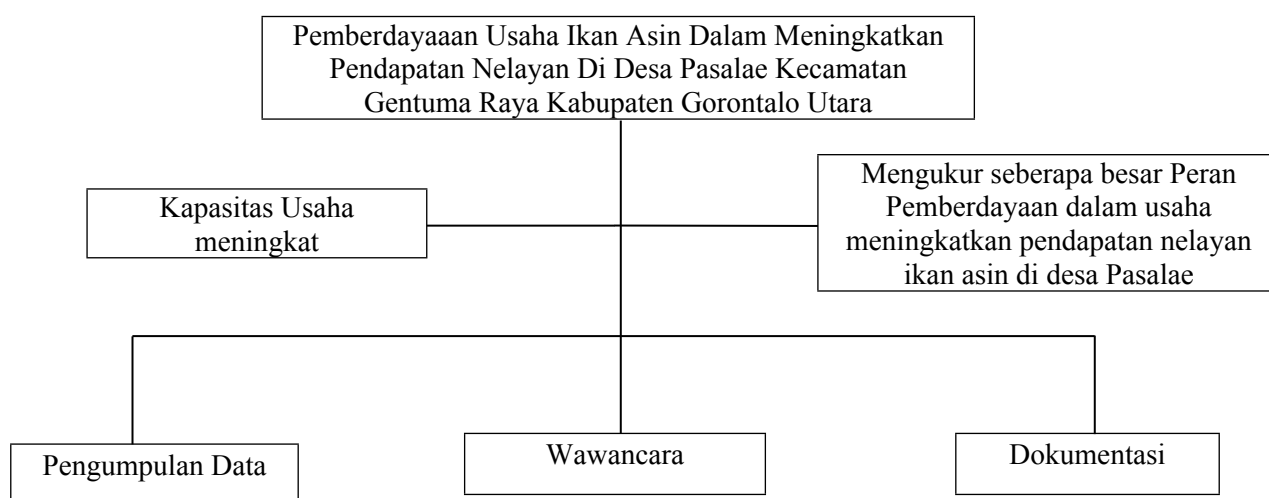
- a) Peningkatan sistem pendidikan, yang disusun agar masyarakat mengakses pendidikan yang lebih baik. Ini mencakup tidak hanya peningkatan fasilitas dan konten, serta interaksi antara pengajar dan peserta didik, tetapi juga membangun motivasi untuk belajar.
- b) Peningkatan akses yang relevan, sangat berkaitan dengan perbaikan pendidikan. Diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, terutama dalam aspek informasi dan komunikasi, sumber pendanaan, pengadaan alat dan produk, serta lembaga pemasaran.
- c) Peningkatan tindakan, dengan harapan bahwa perbaikan dalam pendidikan dan aksesibilitas akan membawa aksi-aksi yang lebih baik dari masyarakat.
- d) Peningkatan kelembagaan diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk membangun kemitraan dan kolaborasi antar lembaga.
- e) Peningkatan usaha, diharapkan faktor-faktor di atas dapat mendukung pengembangan usaha atau bisnis yang sedang berlangsung maupun yang akan datang.
- f) Peningkatan pendapatan, jika usaha telah diperbaiki, maka hal ini akan memberikan efek positif yang bisa menambah pendapatan masyarakat.
- g) Perbaikan lingkungan (*better environment*), dengan meningkatnya usaha dan pendapatan, diharapkan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Kemiskinan serta rendahnya pendapatan sering kali menjadi penyebab utama yang merusak lingkungan.
- h) Peningkatan kualitas hidup, jika konsep-konsep di atas berjalan dengan baik, pendapatan meningkat, dan lingkungan membaik, maka kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat juga akan membaik.

- i) Perbaiki masyarakat (*better community*), dengan meningkatnya kualitas hidupan sehingga, diharapkan terciptanya masyarakat yang lebih harmonis, dengan interaksi sosial yang lebih baik.

Kerangka Berfikir

Penjelasan konseptual mengenai hubungan antar variabel dalam penelitian ini disediakan oleh kerangka pemikiran. Pemberdayaan usaha ikan asin di Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, menjadi fokus dalam studi ini. Penekanan utama studi ini adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan masyarakat dan pemerintah desa untuk mengembangkan industri ikan asin dan meningkatkan pendapatan nelayan setempat. Peneliti menggunakan dua teori utama yaitu Teori Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Teori Kesejahteraan Masyarakat untuk mengkaji upaya pemberdayaan ini. Teori pemberdayaan masyarakat membantu dalam analisis bantuan pemerintah dan keterlibatan masyarakat. Sementara itu, teori kesejahteraan masyarakat menjelaskan bagaimana peningkatan pendapatan melalui usaha tersebut berdampak pada pendapatan nelayan dan keluarganya. Dengan menggunakan kedua teori ini, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan mengevaluasi upaya pemberdayaan usaha ikan asin di Desa Pasalae, serta bagaimana usaha tersebut dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap pendapatan dan ekonomi para nelayan di daerah tersebut.

Berikut adalah pemikiran dasar peneliti tentang Variabel yang diangkat dalam penelitian:



METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Kerangka berfikir mengarah pada pilihan metodologi penelitian deskriptif kualitatif. Dalam buku Metodologi Penelitian Dasar oleh Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., M.Si, metode kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata atau ungkapan lisan individu serta tindakan yang dapat disaksikan. Pendekatan ini dirancang untuk menawarkan metode yang komprehensif, mendalam, dan bertanggung jawab secara ilmiah untuk mengungkap berbagai keunikan yang terdapat pada orang, kelompok, komunitas, atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memberikan deskripsi terinci mengenai ucapan serta perilaku yang mungkin diamati dari individu, kelompok, komunitas, dan organisasi tertentu yang diteliti dengan perspektif yang menyeluruh dan lengkap. Tujuan penelitian deskriptif ini menggambarkan upaya penguatan usaha ikan asin dalam meningkatkan pendapatan para nelayan yang dilakukan oleh masyarakat desa Pasalae di Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara.

Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang tepat dari masyarakat, peneliti melaksanakan proses pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi penelitian. Berikut adalah metode yang diterapkan untuk mengumpulkan data untuk studi ini:

a) Observasi (Pengamatan)

Komponen penting dari penelitian kualitatif adalah observasi. Peneliti secara metodis dapat mencatat dan mempertimbangkan tindakan dan interaksi partisipan penelitian melalui observasi. Sepanjang relevan dengan subjek dan permasalahan yang diteliti, maka segala sesuatu yang didengar dan dilihat selama observasi dapat terdokumentasi dengan cermat. Manusia bukanlah satu-satunya hal yang dapat diamati; lingkungan, item lain, atau peristiwa juga dapat dimasukkan. Peneliti mengamati upaya masyarakat dalam memberdayakan usaha ikan asin lokal dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek yang diteliti. Metode yang diterapkan adalah observasi non partisipan, dimana peneliti hanya mengamati tanpa ikut serta. Metode ini digunakan untuk mengkonfirmasi data wawancara dan mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.

b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui dialog dengan tujuan tertentu antara dua orang atau lebih. Dalam penelitian ini, mengenai inisiatif penguatan usaha ikan asin untuk meningkatkan pendapatan nelayan di Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, dikumpulkan melalui wawancara. Penelitian ini menerapkan teknik wawancara semi-terstruktur. Jenis wawancara ini termasuk dalam kategori wawancara mendalam dan menawarkan lebih banyak kebebasan dalam pelaksanaannya dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara semi-terstruktur adalah untuk menyelami isu-isu dengan cara yang lebih terbuka, di mana para informan diminta bisa memberikan pendapat serta gagasan mereka. Dengan kata lain, peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, namun pertanyaan ini dapat berubah dan berkembang tergantung pada keadaan dan data yang diperlukan. Peneliti perlu benar-benar fokus selama sesi wawancara dan merekam apa yang diungkapkan oleh informan. Pemerintah Desa Pasalae dan pedagang ikan asin menjadi informan dalam penelitian ini.

c. Dokumentasi

Salah satu metode yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan metode lainnya adalah metode dokumentasi. Metode ini melibatkan pencarian data terkait berbagai topik atau variabel yang terdapat dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen pertemuan, agenda, dan sejenisnya. Dalam studi ini, pendekatan dokumentasi diterapkan untuk mengumpulkan informasi dari sumber tertulis yang relevan dengan kebutuhan penelitian dan berfungsi sebagai pelengkap agar data lebih tepat dan obyektif. Selain informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagian materi yang digunakan dalam studi ini berasal dari individu yang menjalankan usaha ikan asin.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Desa Pasalae, dengan luas wilayah yang tercatat sekitar 6 sampai 8 kilometer persegi (berdasarkan No. 01 Thn 1991), dapat ditemukan di Kecamatan Gentuma Raya, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Batas-batas wilayah desa ini adalah sebagai berikut: di sebelah

utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, di sebelah selatan dengan Desa Gentuma, di sebelah timur dengan Desa Nanati Jaya, dan di sebelah barat dengan Desa Ketapang.

Berdasarkan data dan observasi yang dikumpulkan peneliti, Desa Pasalae yang terletak di tepi Pantai mayoritas warganya menjadikan perikanan sebagai pekerjaan utama mereka. upaya masyarakat untuk memperkuat atau memberdayakan suatu usaha tertentu dikenal dengan kegiatan pemberdayaan. ide pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai adalah Pemberdayaan Masyarakat.

Karateristik Informan

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan dengan 25 orang informan di Desa Pasalae dapat digambarkan karateristik informan yaitu usia informan, tingkat pendidikan informan, dan pengalaman sebagai pengusaha ikan asin.

a. Berdasarkan rentan usia

Tabel 4.1 Informan Berdasarkan Usia

No	Umur Responden	Jumlah	Prsentase	Keterangan
1	Umur 24-30	8	40%	Produktif
2	Umur 31-40	10	50%	Sangat Produktif
3	Umur 41-50	2	15%	Kurang Produktif
4	Umur 51-65	5	20%	Kurang Produktif
Jumlah		25	100%	

Sumber: Data Hasil wawancara, Tahun 2025

Dari tabel yang disajikan dapat di ketahui bahwa jumlah pengusaha ikan asin yang berada dalam kategori usia produktif mencapai 18 orang atau 100%. Selain itu, terdapat juga 7 orang atau 50% yang tergolong dalam usia lanjut namun masih aktif dalam berusaha. Rata-rata individu yang berada pada rentang usia produktif tersebut umumnya sudah membangun keluarga, sehingga usaha ikan asin berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi mereka.

b. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk keterlibatan masyarakat dan menciptakan beragam peluang kerja. Pendidikan tingkat lanjut dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan dan cara berpikir seseorang. Manfaat pendidikan bagi masyarakat

meliputi menumbuhkan kesadaran yang lebih besar, mengubah pola pikir masyarakat, dan meningkatkan penerimaan terhadap berbagai perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Menurut hasil dari wawancara yang telah dilakukan, latar belakang pendidikan formal dari narasumber ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Informan Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prsentae
1	SD	12	85%
2	SMP	6	56%
3	SMA	4	26%
4	Diploma/S1	3	18%
Jumlah		25	100%

Sumber: Data Hasil wawancara, Tahun 2025

Data yang tercantum di atas, responden tamatan SMA sebanyak 12%, responden tamatan SMP sebanyak 6%, responden tamatan SD sebanyak 85%, dan responden tamatan Deploma/S1 sebanyak 18%. Melihat hasil penelitian tersebut, dapat dilihat bahwa banyak responden memiliki tingkat pendidika yang rendah, yang berdampak besar pada cara berfikir mereka dalam membangun usaha, karena mereka cenderung hanya melanjutkan pekerjaan yang sudah menjadi kebiasaan atau tradisi mereka.

Tabel 4.3 Data Pengusaha Ikan Asin

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1	Berlit Pakaya	50 tahun	Nelayan	Pasalae
2	Novan Tauli	39 tahun	Nelayan	Pasalae
3	Alvian Nusa	40 tahun	Nelayan	Pasalae
4	Rita Ibrahim	38 tahun	Nelayan	Pasalae
5	Yuly	45 tahun	Nelayan	Pasalae
6	Wily Salindeho	29 tahun	Nelayan	Pasalae
7	Okta Via Dalako	35 tahun	Nelayan	Pasalae
8	Kristi Ranoonuwu	28 tahun	Nelayan	Pasalae
9	Lian Mahajani	38 tahun	Nelayan	Pasalae

10	Yanti Salindeho	36 tahun	Nelayan	Pasalae
11	Naspa Basurapa	38 tahun	Nelayan	Pasalae
12	Selvi Lahubaha	29 tahun	Nelayan	Pasalae
13	Nur' Afny Oktaviani Habe	59 tahun	Nelayan	Pasalae
14	Sestevian Paparang	59 tahun	Nelayan	Pasalae
15	Supriyanto Payuh	65 tahun	Nelayan	Pasalae
16	Arie Vani Sala	54 tahun	Nelayan	Pasalae
17	Rafit Helingo	28 tahun	Nelayan	Pasalae
18	Fey Tenda	24 tahun	Nelayan	Pasalae
19	Apson Mohibu	27 tahun	Nelayan	Pasalae
20	Margaretha Panguliman	55 tahun	Nelayan	Pasalae
21	Risky Maulana	32 tahun	Nelayan	Pasalae
22	Febrianto Moh	28 tahun	Nelayan	Pasalae
23	Skelong Abidin	32 tahun	Nelayan	Pasalae
24	Deky David Dumat	30 tahun	Nelayan	Pasalae
25	Apolos Sidangoli	31 tahun	Nelayan	Pasalae

Sumber: Data hasil wawancara, Tahun 2025

Pembahasan Kebutuhan Pemberdayaan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha ikan asin di Desa Pasalae mengalami kesulitan dalam mengakses alat produksi yang memadai. Mereka masih menggunakan metode tradisional dalam proses pengasinan dan pengeringan ikan, yang berdampak pada efisiensi waktu dan kualitas produk. Selain itu, pelaku usaha juga merasa perlu mendapatkan pelatihan tentang teknik produksi modern, pengemasan, serta strategi pemasaran yang efektif.

Permasalahan lain yang muncul adalah lemahnya kelembagaan kelompok usaha. Banyak pelaku usaha yang masih bekerja secara individu tanpa membentuk kelompok atau koperasi, sehingga sulit mengakses bantuan dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Akses pasar juga menjadi tantangan utama, karena produk ikan asin dari Desa Pasalae belum mampu menembus pasar luar daerah secara maksimal.

Pelaksanaan Program Pemberdayaan

Program pemberdayaan usaha ikan asin di Desa Pasalae dilaksanakan melalui kerja sama antara pemerintah desa, dinas perikanan, dan lembaga pelatihan lokal. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan teknis pengolahan ikan asin, manajemen usaha, pelatihan digital marketing, serta penyediaan bantuan alat produksi dan modal usaha.

Setiap pelatihan diikuti oleh 20 hingga 25 peserta dan dilaksanakan 2 sampai 4 kali dalam sebulan. Pelatihan ini dinilai sangat membantu pelaku usaha dalam meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Salah satu pelaku usaha menyatakan bahwa setelah mengikuti pelatihan, ia mampu meningkatkan kualitas produk serta menjangkau pasar melalui media sosial dan platform digital.

Hasil Dan Dampak Pemberdayaan

Dampak dari pemberdayaan terlihat dari peningkatan kapasitas produksi para pelaku usaha. Dengan bantuan alat pengering dan timbangan digital, proses produksi menjadi lebih cepat dan hasil produk lebih seragam. Selain itu, pelatihan manajemen usaha membuat pelaku usaha lebih tertib dalam mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menyusun strategi pengembangan usaha jangka panjang.

Pelatihan digital marketing juga membuka peluang baru dalam pemasaran. Beberapa pelaku usaha telah mampu menjual produk ikan asin secara daring ke luar daerah, bahkan antarprovinsi. Peningkatan pendapatan dan perluasan pasar menjadi indikator utama bahwa program pemberdayaan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di Desa Pasalae.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemberdayaan usaha ikan asin di Desa Pasalae merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kapasitas usaha masyarakat pesisir. Kebutuhan akan pelatihan, alat produksi, penguatan kelembagaan, dan akses pasar telah direspon melalui program pemberdayaan yang komprehensif. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas produk, manajemen usaha, dan pemasaran. Ke depan, keberlanjutan program ini perlu dijaga dengan dukungan lintas sektor agar pelaku usaha semakin mandiri dan kompetitif.

Saran

Untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas pemberdayaan usaha ikan asin di Desa Pasalae, disarankan adanya pelatihan berkelanjutan yang terstruktur dan fleksibel terkait teknik pengolahan, sanitasi, pengemasan, pemasaran, serta inovasi produk. Bantuan alat produksi, pendampingan pasca-pelatihan, dan akses terhadap teknologi modern juga perlu ditingkatkan. Pembentukan kelompok usaha atau koperasi dapat memperkuat posisi tawar pelaku usaha. Selain itu, perluasan jaringan pasar melalui platform digital serta dukungan pemerintah dalam hal akses pasar dan permodalan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatchudin, M. A., & Santoso, A. B. (2022). Analisis Kesesuaian dan Daya Dukung Kawasan Wisata Pantai Marina Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. *Geo Image (Spatial-Ecological-Regional)* 11(2), 189–197.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/geoimage/article/view/59171>
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2017) Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik Bandung: Alfabeta. ISBN: 978-602-7825-07-9.
- Ratnawati 2023, *teknologi baru untuk meningkatkan hasil tangkapan dan efisiensi operasional*.
- Wibowo, A. (2021). Pemberdayaan Sosial dan Ketimpangan Struktural: Kajian Teori dan Praktik. Jakarta: Rajawali Pers.(Management)." Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.